

**HUBUNGAN SENTRALITAS DENGAN BENTUK DAN TINGKAT
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROYEK P2MPD
DI KECAMATAN CISAYONG KABUPATEN TASIKMALAYA**

TESIS

Disusun dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

ANDRI ANDRIANSYAH

L4D002116



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

UPT-PUSTAK-UNDIP

**HUBUNGAN SENTRALITAS DENGAN BENTUK DAN TINGKAT
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROYEK P2MPD
DI KECAMATAN CISAYONG KABUPATEN TASIKMALAYA**

Tesis Diajukan kepada
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

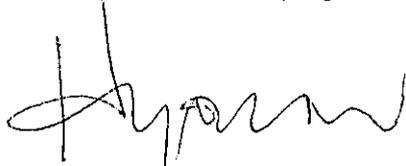
Oleh :
ANDRI ANDRIANSYAH
L4D002116

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 07 Juni 2004

Dinyatakan diterima
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 17 Juni 2004

Pembimbing Pendamping



Ir. Hadi Wahyono, MA

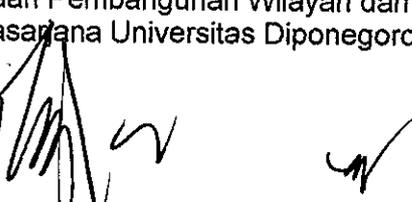
Pembimbing Utama



Dr. Ari Pradanawati, MS

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

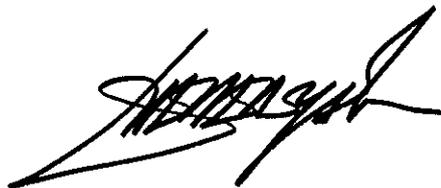



Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelas kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan Saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 17 Juni 2004



Oleh :

ANDRI ANDRIANSYAH

L4D002116

IMPOSSIBLE HANYALAH SUATU KATA BESAR
YANG DIGUNAKAN PECUNDANG,
YANG MERASA HIDUP LEBIH MUDAH DI DALAM DUNIA
YANG DISEDIAKAN UNTUK MEREKA,
DARIPADA MENJELAJAHI KEMAMPUAN MEREKA
UNTUK MENGUBAH HIDUPNYA.

IMPOSSIBLE BUKANLAH FAKTA, TETAPI SEBUAH OPINI.
IMPOSSIBLE BUKANLAH SUATU PERNYATAAN,
TETAPI SUATU TANTANGAN
IMPOSSIBLE ADALAH POTENSI.
IMPOSSIBLE TIDAKLAH KEKAL.

IMPOSSIBLE IS NOTHING !!!

(DIKUTIP DARI IKLAN ADIDAS VERSI MEDIA CETAK)

Tesis ini kupersembahkan untuk :
Bapak dan Ibuku tercinta : Cecep Abdul Rodjak (alm) dan Masitoh
Istri dan Anakku tercinta : Anne dan Jilan
Adikku tercinta : Pipik dan Eva
Juga untuk keluarga besar Gunung Pereng, Cisayong dan Jl. Kehutanan
serta teman-teman MPPWK II

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Alloh SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hanya dengan izin-Nya kami dapat menyelesaikan tesis berjudul **“Hubungan Sentralitas dengan Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Proyek P2MPD di Kecamatan Cisayong”**. Tesis ini merupakan salah satu tahapan yang harus diselesaikan dalam studi di Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.

Dalam pengerjaan dan penyusunan tesis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Ir. Nana Rukmana D. Wiradiprdja, MA sebagai Kepala Pusat Pendidikan Keahlian Teknik (Pusdiktek) Departemen Kimpraswil atas kesempatan dan beasiswa yang diberikan untuk mengikuti program pendidikan di Universitas Diponegoro.
2. Ir. Sidharta Saelan, MM sebagai Kepala Balai Kerjasama LPPU Semarang, Departemen Kimpraswil atas segala arahnya.
3. Prof.Dr.Ir.Sugiono Sutomo, DEA selaku Ketua Program Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, atas segala arahnya.
4. Dr. Ari Pradanawati, MS, selaku Mentor dan Ir. Hadi Wahyono, MA, selaku Co-Mentor yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penyusunan pratesis ini.
5. Ir. Mardwi Rahdriawan, MT, selaku pembahas yang memberikan masukan yang sangat berguna bagi kelayakan dan ketajaman tesis.
6. Samsul Ma'rif, SP, MT, selaku penguji yang memberikan masukan yang sangat mendalam terutama mengenai masalah perdesaan.
7. Drs. Mamat Hendrawan, BE, selaku Pimpinan Proyek P2MPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2002, yang telah memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan data awal serta dukungan baik moril maupun materil.
8. Istriku tercinta Anne yang setia mendampingi dan memberikan dukungan semangat. Jilan yang dengan keceriaan dan kemanjaannya telah menghilangkan semua kelelahan dan kepenatan.
9. Yang tercinta Mamah, Alm. Bapak, Ibu, Adikku Pipik dan Eva, Kankan, Keluarga Besar Gunung Pereng, Keluarga Besar Cisayong, Keluarga Besar Jl. Pabrik Es atas semua dukungannya.
10. Masyarakat Mas Kus dan Bang Agus atas segala bantuannya, Pak Hasto, Fuad, Niken, Medy, Hendra, Icon atas segala masukannya serta seluruh teman-teman MPPWK Angkatan II UNDIP atas kekompakan dan saling menolongnya dalam menjalani studi.
11. Keluarga Besar Asrama Keluarga, baik ibu-ibu dan anak-anaknya yang telah memberi suasana keluarga sehingga sedikit banyak dapat mengurangi kerinduan suasana rumah.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan pra tesis ini, oleh karenanya segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai masukan yang sangat berharga. Semoga hasil penulisan pra tesis ini dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, 17 Juni 2004
Penyusun,

ANDRI ANDRIANSYAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Permasalahan.....	6
1.3. Tujuan dan Sasaran.....	7
1.3.1. Tujuan.....	7
1.3.2. Sasaran.....	8
1.5. Ruang Lingkup	8
1.5.1. Ruang Lingkup Substansi	8
1.5.2. Ruang Lingkup Lokasi.....	8
1.6. Kerangka Pemikiran.....	9
1.7. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN SENTRALITAS, DESA-KOTA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	
2.1. Faktor Sentralitas dan Interaksi Desa-Kota.....	14
2.1.1. Sosial Ekonomi Masyarakat Desa	14
2.1.2. Sosial Ekonomi Masyarakat Kota.....	16
2.1.3. Interaksi Desa-Kota.....	18
2.1.4. Teori Tempat Pusat (<i>Central Place Theory</i>)	20
2.2. Partisipasi Masyarakat	22

2.2.1.	Pengertian Partisipasi Masyarakat	22
2.2.2.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.....	23
2.2.3.	Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat	24
2.2.4.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	29
2.2.4.1.	Faktor-Faktor Internal.....	29
2.2.4.2.	Faktor-Faktor Eksternal.....	31
2.2.4.3.	Faktor-Faktor Keruangan.....	31
2.3.	Rangkuman.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Jenis Penelitian.....	37
3.2.	Jenis Data.....	37
3.3.	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.4.	Teknik Pengambilan Sampel.....	40
3.5.	Metode Analisis.....	44

BAB IV GAMBARAN UMUM PROGRAM PENUNJANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH (P2MPD) DI KECAMATAN CISAYONG TAHUN 2002

4.1.	Gambaran Umum Kabupaten Tasikmalaya	49
4.1.1.	Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya	49
4.1.2.	Program P2MPD di Kabupaten Tasikmalaya	50
4.2.	Gambaran Umum Kecamatan Cisayong.....	53
4.2.1.	Kondisi Fisik Wilayah.....	53
4.2.2.	Kondisi Sosial Ekonomi.....	54
4.2.3.	Proyek P2MPD di Kecamatan Cisayong	56
4.3.	Gambaran Umum Proyek P2MPD	59
4.3.1.	Tujuan Proyek.....	59
4.3.2.	Ruang Lingkup Proyek.....	59
4.3.3.	Mekanisme Pengelolaan.....	60
4.3.3.1.	Pengusulan dan Penetapan Desa/Kelurahan	62
4.3.3.2.	Konsultan Manajemen Daerah (KMD) dan Fasilitator	62

4.3.3.3.	Pengusulan, Perencanaan dan Penetapan Proyek Tipe A	63
4.3.3.4.	Mekanisme Pelaksanaan Proyek Tipe A.....	65
4.3.3.5.	Mekanisme Operasi dan Pemeliharaan Proyek Tipe A	66

BAB V ANALISIS HUBUNGAN SENTRALITAS DENGAN BENTUK DAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROYEK P2MPD DI KECAMATAN CISAYONG

		67
5.1.	Analisa Tingkat Sentralitas.....	69
5.1.1.	Analisa Tingkat Sentralitas Desa di Kecamatan Cisayong.....	69
5.1.2.	Analisa Aksesibilitas dan Jarak Antar Pusat.....	75
5.1.3.	Analisa Tingkat Sentralitas diperbandingkan dengan Jarak Dari Pusat Pelayanan	78
5.1.4	Analisa Penduduk.....	79
5.2.	Analisa Peran Serta Masyarakat di Kecamatan Cisayong	82
5.2.1.	Bentuk Peran Serta Masyarakat di Kecamatan Cisayong	82
5.2.1.1	Bentuk Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong dilihat dari Sifat Kehadiran dalam Rembug Desa.....	82
5.2.1.2.	Bentuk Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong dilihat dari Kegiatan Fisik.....	84
5.2.1.3.	Bentuk Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong dilihat dari Cara Ikut Serta dalam Kegiatan.....	86
5.2.1.4.	Bentuk Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong dilihat dari Frekuensi Berkumpul.....	88
5.2.1.5.	Bentuk Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong dilihat dari Rutinitas Kegiatan.....	89
5.2.1.6.	Bentuk Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong dilihat dari Derajat Kesukarelaan	91
5.2.2.	Tingkat Peran Serta Masyarakat di Kecamatan Cisayong	95
5.2.2.1	Tingkat Peran Serta Masyarakat di Kecamatan Cisayong dilihat dari Tingkat Kehadiran dalam Pertemuan.....	95
5.2.2.2.	Tingkat Peran Serta Masyarakat di Kecamatan Cisayong dilihat dari Keaktifan Berdiskusi.....	97
5.2.2.3.	Tingkat Peran Serta Masyarakat di Kecamatan Cisayong dilihat dari	

Kehadiran dalam Kegiatan Fisik.....	98
5.2.2.4. Tingkat Peran Serta Masyarakat di Kecamatan Cisayong dilihat dari Keaktifan Membayar Iuran.....	99
5.3. Analisa Hubungan sentralitas dengan Bentuk dan Tingkat Peran Serta	105
5.3.1. Analisa Hubungan sentralitas dengan Bentuk Peran Serta.....	105
5.3.2. Analisa Hubungan sentralitas dengan Tingkat Peran Serta.....	109
5.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bentuk dan Tingkat Peran Serta Masyarakat	111
5.4.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bentuk Peran Serta Masyarakat	111
5.4.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Peran Serta Masyarakat.....	112
5.5. Pembahasan	115
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	123
6.1. Kesimpulan.....	123
6.2. Rekomendasi.....	126
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN	131

DAFTAR TABEL

TABEL II.1.	Skala Partisipasi Menurut Chapin	28
TABEL II.2.	Skala Partisipasi Menurut Black.....	29
TABEL II.3.	Skala Partisipasi dalam Penelitian.....	29
TABEL II.4.	Rangkuman Teori	32
TABEL III.1.	Kebutuhan Data	39
TABEL III.2.	Perhitungan Jumlah Sampel Penelitian	43
TABEL III.3.	Distribusi Responden dalam Purposive Sampling	43
TABEL III.4.	Skala Partisipasi dalam Penelitian	45
TABEL III.5.	Format Tabulasi Silang	47
TABEL IV.1.	Luas Wilayah Kecamatan Cisayong	53
TABEL IV.2.	Jumlah Penduduk Kecamatan Cisayong	54
TABEL IV.3.	Jenis dan Volume Pekerjaan P2MPD tahun 2002 di Kecamatan Cisayong	56
TABEL IV.4.	Tingkat Swadaya Masyarakat Kecamatan Cisayong dalam Proyek P2MPD tahun 2002	57
TABEL V.1.	Kelompok Desa menurut Tingkat Sentralitas	72
TABEL V.2.	Jumlah dan jenis Fasilitas di Kecamatan Cisayong	73
TABEL V.3.	Perhitungan Indeks Sentralitas Terbobot	74
TABEL V.4.	Jarak antar Pusat	76
TABEL V.5.	Jumlah, Kepadatan dan Mata Pencaharian Penduduk	80
TABEL V.6.	Bentuk Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong pada Proyek P2MPD tahun 2002	93
TABEL V.7.	Tingkat Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong pada Proyek P2MPD tahun 2002	101
TABEL V.8.	Skala Peran Serta Masyarakat Tiap Desa di Kecamatan Cisayong Pada Proyek P2MPD tahun 2002	104

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1.	Kerangka Pemikiran	11
GAMBAR 2.1.	Zone-zone Desa-Kota	19
GAMBAR 2.2.	Tipologi Tingkat Peran Serta Masyarakat dari Arstein.....	27
GAMBAR 4.1.	Peta Kabupaten Tasikmalaya	52
GAMBAR 4.2.	Komposisi Penduduk menurut Mata Pencaharian	55
GAMBAR 4.3.	Komposisi Penduduk menurut Pendidikan yang Ditamatkan	55
GAMBAR 4.4	Peta Kecamatan ¹ Cisayong	58
GAMBAR 4.5.	Mekanisme Pelaksanaan Proyek Tipe A	61
GAMBAR 5.1.	Peta Sebaran Responden.....	68
GAMBAR 5.2.	Akses dan Jarak Antar Pusat	77
GAMBAR 5.3.	Grafik Tingkat Sentralitas Berbanding Jarak dari Pusat.....	78
GAMBAR 5.4.	Peta Tingkat Sentralitas Desa	82
GAMBAR 5.5.	Bentuk Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong dilihat dari Sifat Kehadiran dalam Rembug Desa	83
GAMBAR 5.6.	Bentuk Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong dilihat dari Kegiatan Fisik	85
GAMBAR 5.7.	Bentuk Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong dilihat dari Cara ikut Serta dalam Kegiatan	87
GAMBAR 5.8.	Bentuk Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong dilihat dari Frekuensi Berkumpul	89
GAMBAR 5.9.	Bentuk Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong dilihat dari Rutinitas Kegiatan	91
GAMBAR 5.10.	Bentuk Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong dilihat dari Derajat Kesukarelaan	92
GAMBAR 5.11.	Tingkat Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong dilihat dari Tingkat Kehadiran dalam Pertemuan	96
GAMBAR 5.12.	Tingkat Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong dilihat dari Keaktifan berdiskusi	97
GAMBAR 5.13.	Tingkat Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong dilihat dari Kehadiran dalam Kegiatan Fisik	99

GAMBAR 5.14.	Tingkat Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong dilihat dari Keaktifan Membayar Iuran	100
GAMBAR 5.15.	Peta Tingkat Peran Serta Masyarakat	103
GAMBAR 5.16.	Hubungan Sentralitas dengan Sifat Kehadiran dalam Rembug Desa ...	105
GAMBAR 5.17.	Hubungan Sentralitas dengan Keterlibatan dalam Pelaksanaan	106
GAMBAR 5.18.	Hubungan Sentralitas dengan Cara Ikut Serta	107
GAMBAR 5.19.	Hubungan Sentralitas dengan Frekuensi Berkumpul	107
GAMBAR 5.20.	Hubungan Sentralitas dengan Rutinitas Kegiatan Berkumpul	108
GAMBAR 5.21.	Hubungan Sentralitas dengan Derajat Kesukarelaan	108
GAMBAR 5.22.	Hubungan sentralitas dengan Tingkat Peran Serta Masyarakat	110
GAMBAR 5.23.	Hubungan Tingkat Sentralitas dengan Tingkat Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong	111
GAMBAR 5.24.	Hubungan Usia Responden dengan Tingkat Peran Serta	113
GAMBAR 5.25.	Hubungan Jenis Kelamin dengan Tingkat Peran Serta	113
GAMBAR 5.26.	Hubungan Jenis Pekerjaan dengan Tingkat Peran Serta	114
GAMBAR 5.27.	Hubungan Tingkat Pendapatan dengan Tingkat Peran Serta	114
GAMBAR 5.28.	Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Peran Serta	115
GAMBAR 5.29.	Diagram Sebaran Tingkat Sentralitas dan Tingkat Peran Serta	117
GAMBAR 5.30.	Hubungan Tingkat Sentralitas dengan Tingkat Peran Serta	117
GAMBAR 5.31.	Hubungan Tingkat Sentralitas dengan Bentuk Peran Serta	118
GAMBAR 5.32.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Serta Masyarakat	121

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A. : Kuesioner

LAMPIRAN B. : Wawancara

LAMPIRAN C : Foto-foto Kegiatan Pengamatan Lapangan

LAMPIRAN D. : Tabel Data Responden

LAMPIRAN E. : Perhitungan Tabulasi Silang menggunakan *Chi Square*

ABSTRAK

Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) merupakan suatu proyek yang diharapkan memberikan dampak langsung terhadap pembangunan masyarakat dan dapat membantu pemerintah daerah dalam membiayai penyediaan serta pemeliharaan prasarana dan sarana umum. Pada proyek P2MPD tahun 2002 di Tasikmalaya terjadi penurunan tingkat swadaya masyarakat dibanding tahun sebelumnya.

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam proyek P2MPD dengan mengetahui bentuk dan tingkat peran serta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta mengetahui hubungan sentralitas dengan bentuk dan tingkat peran serta. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan analisa kuantitatif dengan tabulasi silang yang didukung dengan diskriptif kualitatif.

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat pada proyek P2MPD tahun 2002 di Kabupaten Tasikmalaya khususnya di 7 desa di Kecamatan Cisayong memiliki bentuk yang berbeda. Dalam rembug desa masyarakat di desa dengan sentralitas lebih rendah lebih senang datang sendiri daripada diwakilkan sebaliknya di desa dengan sentralitas tinggi dan sedang yang lebih memilih diwakili. Cara ikut serta masyarakat dalam berperan serta juga berbeda, di daerah yang sentralitas tinggi dan sedang, bentuk sumbangan masyarakat paling banyak berupa sumbangan uang. Sebaliknya di desa dengan sentralitas rendah masyarakat lebih memilih sumbangan berupa tenaga. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan ada kecenderungan semakin rendah tingkat sentralitas desa, masyarakat lebih memilih bentuk ikut kerja bakti massal daripada bentuk lain. Mengenai rutinitas kegiatan pertemuan, bisa dikatakan tidak dipengaruhi oleh sentralitas desa. Sedangkan mengenai derajat kesukarelaan maka pada umumnya masyarakat melakukan kegiatan peran serta tanpa merasa sama sekali atau dapat dikatakan berbentuk peran serta bebas, tetapi ada kecenderungan semakin tinggi tingkat sentralitas semakin menurun derajat kesukarelaannya.

Sedangkan tingkat peran serta masyarakat di 7 desa di Kecamatan Cisayong pada proyek P2MPD ada 2 kelompok yaitu desa dengan tingkat peran serta masyarakat tinggi (Santanamekar, Sukasetia, Purwasari dan Sukaraharja) dan desa dengan tingkat peran serta rendah (Cisayong, Jatihurip dan Cikadu). Sehingga bisa dikatakan faktor sentralitas berhubungan dengan tingkat peran serta, dimana semakin tinggi sentralitas suatu daerah semakin rendah tingkat peran serta masyarakatnya.

Bentuk-bentuk dan tingkat peran serta tersebut diatas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari 5 ciri-ciri individu sebagai faktor internal yang secara signifikan mempengaruhi bentuk peran serta adalah faktor umur dan tingkat pendapatan. Selain itu faktor sentralitas desa juga berhubungan dengan bentuk peran serta. Sedangkan tingkat peran serta masyarakat dipengaruhi faktor jenis kelamin dan umur serta berhubungan dengan sentralitas. Pelapisan sosial di masyarakat yang lebih memberi kesempatan kepada laki-laki dengan usia yang telah dianggap dewasa dan mapan.

Dengan demikian untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi proyek P2MPD maupun proyek sejenis di masa yang akan datang, perlu kiranya mempertimbangkan tingkat sentralitas suatu desa dalam pemilihan lokasi proyek. Selain itu jenis proyek yang diberikan juga harus mempertimbangkan bentuk-bentuk peran serta berdasarkan tingkat sentralitasnya, misalnya untuk desa dengan sentralitas rendah sebaiknya diberikan proyek yang bersifat padat karya sebaliknya untuk desa dengan sentralitas tinggi diberikan proyek yang bersifat stimulan.

ABSTRACT

P2MPD (Community and Local Government's Empowerment Supporting Project) is a project that expected to give a direct impact to the society development and help the local government to finance the supplying and maintenance of public means and infrastructure. In the P2MPD project in Tasikmalaya in 2002, there was a decreasing of community's self supporting level compared to the previous year.

The research was conducted with the purpose of increasing the efficiency and optimalization of community's participation level in P2MPD project by knowing the form and participation level and factors influencing it and also by knowing the correlation of centrality with the form and participation level. In order to achieve that purpose, a quantitative analysis with cross tabulation supported with qualitative descriptive was conducted.

The form of community's participation in P2MPD project in Tasikmalaya, particularly in 7 villages in Cisayong Sub District have different type. In the village conference (rembug desa), people in the village with less centrality level prefer coming alone to representing themselves, on the contrary, in the village with high and medium centrality prefer to be represented. The way of community's participation is also different, in the place with high and medium centrality, most people give their assistance in the form of money. On the contrary, in the village with low centrality, people prefer choosing their participation in the form of power as a labor. There is a tendency that the village centrality level is getting lower in the establishment of the form of community's participation, people prefer following the voluntary labor service to another form. In the case of a meeting activity routinity, it can be said that it isn't has correlation with village centrality. Meanwhile, in the case of volunteering degree, people commonly conduct the contribution, however there is a tendency that the higher the centrality level, the lower the volunteering degree.

Meanwhile there are 2 group of the community's participation in 7 villages in Cisayong Sub District in the P2MPD project, namely a village with high community's participation (Santanamekar, Sukasetia, Purwasari and Sukaraharja) and the village with low community's participation (Cisayong, Jatihurip and Cikadu). Thus, it can be said that centrality factor has correlation with the participation level, in which the higher the area's centrality, the lower its community's participation.

The form and level of participation above are influenced by some factors. Of five individual's characteristics as an internal factor influencing the form of participation significantly are ages and income level factors. Beside that the village centrality level also has the correlation with the form of participation. Meanwhile the level of community's participation is influenced by sex, ages and centrality factors. A social stratum in the society that give more chances to the man with old or established age.

Thus in order to increase the efficiency an optimalization of the P2MPD project or the other same project in the future, it necessary to consider the level of centrality in choosing the project location. Beside that the kind of given project shoul also consider the form of participation based on its centrality level, for example, in the village with low centrality, it is necessary to conduct the project that full of labor, on contrary, for the village with high centrality it is necessary to conduct the stimulant project.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyediaan prasarana dan sarana publik merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan. Prasarana dan sarana publik juga memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi. Penyediaan prasarana dan sarana publik ini dulu merupakan tanggung jawab penuh pemerintah.

Pergeseran peran yang dimainkan oleh pemerintah dari sebagai penyedia seluruh dana dan pelayanan menjadi fasilitator '*enabler*' (Osborne dan Gaebler,1996;58-61) dimana pemerintah tidak harus melakukan suatu pekerjaan yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. Tetapi upaya menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya penting untuk mendukung kegiatan pembangunan, tetapi juga masyarakat dapat berperan lebih besar dalam kegiatan yang dilakukan sendiri. Dengan demikian, menjadi tugas penting manajemen pembangunan untuk membimbing, menggerakkan dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat (Ginanjar,1997;57)

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat itu sendiri. Kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti pendidikan, pendapatan, lingkungan tempat tinggal dan lainnya sangat berpengaruh pada bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat. Perbedaan kondisi sosial ekonomi di antara masyarakat desa dan kota memungkinkan terjadinya perbedaan partisipasi masyarakat desa dan kota.

Menurut pendapat Bintarto, ciri-ciri desa antara lain berupa unsur-unsur sosial pembentuk desa, yaitu penduduk dan tata kehidupan. Ikatan tali kekeluargaan di desa

sangat erat, dimana *gemeinschaft* dengan perilaku gotong royong masyarakat menjadi dominan. Sedangkan kota disebutkan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang memiliki kecirian sosial seperti jumlah penduduk yang tinggi, strata sosial-ekonomi yang heterogen dengan corak materialistis. (Koestoer, 1997; 4).

Interaksi antara desa dengan kota secara fisik membentuk daerah baru yang disebut daerah desa-kota. Pengertian desa-kota menurut Bar-Gal (dalam Koestoer, 1997; 4) adalah daerah yang merupakan daerah *urban fringe* (dipengaruhi kota). Daerah ini ditandai oleh berbagai karakteristik, seperti peningkatan harga tanah yang drastis, perubahan fisik penggunaan tanah, perubahan komposisi penduduk dan tenaga kerja, serta berbagai aspek sosial lainnya. Interaksi antara desa dengan kota juga terjadi dalam aspek sosial. Karena pengaruh dari interaksi aspek sosial tersebut, perilaku gotong royong masyarakat daerah desa-kota kurang bila dibandingkan dengan masyarakat desa, tapi masih lebih kuat bila dibandingkan dengan masyarakat kota.

Berdasarkan karakteristik sosial masyarakat di atas, seharusnya partisipasi masyarakat di desa lebih tinggi bila dibandingkan dengan masyarakat di kota. Salah satunya bisa dilihat dari perilaku gotong royong yang masih kuat, masyarakat desa seharusnya memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat desa-kota dan kota.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan selain berkaitan dengan faktor internal masyarakat, juga berhubungan dengan sejumlah faktor tertentu. Salah satu faktor tersebut antara lain faktor sentralitas yang diukur melalui sejauh mana daerah yang bersangkutan merupakan pusat-pusat dari suatu pertumbuhan (*growth centre*) dari daerah lain atau sejauh mana daerah yang bersangkutan memiliki daya jangkau terhadap pusat-pusat pertumbuhan yang ada. (Slamet, 1994; 115).

Menurut Christaller, (dalam Jayadinata, 1992;125-127) aspek terpenting yang menjadi dasar dari teori tempat sentral (*central place theory*), adalah bahwa kota dipandang sebagai sebagai tempat pelayanan, semakin tinggi tingkat pelayanan suatu tempat, maka semakin tinggi tingkat sentralitasnya. Sehingga bila dilihat dari tingkat sentralitas, daerah kota (*growth centre*) mempunyai tingkat sentralitas tertinggi, kemudian diikuti oleh desa-kota dan terakhir desa sebagai daerah yang mempunyai tingkat pelayanan yang lebih rendah sehingga mempunyai tingkat sentralitas terendah.

Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) merupakan suatu proyek yang diharapkan memberikan dampak langsung terhadap pembangunan masyarakat dan dapat membantu pemerintah daerah dalam membiayai penyediaan serta pemeliharaan prasarana dan sarana umum. Proyek P2MPD ini terdiri dari dua Paket Pekerjaan, yaitu Paket A yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang melibatkan masyarakat mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan, serta Paket B yang melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan tetapi pelaksanaan dan pemeliharaannya dilakukan oleh kontraktor.

Proyek P2MPD Paket A di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2002 dilaksanakan di 100 (seratus) desa di 29 Kecamatan. Desa-desa tersebut letaknya bervariasi, ada yang merupakan ibukota kecamatan, sebagian di sekitar ibukota kecamatan dan sebagian lagi merupakan desa terpencil. Paket A Proyek P2MPD yang terletak di 'desa' dan di daerah pengaruh kota (desa-kota) memungkinkan adanya perbedaan sosial ekonomi di antara masyarakat desa tersebut. Dilihat dari faktor sentralitas dan perbedaan aspek sosial ekonomi masyarakatnya, sangat memungkinkan adanya perbedaan tingkat partisipasi di antara desa-desa tersebut.

Sesuai dengan yang tercantum dalam *Loan Agreement ADB 1678-INO* dan *Pedoman Umum P2MPD*, desa-desa yang mendapat bantuan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Desa/ Kelurahan yang terkena dampak krisis cukup parah, yang ditunjukkan oleh tingginya jumlah dan presentase penduduk miskin pasca krisis.
2. Desa/ Kelurahan yang tidak/ belum memiliki prasarana dan sarana yang memadai yang ditunjukkan oleh:
 - a. Tingkat ketersediaan prasarana dan sarana dasar permukiman seperti jalan, drainase, air bersih, MCK, dan lain-lain.
 - b. Tingkat ketersediaan prasarana dan sarana kegiatan produksi dan distribusi seperti jalan, pasar, irigasi, dan lain-lain.
3. Desa/ Kelurahan yang tidak sedang mendapatkan bantuan dari program lain pada tahun yang sama, seperti PPK, P3DT dan P2P.
4. Desa/ kelurahan yang masyarakatnya bersedia untuk berpartisipasi secara aktif dalam tiap tahapan pembangunan.

Desa-desa yang mendapatkan bantuan proyek P2MPD dipilih oleh Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) berdasarkan kriteria di atas. Tidak terlalu sulit untuk menentukan desa berdasarkan 3 (tiga) kriteria awal. Tetapi untuk kriteria masyarakat bersedia aktif dalam tiap pembangunan, agak sulit untuk dilihat sejauh mana kesediaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata sebelum program itu berjalan. Untuk itu perlu diketahui karakteristik desa yang bagaimana yang tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi. Sehingga tingkat partisipasi masyarakat suatu desa bisa diperkirakan sebelum proyek berjalan.

Dalam *Final Report* Konsultan Manajemen Daerah (KMD), dilaporkan bahwa masih terdapat kendala-kendala dalam mewujudkan tujuan dari Paket A proyek P2MPD ini, yaitu memberdayakan masyarakat kelurahan/ desa untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah. Salah satu kendala tersebut adalah kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan mereka dirasakan kurang.

Dilihat dari tingkat penghasilan masyarakatnya yang relatif lebih tinggi, seharusnya masyarakat di daerah desa-kota mampu memberikan partisipasi dalam bentuk sumbangan uang atau barang lebih besar dibandingkan masyarakat desa. Tetapi kenyataannya, bila dilihat dari nilai lebih pekerjaannya (*over prestasi*) atau biasa disebut juga *swadaya*, masyarakat desa justru memberikan sumbangan yang lebih besar dibandingkan masyarakat desa-kota. Meskipun mereka tidak bisa menyumbangkan dalam bentuk materi, akan tetapi mereka menyumbang dengan kemampuan tenaga yang sangat luar biasa. Sebagai contoh, di Desa Padakembang, mampu membelah bukit sepanjang 4.500 m (4,5 Km) menjadi jalan baru (jalan tembus). Mereka bergotong-royong mengambil batu dari sungai dan kemudian memecahkan batu-batu tersebut dan diangkut ke lokasi proyek. Setelah dihitung nilai pekerjaan mereka menjadi dua kali lipat (200%) dari nilai *Pagu* yang mereka terima. (KMD, 2003; VI-23).

Sebaliknya di beberapa desa yang merupakan ibukota kecamatan yang bisa dikategorikan desa-kota tingkat *sawadaya* masyarakatnya justru rendah bahkan tidak ada (0%), seperti di Desa Rajapolah Kecamatan Rajapolah (10%), Desa Sariwangi Kecamatan Sariwangi (0%) serta Desa Cibalong Kecamatan Cibalong (0%).

Kabupaten Tasikmalaya pertama kali mendapatkan bantuan Proyek P2MPD pada tahun 2000 dan berlanjut sampai dengan tahun 2003 yang saat ini masih dalam persiapan. Menurut laporan KMD, dibanding dengan pelaksanaan P2MPD tahun 2000 dan 2001,

pelaksanaan Proyek P2MPD tahun 2002 tingkat swadaya masyarakat relatif menurun dengan faktor penyebab yang belum diketahui. Kalau pada Proyek tahun 2000 dan 2001 tingkat swadaya masyarakat rata-rata 60%, maka pada pelaksanaan tahun ini kurang lebih hanya 40%. (KMD, 2003; VII-7)

Kecamatan Cisayong merupakan perbatasan sebelah Barat antara Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya. Dalam Proyek P2MPD tahun 2002 ini, 7 (tujuh) desa Kecamatan Cisayong mendapatkan bantuan, terbanyak dibanding kecamatan lain. Desa Cisayong yang menjadi ibukota kecamatan berjarak \pm 12 km Kota Tasikmalaya, merupakan suatu pusat pertumbuhan (*growth centre*). Sedangkan 6 (enam) desa lainnya mempunyai jarak yang bervariasi ke Desa Cisayong.

Untuk efektifitas dan efisiensi partisipasi masyarakat pada proyek P2MPD di masa yang akan datang, perlu dilakukan penelitian bagaimana perbedaan partisipasi masyarakat desa dengan kota. Tingkat sentralitas digunakan untuk melihat semakin 'kota' atau semakin 'desa' masyarakat suatu daerah.

1.2. Rumusan Permasalahan

Partisipasi masyarakat yang meningkat dibutuhkan dalam pembangunan agar pembangunan dapat memberikan hasil yang seluas-luasnya dan seoptimalnya. Upaya peningkatan peran serta masyarakat itu perlu dibarengi pula dengan efisiensi dan produktivitasnya. (Ginanjar, 1997; 423)

Secara teoritis, dilihat dari perilaku gotong royong masyarakat desa, tingkat partisipasi masyarakat desa akan lebih tinggi daripada masyarakat kota yang cenderung individualis. Padahal dilihat dari tingkat penghasilannya, masyarakat desa lebih rendah daripada masyarakat kota.

Menurunnya tingkat swadaya masyarakat dalam Proyek P2MPD tahun 2002 di Kabupaten Tasikmalaya perlu dicari faktor penyebabnya. Selain faktor individu pelaku, belum adanya kriteria pemilihan yang bisa menunjukkan desa yang masyarakatnya memiliki kesediaan untuk berpartisipasi sebelum program dilaksanakan.

Dari uraian latar belakang tersebut di atas maka yang pertanyaan penelitian (*research question*) adalah

1. Bagaimana bentuk dan tingkat peran serta antara masyarakat pada Proyek P2MPD tahun 2002 di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran serta masyarakat pada Proyek P2MPD tahun 2002 di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana hubungan sentralitas dengan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta hubungannya dengan tingkat swadaya masyarakat pada Proyek P2MPD Tahun 2002 di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya?

1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1. Tujuan

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji:

1. Bentuk dan tingkat peran serta masyarakat pada Proyek P2MPD Tahun 2002 di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan tingkat peran serta partisipasi masyarakat pada Proyek P2MPD Tahun 2002 di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya
3. Hubungan sentralitas dengan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Cisayong serta kaitannya dengan tingkat swadaya masyarakat pada Proyek P2MPD Tahun 2002 di Kabupaten Tasikmalaya.

1.3.2. Sasaran

Dari tujuan penelitian tersebut, maka sasaran-sasaran studi yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Mengklasifikasikan desa-desa sesuai dengan faktor sentralitas
- 2) Melihat bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat
- 3) Melihat hubungan sentralitas dengan bentuk dan peran serta masyarakat
- 4) Menilai hubungan bentuk dan peran serta masyarakat terhadap tingkat swadaya masyarakat

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1. Ruang Lingkup Substansi

Substansi penelitian dibatasi pada pengaruh faktor sentralitas terhadap partisipasi masyarakat dalam Proyek P2MPD (Paket A) Tahun 2002 di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya. Partisipasi masyarakat meliputi bentuk dan tingkat dan hubungannya dengan tingkat swadaya masyarakat. Paket A dipilih karena melibatkan masyarakat secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan

Tingkat swadaya masyarakat adalah nilai kelebihan biaya pekerjaan dibandingkan dengan nilai yang telah ditetapkan dalam pagu.

1.4.2. Ruang Lingkup Lokasi

Lokasi penelitian dibatasi di 7 (tujuh) desa yang terletak di Kecamatan Cisayong yang mendapat bantuan Proyek P2MPD Paket A di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2002

yaitu Desa Cisayong, Desa Santanamekar, Desa Jatihurip, Desa Purwasari, Desa Sukaraharja, Desa Cikadu dan Desa Sukasetia.

Kecamatan Cisayong dipilih karena mempunyai desa-desa yang mendapatkan bantuan Proyek P2MPD yang lengkap bila dilihat dari faktor sentralitasnya. Desa Cisayong yang menjadi ibukota kecamatan berjarak \pm 12 km Kota Tasikmalaya, merupakan suatu pusat pertumbuhan (*growth centre*). Sedangkan enam desa lainnya mempunyai jarak yang bervariasi ke Desa Cisayong. Selain itu dalam Proyek P2MPD Paket A tahun 2002, tujuh desa di Kecamatan Cisayong mendapatkan bantuan, terbanyak dibanding kecamatan lain.

1.5. Kerangka Pemikiran

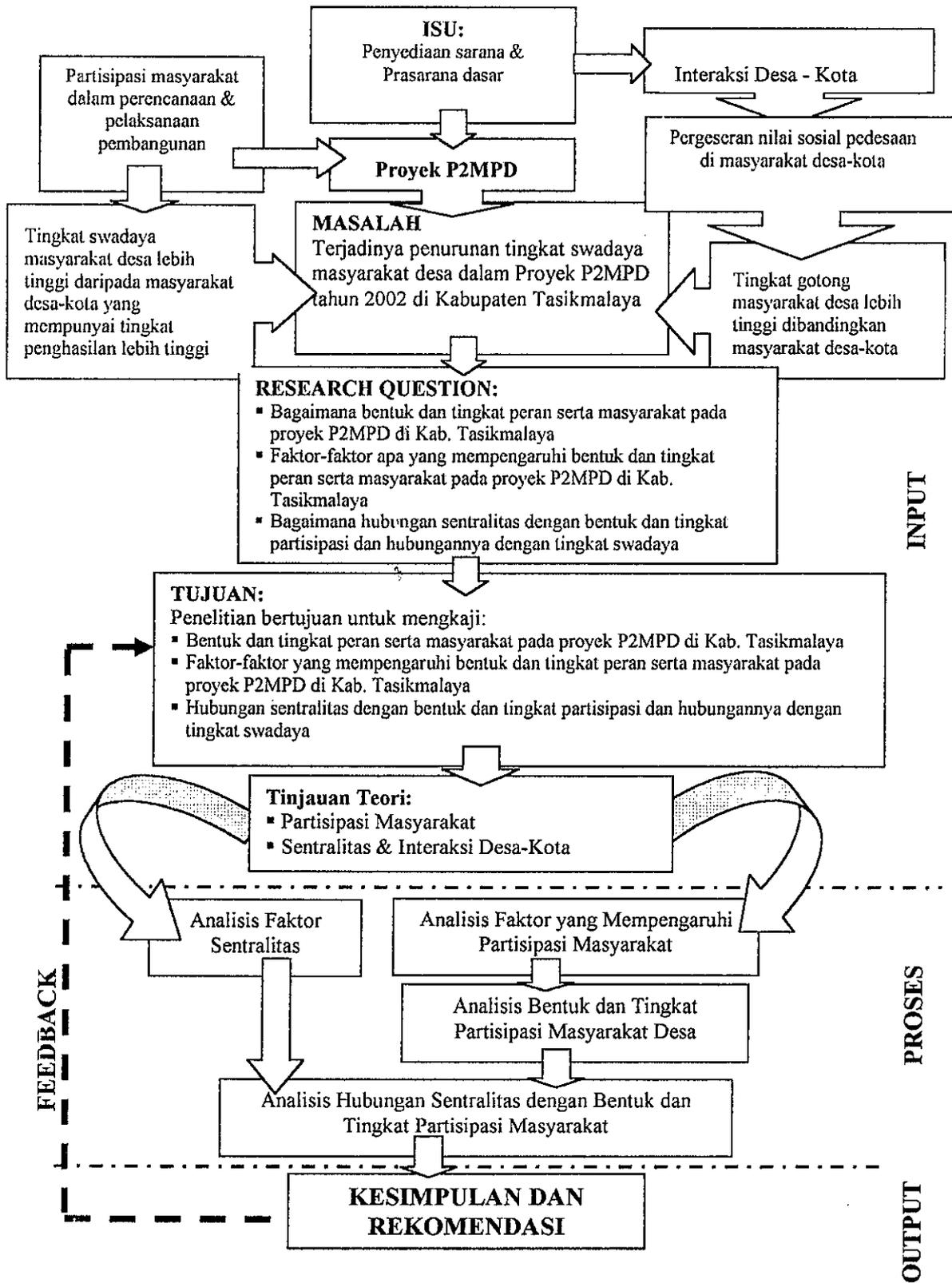
Pemerintah Pusat memberikan bantuan Proyek P2MPD kepada Pemerintah Daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana dasar. Sesuai paradigma baru dalam perencanaan, proyek ini melibatkan masyarakat di dalamnya. Peran baru pemerintah sebagai fasilitator '*enabler*', menuntut partisipasi masyarakat yang lebih tinggi.

Secara teoritis penghasilan masyarakat berpengaruh terhadap tingginya tingkat partisipasi, namun kenyataan di lapangan tidak demikian. Masyarakat desa justru lebih tinggi partisipasinya dibandingkan dengan masyarakat di desa-kota, bila dilihat dari kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta hubungan sentralitas dengan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakatnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka perlu diperlukan kajian mengenai interaksi dan kajian sosial-ekonomi masyarakat. Kajian tersebut dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi

bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta sentralitas desa atau daerahnya. Setelah kedua kajian tersebut, kemudian dikaji mengenai hubungan sentralitas dengan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakatnya.

Diharapkan pada bagian akhir diketahui hubungan sentralitas dengan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dan di daerah mana yang paling tinggi tingkat partisipasinya, sehingga dapat menjadi rekomendasi bagi efektivitas dan produktivitas proyek-proyek sejenis di masa yang akan datang.



GAMBAR 1.1.
KERANGKA PEMIKIRAN STUDI

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan proposal penelitian yang berjudul “**Hubungan sentralitas dengan sentralitas dengan Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Proyek P2MPD di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya**” ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang perlunya dilakukan studi menyangkut hubungan sentralitas dengan sentralitas dengan bentuk dan partisipasi masyarakat serta hubungannya dengan tingkat swadaya masyarakat dalam Proyek P2MPD di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2002; rumusan masalah, tujuan, sasaran, ruang lingkup substansi dan spasial, serta kerangka pemikiran dalam studi.

Bab II Kajian Literatur

Pada bab ini dikemukakan teori-teori serta referensi lainnya yang mendukung pelaksanaan studi dan dapat menjawab secara teoritis permasalahan yang diangkat meliputi teori-teori mengenai partisipasi masyarakat dan teori-teori mengenai sentralitas serta sosial ekonomi masyarakat desa dan kota.

Bab III Metode Penelitian

Dalam Bab ini dikemukakan pendekatan dan metode-metode yang digunakan dalam studi, baik metode pengumpulan data, maupun metode analisis sesuai dengan tema studi yang diangkat.

Bab IV Gambaran Umum Wilayah Studi

Bab ini menggambarkan kondisi secara umum wilayah studi mengenai Proyek P2MPD serta Kabupaten Tasikmalaya secara umum dan Kecamatan Cisayong secara khusus dari aspek fisik dan geografis, sosial kependudukan, maupun ekonomi.

Bab V Analisa Hubungan Sentralitas dengan Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Proyek P2MPD di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya

Bab ini berisi analisa sentralitas tujuh desa di Kecamatan Cisayong yang termasuk dalam lingkup penelitian serta dan analisa peran serta masyarakat tiap kelompok desa beradasakan hirarki sentralitas desa serta diakhiri dengan analisa peran serta masyarakat di ketujuh desa tersebut secara keseluruhan. Masing-masing analisa tersebut mengkaji bentuk peran serta, tingkat peran serta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bab VI Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN SENTRALITAS DESA-KOTA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

2.1. Faktor Sentralitas dan Interaksi Desa-Kota

2.1.1. Sosial Ekonomi Masyarakat Desa

Secara sosiologi masyarakat (*community*) dibagi atas jenis *rural* (jika anggota masyarakatnya berjumlah relatif sedikit dan bermatapencarian agraris) dan jenis *urban* (jika jumlah warganya relatif banyak dan bermatapencarian utama perdagangan dan industri). Karena dianggap kurang memuaskan ada perincian lain yaitu jenis *community rural*, *fringe* (pinggiran), *town* dan *metropolis*. Meskipun bersifat ideal, tetapi klasifikasi tersebut dipakai sebagai alat menganalisa. (Daldjoeni, 1985;10)

Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Perpaduan tersebut tertuang dalam kenampakannya di permukaan bumi, yang tidak lain berasal dari komponen-komponen fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi. Kecirian fisik ditandai oleh permukiman yang tidak padat, sarana transportasi yang masih langka, penggunaan tanah persawahan, khususnya untuk wilayah pedesaan di negara-negara yang sedang berkembang di kawasan Asia. Kecirian lain berupa unsur-unsur sosial pembentuk desa, yaitu penduduk dan tata kehidupan. Ikatan tali kekeluargaan di desa sangat erat, dimana *gemeinschaft* dengan perilaku gotong royong masyarakat menjadi dominan. (Bintarto, 1998; 59)

Desa adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah

tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.5 Tahun 1974 tentang pemerintahan Dalam Negeri).

Secara hukum desa adalah suatu kesatuan hukum yang memiliki batas hukum yang jelas dalam wilayah hukum tertentu yang memiliki masyarakat di dalamnya yang berkuasa melakukan pemerintahan sendiri sebagai satu kesatuan administratif, secara ekonomi merupakan wilayah dengan ciri kegiatan agraris yang mendominasi kehidupan masyarakat akibat potensi sumber daya yang dimilikinya. Sedangkan di bidang sosial, desa merupakan wilayah dengan ciri kehidupan sosial dan hubungan kekeluargaan yang sangat erat dan masih sangat terpaku pada adat istiadat. Secara demografis desa adalah wilayah dengan penduduk sekitar 2500 jiwa. (Landis dan Sanderson dalam Samsul Ma'rif, 2001 ; 8-9)

Menurut Koentjaraningrat (Sajogyo, 1995; 24-32), ciri-ciri kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia antara lain:

- Kegiatan bekerja
- Sistem tolong menolong
- Konflik dan persaingan
- Jiwa gotong royong
- Jiwa musyawarah

Kondisi sosial masyarakat desa ditandai oleh adanya diferensiasi sosial yang dipengaruhi homogenitas kelompok masyarakat yang ada dan perbedaan struktur sosial masyarakat masyarakat. Karakteristik ini sangat berbeda dalam tiap kelompok masyarakat. Pada dasarnya setiap wilayah pedesaan adalah wilayah yang homogen dalam pekerjaan, bahasa, adat istiadat dan aspek lainnya. Kondisi ini menciptakan adanya ikatan sosial yang erat dalam kehidupan masyarakat desa baik antar penduduk maupun penduduk dengan

desanya. Interaksi antar penduduk bersifat statis dan sederhana dengan tingkat solidaritas yang sangat tinggi. Hal tersebut mempengaruhi tingkat mobilitas masyarakat desa yang sebenarnya sangat rendah. Selain itu, dalam wilayah desa dikenal adanya kelompok masyarakat/ stratifikasi yang menentukan perbedaan tingkat kehidupan sosial. Salah satu ciri sosial masyarakat desa adalah adanya kontrol sosial yang berupa norma-norma dan nilai yang sangat berpengaruh dan mengikat semua masyarakat desa yang dilengkapi dengan sanksi yang jelas, yang telah disepakati bersama dengan tujuan mendisiplinkan dan mengatur masyarakat desa sehingga menghindari penyimpangan terhadap nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat desa. (Ma'rif, 2001;11)

2.1.2. Sosial Ekonomi Masyarakat Kota

Kota disebutkan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang memiliki kecurian sosial seperti jumlah penduduk yang tinggi, strata sosial-ekonomi yang heterogen dengan corak materialistis. Berbeda dengan desa, kota memiliki kondisi fisik yang relatif lebih modern, seperti kondisi sarana dan prasarana jaringan transportasi yang kompleks, sektor pelayanan dan industri yang lebih dominan. (Bintarto, 1987; 36)

Pendapat yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Gideon dan Sjomberg (Hadi; 2003; 53) bahwa "*Kota adalah suatu masyarakat dengan ukuran dan kepadatan tertentu, yang merupakan tempat bermukim dari bermacam-macam orang yaitu bukan petani, termasuk didalamnya kaum elite yang tergolong melek huruf (golongan intelegensia kuno seperti pujangga, sastrawan dan ahli-ahli keagamaan). Timbulnya golongan inilah yang disebutnya sebagai titik mula dari gejala kota... ..*"

Pendapat lain dikemukakan oleh Jane Jacobs (1966) kota (*city*) adalah suatu '*settlement*' yang secara terus menerus membuat pertumbuhan ekonomi dari keadaan

ekonomi miliknya sendiri. Dia membedakan antara kota besar (*city*) dengan kota kecil (*town*) bukan dari besar kecilnya, tetapi town adalah suatu permukiman yang tidak membuat pertumbuhan dari ekonomi setempat yang miliknya sendiri. Sedangkan istilah 'Urban' adalah yang menyangkut kota besar (*city*) saja tetapi tidak menyangkut kota kecil (*town*). Sedangkan desa (*village*) adalah bentuk settlement yang lebih kecil lagi dari town atau disebutnya sebagai ' *a smaller town*'. (Hadi; 2003; 54)

Dari sudut pandang sosiologi, Hans Dieter Evers (1985; 10) berpendapat bahwa sebuah kota adalah suatu pemusatan penduduk di dalam wilayah yang sempit. Sedangkan menurut Wirth (N. Djaljoeni; 1997, 24) definisi kota adalah sebuah permukiman yg relatif besar, padat dan permanen serta dihuni oleh orang yang amat beragam kedudukan sosialnya. Oleh karena itu hubungan sosial masyarakatnya menjadi longgar, acuh tak acuh dan tidak pribadi (*impersonal relation*). Perasaan sosial atau sikap tinggi dari sesama warga kota dapat merugikan "sense of belonging" atau rasa kesatuan dan persatuan.

Menurut Bintarto (1983; 45-46), kota mempunyai ciri sosial sebagai berikut:

- Pelapisan sosial
- Individualisme
- Toleransi sosial
- Jarak sosial
- Penilaian sosial

Ditinjau dari segi solidaritas masyarakat kota disebut juga sebagai kelompok sekunder dan *Gessellschaft*. Pada kelompok sekunder di kota, kontak sosialnya impersonal, segmental dan utilitar (berdasarkan manfaat). Orang memandang sesamanya bukan sebagai pribadi tetapi sebagai pemegang peranan tertentu (fungsional). Yang penting bukanlah sifat dan kemampuan yang utuh; orang cukup mengenal sesamanya secara segmental saja dan berdasarkan kepentingan. Sebab itu mereka yang sepekerjaan, senasib, sehoobi, sepelapisan sosial bersatu dalam satu kelompok atau perkumpulan. Relasi dalam *Gessellschaft* bersifat

impersonal, formal (contractual), utilitarian, realistic dan specialized. (Daldjoeni, 1985; 44-46)

Dari sisi ekonomi, masyarakat kota hidup bergerak di bidang non-agraris; kota fungsi khasnya lebih kultural, industri, perdagangan. Dari itu semua yang nyata-nyata menonjol adalah ekonomi perniagaan. Adanya pasar dengan keramaian perniagaan mencirikan kota. (Bintarto, 1997; 42)

Fungsi kota di Indonesia meliputi empat fungsi dasar, yaitu: sebagai wahana pelayanan daerah belakang, pusat perkembangan antar daerah, tempat industri pengolahan dan sub pusat permukiman. Kebanyakan kota merupakan campuran dari tiga fungsi yang disebut pertama. (Budihardjo, 1997; 65)

2.1.3. Interaksi Desa Kota

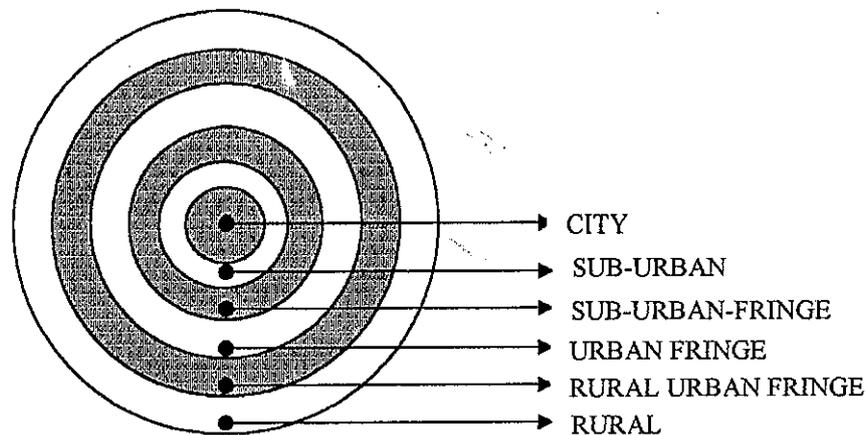
Dengan adanya kemajuan-kemajuan di bidang perhubungan dan lalu lintas antar daerah, maka sifat isolasi desa berangsur-angsur berkurang. Desa-desanya yang dekat dengan kota telah banyak mendapat pengaruh kota, sehingga persentase penduduk desa yang bertani berkurang dan menceburkan diri dengan pekerjaan non-agraris. Daerah-daerah pedesaan di perbatasan kota yang dipengaruhi oleh tata kehidupan kota disebut dengan "*rur-ban areas*", singkatan dari *rural-urban areas*. Interaksi ini dapat dilihat sebagai suatu proses sosial, proses ekonomi, proses budaya ataupun proses politik dan sejenisnya yang lambat ataupun cepat dapat menimbulkan suatu realita atau kenyataan. (Bintarto, 1987; 61)

Di sekitar kota timbul suatu kawasan pinggiran (*Suburban*) yang secara sekilas jika dilihat dari kenampakan fisik rumah dan prasarananya, justru menunjukkan bahwa penghuninya adalah orang-orang berstatus sosial ekonomi menengah ke atas. Para pegawai dan pendatang dari golongan partikelir yang sukses banyak memilih kediaman yang berada

di luar atau bahkan jauh dari pusat kota. Untuk melihat kaitan ini seorang geografer Indonesia, Hadi Sabari Yunus, menyatakan bahwa suatu kota selalu mengalami perkembangan yang menyangkut *aspek fisik (kenampakan fisik kota), sosial, budaya, politik, teknologi dan ekonomi.* (Hadi, 2003; 56)

Daerah yang mengalami pengaruh sangat kuat dari suatu kota diilustrasikan oleh Bar-Gal (1987) (dalam Bintarto, 1983; 66) sebagai suatu daerah *urban fringe*. Daerah ini ditandai oleh berbagai karakteristik, seperti peningkatan harga tanah yang drastis, perubahan fisik penggunaan tanah, perubahan komposisi penduduk dan tenaga kerja, serta berbagai aspek sosial lainnya.

Sebagai wujud dari interaksi desa-kota, maka dapat timbul zone-zone kota-desa seperti dalam skema berikut ini:



GAMBAR 2.1
ZONE-ZONE DESA-KOTA

Sumber: Koestoer (1997;8)

- 1) *City* diidentikkan dengan kota
- 2) Suburban atau *faubourgh* adalah suatu area yang lokasinya dekat pada pusat kota atau inti kota dengan luas yang mencakup daerah penglaju atau commuter (sub daerah perkotaan)

- 3) Suburban *fringe* adalah daerah yang melingkari suburban dan merupakan daerah peralihan antara kota dan desa.
- 4) Urban *fringe* adalah semua daerah batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat mirip kota, kecuali inti kota. (Jalur tepi subdaerah perkotaan paling luar).
- 5) Rural-urban *fringe* adalah suatu jalur daerah yang terletak antara daerah kota dan desa yang ditandai dengan penggunaan tanah campuran. (Jalur batas desa-kota).

Gambaran tersebut di atas merupakan suatu gambaran ideal. Dalam kenyataannya jalur-jalur itu tidak lagi bersifat konsentris, walaupun unsur-unsurnya masih dapat diamati.

Russwurm (dalam Koestoer, 1997; 4-5) menyatakan bahwa daerah pinggiran wilayah perkotaan memiliki konotasi yang luas. Secara keruangan dalam batasan jarak fisik, wilayah ini mencakup radius sekitar 50 kilometer pada suatu kota. Namun cakupan wilayah ini pun dibedakan dalam beberapa tahapan. Pertama, wilayah bagian “dalam” (*inner fringe*) yang mencakup daerah beradius sekitar 10-15 km dimana masih tampak batas-batas perluasan fisik suatu kota. Kedua, wilayah bagian “luar kota” (*outer fringe*), yang mencakup daerah perluasan antara 25-50 km dan berakhir pada suatu daerah bayangan kota dimana pengaruh kota realtif sudah berkurang.

2.1.4. Teori Tempat Pusat (*Central Place Theory*)

Teori tempat pusat (*central place theory*) pertama kali dikembangkan oleh Walter Christaller untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan utama yaitu apakah yang menentukan banyak, luas dan persebaran kota. Kota-kota yang tersebar di daerah yang diasumsikan oleh Christaller disebut “*central place*”, yaitu suatu kota menyajikan barang dan jasa untuk wilayah sekitar dengan membentuk suatu hirarki. Dalam teori ini terdapat dua konsep penting yaitu ‘*range*’ dan ‘*threshold*’. *Range* merupakan jarak terjauh yang harus ditempuh

orang untuk membeli barang di pusat tertentu. Sedangkan *threshold* merupakan wilayah yang dihuni jumlah minimum orang yang diperlukan agar barang memberikan keuntungan.

Christaller menyatakan bahwa sentralisasi atau kristalisasi suatu bahan yang mengelilingi suatu pusat (inti) adalah asas keteraturan yang penting dan ini juga diterapkan dalam kota atau suatu tempat pusat merupakan pusat dari wilayah sekitarnya. Christaller juga berpendapat bahwa prinsip sentralitas yang ada pada struktur atom berlaku pula pada kehidupan sosial ekonomi manusia. Karena itu fungsi utama suatu kota adalah sebagai pusat (*central place*) bagi suatu wilayah (disebut *hinterland*). (Bintarto, 1998; 153-165)

Menurut Christaller, (dalam Hadi,2003;51) *kota tidak dipandang sebagai tempat permukiman, tetapi sebagai tempat pelayanan. Hal ini merupakan aspek terpenting yang menjadi dasar dari teori tempat central (central place theory)*. Semakin banyak pelayanan suatu kota terhadap kawasan sekitarnya, semakin tinggi sentralitas kota tersebut. Berdasarkan teori tempat sentral inilah maka kota tersusun dalam hirarki besar kecilnya kota yang berbeda-beda jenisnya.

Sentralitas suatu daerah diukur melalui sejauh mana daerah bersangkutan merupakan pusat-pusat dari suatu pertumbuhan (*growth centre*) dari daerah lain atau sejauh mana daerah bersangkutan memiliki daya jangkau terhadap pusat-pusat pertumbuhan yang ada. (Slamet, 1993; 115).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sentralitas bisa dianalogikan sebagai suatu keterkaitan antara kota sebagai pusat serta desa dan desakota sebagai *hinterland*-nya, baik secara fisik maupun non-fisik (sosial, ekonomi maupun budaya).

2.2. Partisipasi Masyarakat

2.2.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut FAO, dari berbagai kajian, dokumen proyek dan buku panduan menunjukkan tafsiran yang sangat beragam mengenai arti kata partisipasi: (Mikkelsen,2003; 64)

- Partisipasi adalah 'pemekaan' (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- Partisipasi adalah suatu proses aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Selain itu ada beberapa definisi partisipasi masyarakat antara lain (dalam Dwi Rahardjo,1998;40):

- a) Partisipasi masyarakat diartikan sebagai peran aktif berkontribusi dan mempengaruhi proses pembangunan, yang secara merata dan bersama-sama mengambil manfaat dari pembangunan tersebut. (United Nation).
- b) Partisipasi masyarakat dapat dipandang sebagai agen atau wakil dari tindakan-tindakan atau program yang dijalankan oleh pemerintah sebagai salah satu hal yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan penerapan kebijaksanaan. (Richard Batley).
- c) Partisipasi adalah suatu tindakan yang mendasar untuk bekerjasama yang memerlukan waktu dan usaha, agar menjadi mantap dan hanya berhasil baik dan terus maju, apabila ada kepercayaan bersama. (Korten).

2.2.2. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Keterbatasan pemerintah dalam membiayai pembangunan memerlukan partisipasi aktif masyarakat, sehingga terdapat jaminan keberlangsungan proyek yang telah dibangun. Dalam konteks peran baru yang dimainkan oleh pemerintah adalah sebagai fasilitator 'enabler' dan bukan sebagai penyedia seluruh dana dan pelayanan (Osborne dan Gaebler, 1996;58-61). Pemerintah tidak harus selalu melakukan suatu pekerjaan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam rangka keberlangsungan fasilitas-fasilitas publik yang telah dibangun oleh pemerintah. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk menjaga keberlangsungan fasilitas publik menjadi bertambah penting, karena (Rukmana, 1993;214):

1. Memberikan kontribusi pada upaya pemanfaatan sebaik-baiknya sumber dana yang terbatas.
2. Partisipasi masyarakat membuka kemungkinan keputusan yang diambil didasarkan pada kebutuhan, prioritas dan kemampuan masyarakat.
3. Partisipasi masyarakat menjamin penerimaan dan apresiasi yang lebih besar terhadap segala sesuatu yang dibangun. Hal ini akan merangsang pemeliharaan yang baik dan bahkan akan menimbulkan kebanggaan.

Menurut Conyers (1994;154-156) partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting, karena:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya.
3. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

2.2.3. Bentuk dan Tingkat Partisipasi

Partisipasi masyarakat biasanya diwujudkan dalam bentuk pemikiran, keahlian/keterampilan, tenaga, harta benda dan uang. Keith Davis (Sastropetro,1988:16) menyebutkan bahwa bentuk peran serta terdiri dari :

- a. konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa
- b. sumbangan spontan berupa uang dan barang
- c. mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya dari pihak ketiga
- d. mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh masyarakat sendiri
- e. sumbangan dalam bentuk kerja
- f. aksi massa
- g. mengadakan pembangunan di kalangan keluarga
- h. membangun proyek masyarakat yang bersifat otonomi

Surbakti (1984; 72-73) mengemukakan bahwa bentuk-bentuk kegiatan yang dapat digolongkan sebagai partisipasi adalah:

- Ikut mengajukan usul-usul mengenai suatu kegiatan
- Ikut serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan tentang alternatif program yang dianggap paling baik
- Ikut serta melaksanakan apa yang telah diputuskan termasuk di sini memberi iuran atau sumbangan materil.
- Ikut serta mengawasi pelaksanaan keputusan

Oleh Dusseldorp, peran serta masyarakat diklasifikasikan dalam beberapa tipe. Klasifikasi tersebut didasarkan pada sembilan hal dimana masing-masing dasar jarang terpisah satu sama lain, artinya dalam banyak hal mengidentifikasi suatu kegiatan peran serta yang sama. (Slamet;1992:10-21)

- a. Penggolongan peran serta berdasarkan pada derajat kesukarelaan
- b. Penggolongan peran serta berdasarkan cara keterlibatan.
- c. Penggolongan peran serta berdasarkan pada kelengkapan keterlibatan berbagai tahap dalam proses pembangunan.
- d. Penggolongan peran serta berdasarkan pada tingkatan organisasi
- e. Penggolongan peran serta berdasarkan pada intensitas dan frekuensi kegiatan
- f. Penggolongan peran serta berdasarkan pada lingkup liputan kegiatan.
- g. Penggolongan peran serta berdasarkan pada efektifitas
- h. Penggolongan peran serta berdasarkan pada siapa yang terlibat
- i. Penggolongan peran serta berdasarkan pada gaya peran serta

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya terdapat tingkatan-tingkatan tertentu (Wiswakharman, 1995; 21). Tingkatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi Inisiasi
Partisipasi ini merupakan tingkatan tertinggi. Masyarakat dalam tingkatan partisipasi ini dapat menentukan dan mengusulkan segala sesuatu rencana yang akan dilaksanakan dan benar-benar merupakan inisiatif murni mereka. Peran masyarakat disini adalah sebagai subyek kegiatan (pembangunan).
2. Partisipasi Legitimasi
Partisipasi pada tingkat pembicaraan atau perundingan kesepakatan pada suatu proses pembangunan. Peran masyarakat pada tingkat ini cukup besar, yaitu masyarakat dapat memberikan usulan dan turut aktif dalam pembicaraan dan musyawarah dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Partisipasi Eksekusi
Partisipasi dalam tingkat pelaksanaan kegiatan dan mereka tidak mulai dari awal (pada tahap perencanaan) dan tidak turut mengambil/ menentukan keputusan.

Menurut Arstein (dalam Sihono, 2003; 29-31) tingkat peran serta masyarakat atau derajat keterlibatan masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah digolongkan menjadi delapan tipologi tingkat peran serta masyarakat. Secara garis besar tipologi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Manipulation atau manipulasi

Tingkat peran serta ini adalah yang paling rendah dimana masyarakat hanya dipakai namanya sebagai anggota dalam berbagai badan penasihat advising board. Dalam hal ini tidak ada peran serta masyarakat yang sebenarnya dan tulus, tetapi diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi dari pihak penguasa.

b. Therapy atau penyembuhan

Dengan berkedok melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, para perancang memperlakukan anggota masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi. Meskipun masyarakat terlibat dalam banyak kegiatan, pada kenyataannya

kegiatan tersebut lebih banyak untuk mengubah pola pikir masyarakat yang bersangkutan daripada mendapatkan masukan dari mereka.

c. Informing atau pemberian informasi

Memberi informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggung jawab dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan peran serta masyarakat. Meskipun demikian yang sering terjadi penekanannya lebih pada pemberian informasi satu arah dari pihak pemegang kuasa kepada masyarakat. Tanpa adanya kemungkinan untuk memberikan umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Dalam situasi saat itu terutama informasi diberikan pada akhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana.

d. Consultation atau konsultasi

Mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka, dapat merupakan langkah penting dalam menuju peran serta penuh dari masyarakat. Akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang sering dipergunakan adalah survei tentang arah pikir masyarakat, pertemuan lingkungan masyarakat dan dengar pendapat dengan masyarakat.

e. Placation atau perujukan

Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat yang dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan-badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat yang anggota-anggota lainnya wakil-wakil dari berbagai instansi pemerintah. Walaupun

usul dari masyarakat diperhatikan namun suara masyarakat itu sering kali tidak didengar karena kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit dibanding anggota dari instansi pemerintah.

f. Partnership atau kemitraan

Pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai masalah yang dihadapi.

g. Delegated power atau pelimpahan kekuasaan

Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana atau program tertentu. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul, pemilik kekuasaan yang dalam hal ini adalah pemerintah harus mengadakan tawar-menawar dengan masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari atas.

h. Citizen control atau masyarakat yang mengontrol

Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Dalam hal ini usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman dana, tanpa melewati pihak ketiga.

Dari ke delapan tipologi tersebut, menurut Arnstein secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu sebagai berikut :

- a. Tidak ada peran serta atau non participation yang meliputi manipulation dan therapy.

- b. Peran serta masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan atau *degrees of tokenism* yang meliputi *informing*, *consultation* dan *placation*.
- c. Peran serta masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan atau *degrees of citizen power* yang meliputi *partnership*, *delegated power* dan *citizen control*.

8	CITIZEN CONTROL	DEGREES OF CITIZEN POWER
7	DELEGATED POWER	
6	PARTNERSHIP	
5	PLACATION	DEGREES OF TOKENISM
4	CONSULTATION	
3	INFORMING	
2	THERAPY	NON PARTICIPATION
1	MANIPULATION	

GAMBAR 2.2.
TIPOLOGI TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT DARI ARSTEIN

Sumber : Panudju dalam Sihono, 2003

Pengukuran tingkat peran serta dapat dilakukan secara kuantitatif dengan memberi skala nilai/bobot tingkat peran serta individu atau keterlibatan individu dalam kegiatan bersama (dalam Slamet, 1994:82-89). Chapin mengungkapkan bahwa skala peran serta dapat diperoleh dari penilaian-penilaian terhadap kriteria-kriteria tingkat peran serta sosial yaitu :

TABEL II.1.
SKALA PARTISIPASI MENURUT CHAPIN

Derajat Keterlibatan	Bobot/ Nilai
Keanggotaan dalam lembaga	1
Kehadiran dalam pertemuan	2
Memberikan sumbangan	3
Keanggotaan di dalam kepengurusan	4
Kedudukan anggota di dalam kepengurusan	5

Sumber: Slamet, 1994, diolah 2003

Skala Chapin tersebut dianggap belum baku dan pengukuran tentang kehadirannya masih kasar, Black kemudian mengembangkan skala tersebut:

TABEL II.2.
SKALA PARTISIPASI MENURUT BLACK

Derajat Keterlibatan	Bobot/ Nilai
Keanggotaan dalam lembaga	1
Menghadiri sekitar $\frac{1}{4}$ dari pertemuan-pertemuan	2
Menghadiri sekitar separuh dari pertemuan-pertemuan	3
Menghadiri sekitar $\frac{3}{4}$ dari pertemuan-pertemuan	4
Kedudukan anggota di dalam kepengurusan	5
Menduduki suatu jabatan	6

Sumber: Slamet, 1994, diolah 2003

Sedangkan Goldhamer mengukur partisipasi dengan menggunakan lima variabel

partisipasi yaitu :

- a. Jumlah asosiasi yang dimasuki
- b. Frekuensi kehadiran
- c. Jumlah asosiasi dimana dia memangku jabatan
- d. Lamanya menjadi anggota.
- e. Tipe asosiasi yang dimasuki

Dari skala-skala peran individu yang pernah dipergunakan dalam penelitian sebelumnya, maka skala yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

TABEL II.3.
SKALA PATISIPASI DALAM PENELITIAN

Derajat Keterlibatan	Bobot/ Nilai
Frekuensi kehadiran anggota kelompok dalam pertemuan	5
Keaktifan anggota kelompok dalam berdiskusi	4
Keterlibatan anggota dalam kegiatan fisik	2
Kesediaan memberi sumbangan berbentuk uang atau material yang telah ditetapkan	1

Sumber: Slamet, 1994, diolah 2003

2.2.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

2.2.4.1. Faktor-Faktor Internal

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan karakteristik masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah (Litwin 1986):

a. Sex/ Jenis Kelamin

Partisipasi yang diberikan oleh pria dan wanita dalam pembangunan berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat yang membedakan kedudukan dan derajat antara pria dan wanita, sehingga menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban.

b. Usia

Dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan terdapat lapisan golongan antara golongan tua dan golongan muda, yang berbeda hak-hak tertentu. Misalnya dalam memberikan pendapat dan mengambil keputusan.

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-usaha partisipasi berpengaruh terhadap apa yang dapat diberikan masyarakat dalam pembangunan. Tingkat pengetahuan masyarakat ditentukan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang menentukan adalah latar belakang pendidikan masyarakat.

d. Tingkat Penghasilan

Masyarakat dengan penghasilan yang tinggi tentu dapat memberikan partisipasi dalam bentuk sumbangan uang atau material (barang) dengan nilai yang lebih besar dibandingkan yang disumbangkan oleh masyarakat dengan penghasilan yang lebih rendah.

e. Mata Pencaharian

Jenis pekerjaan seseorang menentukan tingkat penghasilan dan mempengaruhi waktu luang seseorang yang dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, misalnya menghadiri pertemuan-pertemuan.

f. Status Kepemilikan Lahan

Status lahan berkaitan dengan legalitas hukum atas lahan tersebut. Hal ini berkaitan dengan rasa aman yang diberikan karena adanya kapasitas hukum yang mempengaruhi seseorang untuk memelihara hasil-hasil pembangunan di atas tanah miliknya.

2.2.4.2. Faktor-Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi proses pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program pembangunan. Faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan sebagai *stakeholders* pada program, kecuali masyarakat sebagai pelaku utama (Sunarti, 2001; 58). Pada proyek P2MPD faktor-faktor eksternal tersebut adalah Instansi Pemerintah, Konsultan Manajemen Daerah (KMD) dan Fasilitator.

Dalam penelitian ini, faktor eksternal tersebut menjadi variabel terkendali, dimana desa-desa yang menjadi objek penelitian yang sama dianggap mendapat perlakuan yang relatif sama dari faktor-faktor eksternal tersebut.

2.2.4.3. Faktor-Faktor Keruangan

Berdasarkan karakteristik sosial masyarakat kota dan desa, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan berbeda. Partisipasi masyarakat di kota sangat rendah, semakin jauh dari pusat kota atau dengan kata lain semakin desa suatu wilayah maka semakin tinggi partisipasi masyarakatnya dalam pembangunan.

Jika dikaitkan dengan sentralitas suatu daerah, maka dapat dikatakan semakin tinggi tingkat sentralitas suatu daerah, maka semakin rendah partisipasi masyarakat daerah tersebut. Sebaliknya semakin rendah tingkat sentralitas suatu daerah maka semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat daerah tersebut.

Faktor keruangan lain selain faktor ruang kota, yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah karakteristik lingkungan permukiman meliputi kawasan, lingkungan (RT/RW), jalan, rumah dan ruangan. Semakin kecil ruang lingkungannya, maka semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakatnya. (Baross 1993; 36)

2.3. Rangkuman

Dari pembahasan teori-teori yang berkaitan mengenai hubungan sentralitas dengan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat pada proyek P2MPD di Kabupaten Tasikmalaya dapat diambil kesimpulan bahwa sentralitas suatu daerah mempunyai pengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi masyarakatnya. Berikut adalah rangkuman dari beberapa teori:

TABEL II. 4
KESIMPULAN TEORI

Sentralitas & Interaksi Desa - Kota

No.	Pendapat	Pernyataan
1	Slamet (1993)	Sentralitas suatu daerah diukur melalui bagaimana suatu daerah: - Merupakan pusat pertumbuhan dari daerah lain - Daya jangkau terhadap pusat pertumbuhan yang ada
2	Christaller Dalam Bintarto, 1998; 153-165)	suatu kota menyajikan barang dan jasa untuk wilayah sekitar dengan membentuk suatu hirarki. Dalam teori ini terdapat dua konsep penting yaitu ' <i>range</i> ' dan ' <i>threshold</i> ' - <i>Range</i> merupakan jarak terjauh yang harus ditempuh orang untuk membeli barang di pusat tertentu - <i>Threshold</i> merupakan wilayah yang dihuni jumlah minimum orang yang diperlukan agar barang memberikan keuntungan. Semakin banyak pelayanan suatu kota terhadap kawasan sekitarnya, semakin tinggi sentralitas kota tersebut. Berdasarkan teori tempat sentral inilah maka kota tersusun dalam hirarki besar kecilnya kota yang berbeda-beda jenisnya.
3	Daldjoeni (1985;10)	Secara sosiologi masyarakat (community) dibagi atas: • Rural (desa) • Fringe (pinggiran) • Town • Metropolis

4	Bintarto (1998: 59)	Kecirian fisik desa ditandai oleh permukiman yang tidak padat, sarana transportasi yang masih langka, penggunaan tanah persawahan, khususnya untuk wilayah pedesaan di negara-negara yang sedang berkembang di kawasan Asia. Kecirian lain berupa unsur-unsur sosial pembentuk desa, yaitu penduduk dan tata kehidupan. Ikatan tali kekeluargaan di desa sangat erat, dimana <i>gemeinschaft</i> dengan perilaku gotong royong masyarakat menjadi dominan.
5	Koentjaraningrat dalam Sajogyo (1995;24-32)	Ciri-ciri kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan bekerja • Sistem tolong menolong • Konflik dan persaingan • Jiwa gotong royong • Jiwa musyawarah
6	Bintarto (1987; 36)	<ul style="list-style-type: none"> • Kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang memiliki kecurian sosial seperti jumlah penduduk yang tinggi, strata sosial-ekonomi yang heterogen dengan corak materialistis. • Kota memiliki kondisi fisik yang relatif lebih modern, seperti kondisi sarana dan prasarana jaringan transportasi yang kompleks, sektor pelayanan dan industri yang lebih dominan. •
7.	Wirth dalam Daldjoeni (1997;24)	kota adalah sebuah permukiman yg relatif besar, padat dan permanen serta dihuni oleh orang yang amat beragam kedudukan sosialnya. Oleh karena itu hubungan sosial masyarakatnya menjadi longgar, acuh tak acuh dan tidak pribadi (impersonal relation). Perasaan sosial atau sikap tinggi dari sesama warga kota dapat merugikan "sense of belonging" atau rasa kesatuan dan persatuan.
8	Bintarto (1987;61)	Dengan adanya kemajuan-kemajuan di bidang perhubungan dan lalu lintas antar daerah, maka desa-desa yang dekat dengan kota telah banyak mendapat pengaruh kota. Interaksi desa-kota dapat dilihat sebagai suatu proses sosial, proses ekonomi, proses budaya ataupun proses politik dan sejenisnya yang lambat ataupun cepat dapat menimbulkan suatu realita atau kenyataan

Partisipasi Masyarakat

No.	Pendapat	Pernyataan
1	Wibisana (1989: 41)	Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan sampai pengambilan keputusan
2	Osborne dan Gaebler (1996)	Keterbatasan dana pemerintah yang tersedia memerlukan partisipasi aktif masyarakat, sehingga terdapat jaminan keberlangsungan proyek yang telah dibangun. Dalam konteks peran baru yang dimainkan oleh pemerintah adalah sebagai fasilitator 'enabler' dan bukan sebagai penyedia seluruh dana dan pelayanan

3	Keith Davis dalam Sastrosapoetro (1988;16)	Bentuk peran serta terdiri dari : a. konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa b. sumbangan spontan berupa uang dan barang c. mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya dari pihak ketiga d. mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh masyarakat sendiri e. sumbangan dalam bentuk kerja f. aksi massa g. mengadakan pembangunan di kalangan keluarga h. membangun proyek masyarakat yang bersifat otonomi
4	Surbakti (1984; 72-73)	Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat digolongkan sebagai partisipasi adalah: • Ikut mengajukan usul-usul • Ikut serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan • Ikut serta melaksanakan keputusan • Ikut serta mengawasi pelaksanaan keputusan
5	Dusseldorp dalam Slamet (1992:10-21)	Tipe Peran Serta Masyarakat digolongkan berdasarkan 1. Derajat kesukarelaan 2. Cara keterlibatan. 3. Pada kelengkapan keterlibatan berbagai tahap dalam proses pembangunan. 4. Tingkatan organisasi 5. Intensitas dan frekuensi kegiatan 6. Lingkup liputan kegiatan. 7. Efektifitas 8. Siapa yang terlibat 9. Gaya peran serta
6	Wiswakharman (1995;21)	Tingkatan dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat: • Partisipasi Inisiasi • Partisipasi Legitimasi • Partisipasi Eksekusi
7	Arstein dalam Sihono (2003;29-31)	Delapan tipologi tingkat peran serta masyarakat 1. Manipulation (manipulasi) 2. Therapy (penyembuhan) 3. Informing (pemberian informasi) 4. Consultation (Konsultasi) 5. Placation (Perujukan) 6. Partnership (kemitraan) 7. Delegation Power (pelimpahan kekuasaan) 8. Citizen Control (masyarakat yang mengontrol)
8	Goldhamer dalam Slamet (1997)	Untuk mengukur partisipasi dengan menggunakan lima variabel partisipasi yaitu : a. Jumlah asosiasi yang dimasuki b. Frekuensi kehadiran c. Jumlah asosiasi dimana dia memangku jabatan d. Lamanya menjadi anggota. e. Tipe asosiasi yang dimasuki

9	Litwin (1986)	Faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Faktor-Faktor Internal <ol style="list-style-type: none"> 1. Sex/ Jenis kelamin 2. Usia 3. Tingkat Pengetahuan/ Pendidikan 4. Tingkat Penghasilan 5. Mata Pencaharian 6. Status Kepemilikan Lahan
10	Sunarti (2001)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Faktor-Faktor Eksternal <ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi Pemerintah 2. Konsultan Manajemen Daerah (KMD) 3. Fasilitator
11	Baross (1993)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Faktor-Faktor Keruangan <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor Sentralitas 2. Faktor Karakteristik Lingkungan Permukiman

Berdasarkan kajian teori di atas didapatkan beberapa variabel yang akan digunakan dalam melakukan penelitian mengenai Hubungan Sentralitas dengan Bentuk dan Tingkat Peran Serta Masyarakat Pada Proyekⁿ P2MPD di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya.

1. Variabel Sentralitas

Terdapat beberapa variabel yang menentukan tingkat sentralitas daerah-daerah dalam suatu wilayah. Variabel-variabel tersebut adalah:

- a. Jumlah dan jenis fasilitas pelayanan
- b. Aksesibilitas
- c. Kepadatan Penduduk

2. Variabel Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat

- a. Bentuk sumbangan dalam berperan serta : Pikiran, Uang, Material, Tenaga
- b. Bentuk kegiatan dalam berperan serta
 - Cara keterlibatan dalam pelaksanaan
 - Cara keterlibatan dalam pertemuan
 - Intensitas kegiatan
 - Frekuensi kegiatan
 - Derajat kesukarelaan

c. Tingkat Partisipasi Masyarakat

1. Memberi sumbangan yang ditetapkan
2. Keterlibatan dalam Kegiatan Fisik
3. Aktifitas anggota kelompok dalam diskusi
4. Frekuensi kehadiran anggota kelompok dalam pertemuan

3. Variabel Faktor-Faktor Berpengaruh

Variabel faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan karakteristik masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah

- a. Sex/ Jenis Kelamin
- b. Usia
- c. Tingkat Pengetahuan/ Pendidikan
- d. Tingkat Penghasilan
- e. Mata Pencaharian

BAB III METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan suatu kerangka pendekatan pola pemikiran dalam menyusun sebuah studi. Suatu penelitian membutuhkan pendekatan metodologi dengan tujuan untuk mengarahkan proses dalam penalaran bagi hasil-hasil yang ingin dicapai nantinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 'Hubungan Sentralitas dengan Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Proyek P2MPD di Kabupaten Tasikmalaya' ini adalah sebagai berikut:

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini lebih merupakan gabungan dari penelitian lapangan (*field research*) dan studi literatur. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan serta mendapatkan informasi-informasi dan data yang ada di lokasi penelitian. Sedangkan penelaahan pustaka (*literature study*), terutama pada awal penyusunan kerangka pemikiran dan landasan teori.

3.2. Jenis Data

Data merupakan gambaran tentang suatu keadaan, peristiwa atau persoalan yang berhubungan dengan tempat dan waktu, yang merupakan dasar suatu perencanaan dan merupakan alat bantu dalam pengambilan keputusan. Jenis-jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Sugiarto, et al,2001:16-17). Metode yang dipakai untuk

mengumpulkan data primer melalui survey (*field research*) yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan menyampaikan pertanyaan tertulis kepada responden.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Pengertian lain bahwa data sekunder merupakan data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain yang pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder biasanya digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap ataupun untuk diproses lebih lanjut (Sugiarto, et al,2001:19). Data sekunder dapat diperoleh misalnya dengan menyalin atau mengutip data dari literatur dalam bentuk yang sudah jadi.

Berdasarkan metode pendekatan yang telah diuraikan pada tahap sebelumnya, maka akan dilaksanakan survei pengumpulan data dengan survei primer dan survei sekunder. Dalam hal ini data yang akan dicari meliputi data dari lapangan dan data dari instansi-instansi terkait seperti Biro Pusat Statistik (BPS), Bappeda, Kantor Kecamatan, Pengelola Proyek dan Konsultan Manajemen Daerah (KMD). Adapun dalam upaya pengumpulan data berikut ini adalah tabulasi kebutuhan data yang akan dicari:

TABEL III.1.
KEBUTUHAN DATA

No	Kebutuhan Data	Bentuk	Jenis Data	Ket	Unit Data	Manfaat
1.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peta administrasi ▪ Peta jalan ▪ Jarak antar desa 	Peta, Tabel	Data Sekunder	-	Kabupaten Tasikmalaya	Analisis Sentralitas
2.	Jumlah Sarana dan Prasarana tiap desa	Tabel	Data Sekunder	Th.2002	Kabupaten Tasikmalaya	Analisis Sentralitas
3.	Demografi	Tabel	Data Sekunder	Th.2002	Kecamatan Cisayong	Analisis Sentralitas dan Analisis sosial ekonomi
4.	Peraturan daerah mengenai pelaksanaan pembangunan	Deskripsi	Data Sekunder	Th.2002	Kabupaten Tasikmalaya	Mengetahui komitmen pemerintah dalam peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
5.	Bentuk partisipasi masyarakat	Kuesioner	Data Sekunder	Th.2002	Kecamatan Cisayong, KMD	Analisis Bentuk partisipasi masyarakat
6.	Tingkat partisipasi masyarakat	Kuesioner	Data Primer	Th.2002	Kecamatan Cisayong, KMD	Analisis Tingkat partisipasi masyarakat

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui:

- a. *Studi Literatur* yaitu teknik untuk mendapatkan data jenis data sekunder yang akan digunakan dalam analisa faktor sentralitas. Data ini didapatkan dari instansi-instansi seperti Bapeda Tasikmalaya, BPS Tasikmalaya, Dinas PU, Kantor Kecamatan Cisayong dan Konsultan Manajemen Daerah (KMD).
- b. *Kuesioner* yaitu teknik pengumpulan data yang suatu daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari responden yang bersangkutan. Dalam penelitian ini dipakai kuesioner bersifat tertutup dengan pengertian bahwa jawaban kuesioner telah tersedia dan responden tinggal memilih beberapa alternatif yang telah disediakan.

Skala yang dipakai untuk menentukan jumlah alternatif jawaban untuk data yang sifatnya ordinal dipakai skala Likert. Skala Likert menggunakan metode penilaian

terakhir. Biasanya responden memberi tanda pada skala 1 sampai 5 dimana setengah soal positif dan setengahnya lagi negatif. Skor responden adalah jumlah seluruh skor pada soal-soal yang terpisah. Namun banyak peneliti yang memberikan penekanan pada kecenderungan responden untuk “mengamankan” dan untuk menempatkan jawaban mereka di tengah sebagai angka netral. Ini disebut pengaruh “kecenderungan sentral.” Sehingga beberapa peneliti berusaha menghapuskan samasekali dengan menghilangkan angka netral dan menghilangkan skala 3 (Sevilla, et al, 1993:225).

Nasution (2002:63) menyatakan bahwa dalam penggunaan skala Likert tidak terdapat aturan baku dimana dalam *skoring* ini dapat dipakai dengan jumlah ganjil atau genap. Dari pengertian di atas maka pada penelitian ini dipakai skala 1 sampai 5 untuk data yang sifatnya ordinal

- c. *Wawancara* mendalam merupakan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber yang dianggap mampu dan mengetahui permasalahan. Teknik ini dipakai secara simultan dan sebagai cara utama memperoleh data secara mendalam yang tidak diperoleh dengan data dokumentasi, menanyakan hal-hal yang belum ada atau belum jelas yang mungkin terdapat dalam data dokumentasi.
- d. *Observasi* yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan hal-hal yang penting, sehingga penulis mampu menggambarkan secara nyata kondisi di lapangan.

3.4. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan penduduk atau individu yang dimaksudkan untuk diselidiki. Pendapat lain mengatakan bahwa populasi adalah kumpulan dari ukuran-ukuran tentang sesuatu yang ingin kita buat inferensi. Dalam hal ini populasi berkenaan dengan data bukan pada orangnya atau bendanya (Nasir,1999:327).

Berdasarkan pendapat tersebut maka yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan individu atau seluruh gejala atau seluruh peristiwa yang akan diselidiki yang mempunyai karakteristik spesifik sebagai sumber data dan sebagai batasan generalisasi dari hasil penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut maka yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di tujuh Desa di Kecamatan Cisayong yang mendapatkan bantuan Proyek P2MPD tahun Anggaran 2002.

Sampel adalah wakil dari populasi yang dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari populasi (Nasir,1999:325). Maka sampel yang akan diambil harus mewakili populasi, sehingga semakin besar populasi semakin besar pula sampelnya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sejumlah responden dari jumlah populasi yang ada sebagai sampel.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran serta data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka populasi penelitian adalah rumah tangga. Pengambilan sampel dimaksudkan untuk mereduksi jumlah responden yang akan diambil datanya untuk efisiensi waktu, tenaga dan biaya.

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *area probability sample*. *Area probability sample* atau *sampel wilayah* adalah teknik sampling yang dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat dalam populasi. (Arikunto,1998:126-127).

Terdapat beberapa pedoman dalam penentuan jumlah warga yang akan dijadikan sampel. Untuk penelitian deskriptif kuantitatif ini dapat dipakai ukuran minimum dari Gay (dalam Sevilla,1993:163) pada penelitian deskriptif yaitu sebesar 10% dari populasi.

Untuk menentukan jumlah ukuran sampel dipakai formulasi dari Slovin (dalam Sevilla,1993:161) yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana,

n : ukuran sampel

N : ukuran populasi

d² : nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan.

Nilai Kritis yang diinginkan dalam menentukan jumlah sampel adalah 10%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kecermatan studi dapat dikategorikan cermat, untuk tingkat kepercayaan 90%.

Berdasarkan formulasi tersebut maka bila jumlah warga di tujuh desa di Kecamatan Cisayong adalah 7458 KK maka ukuran sampelnya adalah :

$$n = \frac{7458}{1 + 7458 \cdot (0,1)^2}$$

$$n = 98,67 \quad \text{-----} \rightarrow n = 100$$

Jadi besarnya ukuran sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 Kepala Keluarga.

Untuk jumlah sampel pada masing-masing Desa yang terkena program dapat dihitung berdasarkan teknik *proportional sampel* yang didasarkan pada prosentase jumlah penduduk di tiap-tiap Desa yang mendapatkan bantuan Proyek. Sehingga jumlah masing-masing sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL III.2.
PERHITUNGAN JUMLAH SAMPEL PENELITIAN

DESA	Jumlah Kepala Keluarga (orang)	Prosentase (%)	Jumlah Sampel (responden)
Cisayong	1496	20,06	20
Santanamekar	1007	13,50	13
Jatihurip	695	9,32	10
Purwasari	1077	14,44	14
Sukaraharja	1117	14,98	15
Cikadu	644	8,63	9
Sukasetia	1422	19,07	19
Jumlah	7458	100	100

Sumber : Data Sekunder diolah, 2003

Setelah jumlah sampel yang akan diambil diketahui maka untuk teknis pelaksanaan dipakai *teknik purposive sampling*. Dalam hal ini responden yang dipilih adalah warga yang terlibat dalam Proyek P2MPD tahun anggaran 2002.

TABEL III.3.
DISTRIBUSI RESPONDEN DALAM PURPOSIVE SAMPLING

DESA	Jumlah Sampel (responden)	Anggota LPM (responden)	Non-Anggota LPM (responden)
Cisayong	20	5	15
Santanamekar	13	4	9
Jatihurip	10	3	7
Purwasari	14	4	10
Sukaraharja	15	4	11
Cikadu	9	3	6
Sukasetia	19	5	14
Jumlah	100	28	72

Sumber : Data Sekunder diolah, 2003

3.5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan studi ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif didukung dengan kualitatif serta metode tabulasi silang. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Metode untuk mengetahui Tingkat Sentralitas

Untuk mengetahui tingkat sentralitas atau struktur hirarki pusat pelayanan yang ada di wilayah Kecamatan Cisayong digunakan Analisis Indeks Sentralitas (*Centrality Index Analysis*). Analisis ini juga dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah fungsi yang ada, berapa jenis fungsi dan berapa jumlah penduduk yang dilayani serta berapa besar frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam suatu wilayah pemukiman.

Pembuatan analisis ini hampir sama dengan pembuatan analisis pola permukiman dan skalogram, tetapi pada analisis ini dilakukan penilaian berdasarkan bobot dari setiap jenis fungsi yang ada, sehingga disebut juga indeks sentralitas terbobot.

b. Metode untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan tingkat peran serta masyarakat

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan tingkat peran serta masyarakat dalam Proyek P2MPD Paket A tahun 2002 ini dipakai metode analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil pengambilan data dari para warga desa diketahui latar belakang responden, sehingga dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan tingkat peran serta masyarakat.

c. Metode untuk mengetahui bentuk peran serta masyarakat.

Untuk mengetahui bentuk peran serta masyarakat dalam Proyek P2MPD Paket A tahun 2002 ini dipakai metode analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil

pengambilan data dari para warga desa maka dapat diketahui prosentase bentuk peran serta yang dilakukan masyarakat desa, baik dalam bentuk sumbangan maupun kegiatan.

d. *Metode untuk mengukur tingkat peran serta masyarakat.*

Peran serta masyarakat lebih merupakan proses dan bukan produk (Schubeler, 1996:32). Dengan demikian untuk mengukur tingkat peran serta masyarakat dalam proyek P2MPD ini dapat dilihat dari proses kegiatannya.

Tingkat peran serta masyarakat ini diukur dengan metode kuantitatif melalui penjumlahan skor dari indikator frekuensi kehadiran dalam pertemuan, keaktifan warga dalam berdiskusi, keterlibatan dalam kegiatan fisik dan kesediaan membayar iuran atau sumbangan lain yang telah disepakati bersama. Dimana masing-masing indikator terdiri dari skala tinggi (5), agak tinggi (4), rendah (2) dan sangat rendah (1). Nilai 3 sebagai nilai tengah dihilangkan untuk menghindari nilai ragu-ragu dari responden.

TABEL III.4.
SKALA PATISIPASI DALAM PENELITIAN

Derajat Keterlibatan	Bobot/ Nilai
Frekuensi kehadiran anggota kelompok dalam pertemuan	5
Keaktifan anggota kelompok dalam berdiskusi	4
Keterlibatan anggota dalam kegiatan fisik	2
Kesediaan memberi sumbangan berbentuk uang atau material yang telah ditetapkan	1

Sumber: Slamet, 1994, diolah 2003

Besarnya interval skor untuk menentukan kategori tingkat peran serta masyarakat secara menyeluruh didasarkan skor kategori tingkat peran serta individu dikalikan dengan jumlah sampel. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terdapat 4 kriteria dengan skor masing-masing berkisar 1 sampai 5 Sehingga minimum skor yang diperoleh untuk setiap individu (4×1) adalah 4, maksimum skor yang

diperoleh untuk setiap individu (4×5) adalah 20. Maka bila jumlah sampel 100, dapat diketahui skor minimum untuk tingkat peran serta masyarakat (100×4) adalah 400 dan skor maksimum (100×20) adalah 2000. Dengan diketahuinya skor minimum dan maksimum maka diketahui pula jarak interval, $(2000 - 400)/4 = 400$. Sehingga dapat diketahui tingkat peran serta masyarakat adalah

- Sangat Tinggi bila memiliki skor 1601 – 2000
- Tinggi bila memiliki skor 1201 – 1600
- Rendah bila memiliki skor 801 – 1200
- Sangat rendah bila memiliki skor 400 – 800

e. *Metode untuk mengetahui hubungan sentralitas dengan bentuk dan tingkat peran serta masyarakat.*

Untuk melihat hubungan antara tingkat sentralitas desa dengan bentuk dan tingkat peran serta masyarakatnya dalam Proyek P2MPD di wilayah Kecamatan Cisayong digunakan metode tabulasi silang. Dalam studi ini, metode tabulasi silang digunakan untuk menganalisis hasil survey primer yang dilakukan terhadap responden di tujuh desa di Kecamatan Cisayong. Prosedur tabulasi silang digunakan untuk menghitung kombinasi nilai-nilai yang berbeda dari dua variabel atau lebih, dengan menghitung harga-harga statistik beserta ujinya.

Data-data dari tiap variabel tersebut dikelompokkan dalam beberapa kategori, dimana dari setiap kategori tersebut diberi nilai (*score*) untuk mempermudah perhitungan. Kemudian variabel-variabel yang akan diidentifikasi hubungannya disusun dalam baris dan kolom. Selanjutnya dilakukan perhitungan koefisien kontigensi (*contingency coefficient*), yaitu koefisien yang digunakan untuk melihat *ada* atau *tidak* serta *kuat* atau *lemahnya* hubungan diantara dua variabel.

Metode tabulasi silang akan mentabulasikan beberapa variabel yang berbeda ke dalam suatu matriks, hasil tabulasi silang disajikan dalam bentuk suatu tabel dengan

variabel-variabel yang tersusun sebagai kolom dan baris tabel tersebut. Untuk mengamati dan menganalisis variabel-variabel tersebut dipakai dengan tabel dua dimensi (ixj) yang merupakan cara yang termudah.

TABEL III.5.
FORMAT TABULASI SILANG

	1	2	j	k	
1	C_{11}	C_{11}	C_{1j}	C_{1k}	n_1
2	C_{21}	C_{11}	C_{1j}	C_{2k}	n_2
....
i	C_{i1}	C_{i2}		C_{ij}	C_{ik}	n_i
....
r	C_{r1}	C_{r2}	C_{rj}	C_{rk}	n_r
Σ	n_1	n_2	n_j	n_k	n

Sumber: Nasir, 1999

Pengujian yang dilakukan bersifat pendekatan. Frekuensi yang diharapkan terjadi akan dinyatakan dengan e_{ij} , dengan rumus (Nasir, 1999:480):

$$e_{ij} = \frac{(n_i) \cdot (n_j)}{n}$$

Dimana : n_i = jumlah baris ke-i

n_j = jumlah baris ke-j

Berdasarkan formula ini maka didapat

$$e_{11} = \frac{(n_1) \cdot (n_1)}{n} \qquad e_{21} = \frac{(n_2) \cdot (n_1)}{n} \qquad e_{23} = \frac{(n_2) \cdot (n_3)}{n}$$

dan seterusnya

maka : $n = (n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_r) = (n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_k)$

Selanjutnya dicari besaran χ^2 (dibaca chi-kuadrat) dengan memakai formula (Nasir,1999:481):

$$\chi^2 = \sum_i \sum_j \frac{(c_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}$$

Setelah χ^2 diketahui, maka besarnya contingency coefficient (Cc) dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$C_c = \sqrt{\frac{\chi^2}{\chi^2 + n}}$$

Dimana besarnya Cc berada pada rentang skala antara 0 sampai 1, atau :

$$0 \leq C_c \leq 1$$

Bila $C_c = 0$ berarti tidak ada hubungan

Bila $C_c = 1$ berarti ada hubungan sempurna

Dalam hal ini semakin mendekati angka 1 maka hubungan yang terjadi semakin kuat dan semakin mendekati angka 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah.

BAB IV
GAMBARAN UMUM
PROGRAM PENUNJANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAH DAERAH (P2MPD) TAHUN 2002
DI KECAMATAN CISAYONG KABUPATEN TASIKMALAYA

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Tasikmalaya

4.1.1. Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya

Sesuai dengan pemerintah sebagai fasilitator '*enabler*' dan perubahan paradigma dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya mulai melibatkan peran serta masyarakat dalam seluruh kegiatan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari mulai banyaknya program peran serta masyarakat yang tercantum dalam Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya.

Program peran serta masyarakat telah dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama dalam hal perencanaan pembangunan. Masyarakat telah diminta membuat usulan program dimulai dari tingkat Desa/ Kelurahan atau disebut Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan (Musbangdes) yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan ditindaklanjuti dalam Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) di tingkat Kabupaten. Dengan kebijakan ini diharapkan tercipta kebersamaan dalam pembangunan daerah yang tidak hanya menjadi tanggung jawab dan beban Pemerintah Daerah tetapi juga masyarakat luas di Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu diharapkan bahwa program pembangunan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat yang ada.

Selain dalam proses perencanaan pembangunan, beberapa program sudah melibatkan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan mulai dari perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan. Dari beberapa program yang telah dilaksanakan, ternyata peran serta masyarakat sangat berhasil meningkatkan kualitas produk pekerjaan serta rasa memiliki (*sense of belonging*) dari masyarakat sehingga menimbulkan kemauan untuk turut memelihara sarana dan prasarana yang telah mereka bangun secara bersama-sama. Program-program tersebut sebagian merupakan bantuan Pemerintah Pusat seperti P3DT, P2D, P2Dikdas dan lain-lain. Sebagian lagi dibiayai murni dari APBD Kabupaten Tasikmalaya yang pelaksanaannya mengacu pada program-program bantuan pusat.

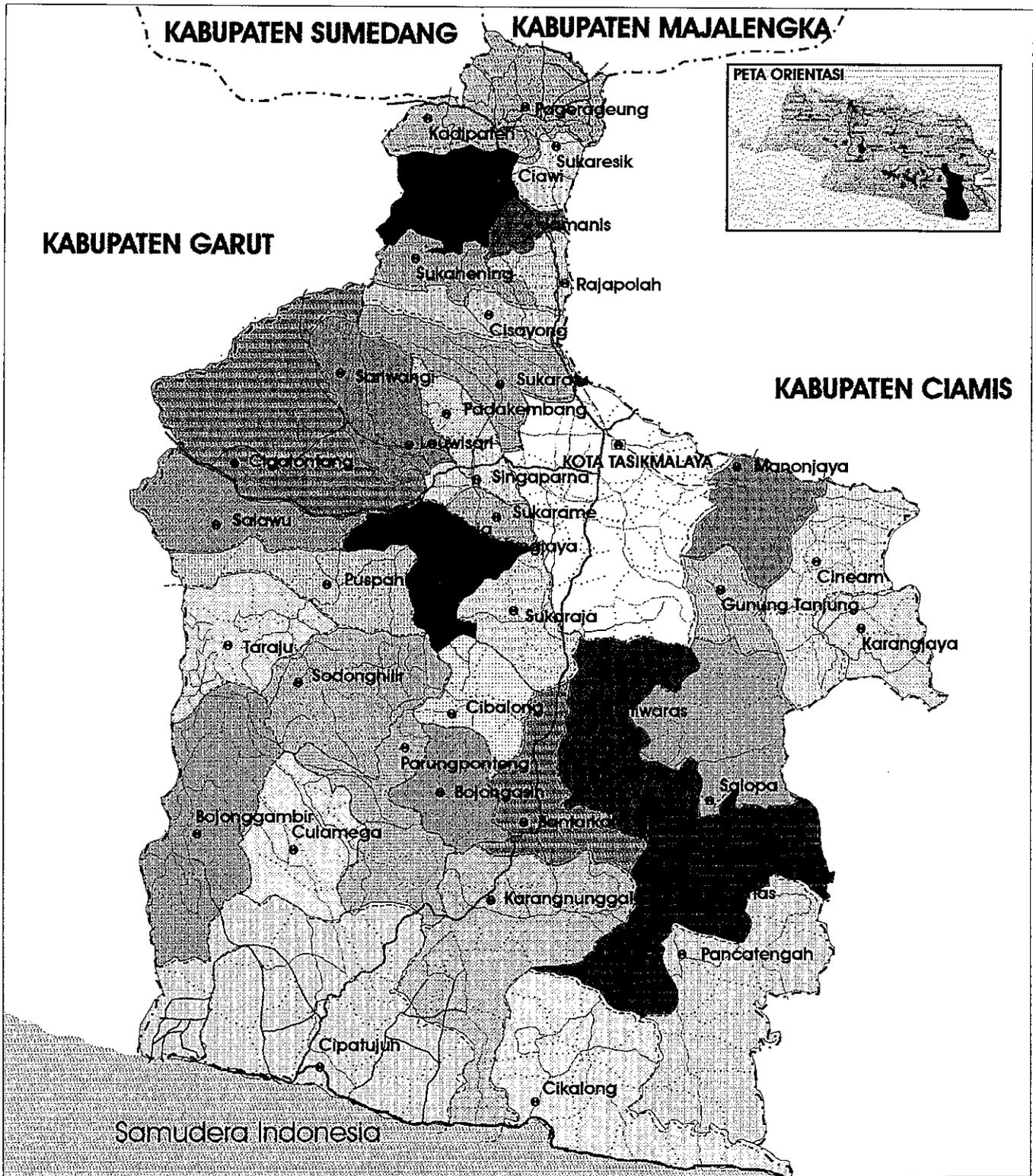
4.1.2. Program P2MPD di Kabupaten Tasikmalaya

Salah satu bentuk usaha peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan bisa dilihat dari proyek Penunjang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD). Proyek ini merupakan bantuan dari *Asian Development Bank (ADB)* melalui Pemerintah Pusat. Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan bantuan proyek ini sejak tahun 2000 dan kemudian berlanjut setiap tahun sampai dengan tahun 2003 yang masih dalam tahap perencanaan.

Pada tahun 2002 Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan bantuan proyek P2MPD sebesar sebesar Rp. 6,3 Milyar untuk Tipe A dan Rp. Rp. 2,9 Milyar untuk Tipe B. Dana tersebut dialokasikan di 100 (seratus) desa di 29 (duapuluh sembilan) kecamatan untuk Tipe A dan di 11 (sebelas) desa di 10 (sepuluh) kecamatan. Adapun jenis pekerjaan yang dilaksanakan berbeda-beda sesuai usulan hasil lokakarya desa. Jenis pekerjaan tersebut antara lain pembangunan dan atau perbaikan jalan, pembangunan dan atau perbaikan irigasi serta pembangunan dan atau perbaikan sekolah.

Berbagai kendala masih terdapat dalam pelaksanaan proyek P2MPD tahun 2002 di Kabupaten Tasikmalaya. Sulitnya mengaplikasikan pedoman dalam pelaksanaan program

masih merupakan kendala utama. Selain itu besarnya unit-unit organisasi pengelola mulai dari tingkat desa merupakan hambatan dalam segi koordinasi. Pada sisi masyarakat konflik internal masyarakat penerima program masih juga terjadi.

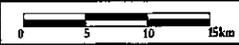



PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

HUBUNGAN SENTRALITAS DENGAN
BENTUK DAN TINGKAT PARTISIPASI
MASYARAKAT PADA PROYEK P2MPD
DI KEC. CISAYONG KAB. TASIKMALAYA

PETA WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA	
<i>LEGENDA</i>	
	Jalan Desa
	Jalan Kabupaten
	Batas Desa
	Batas Kecamatan
	Batas Propinsi
	Laut
	Jalan Propinsi

Sumber : BAPEDA KABUPATEN TASIK MALAYA		
SKALA		
NUMERIK	GARIS	
		
	Gbr 4.1	52
UTARA	NO. PETA	HALAMAN
Tahun Pembuatan : 2003		

4.2. Gambaran Umum Kecamatan Cisayong

4.2.1. Kondisi Fisik Wilayah

Kecamatan Cisayong terletak di wilayah Kabupaten Tasikmalaya bagian utara di kaki Gunung Galunggung. Kecamatan Cisayong dalam pengembangan wilayah Kabupaten Tasikmalaya termasuk di dalam Sub Wilayah Pengembangan (SWP) III Ciawi dan merupakan kota hierarki III dengan kegiatan utama perikanan air tawar, agroindustri, industri kecil, perdagangan, hortikultura dan palawija.

Luas wilayah Kecamatan Cisayong setelah pemekaran adalah 4.708,89 ha dan terdiri dari 13 (tiga belas) desa. Desa Santanamekar merupakan desa yang mempunyai wilayah paling luas (1.093,38 Ha), sedangkan desa dengan wilayah terkecil adalah Desa Cikadu (141,38 Ha).

TABEL IV.1.
LUAS WILAYAH KECAMATAN CISAYONG

NO	DESA	LUAS LAHAN (Ha)
1.	Cisayong	214,00
2.	Santanamekar	1.093,38
3.	Sukamukti	1.025,86
4.	Sukasetia	600,60
5.	Cikadu	141,38
6.	Purwasari	269,00
7.	Nusawangi	229,00
8.	Cileuleus	234,00
9.	Mekarwangi	172,01
10.	Jatihurip	99,96
11.	Sukasukur	245,50
12.	Sukaraharja	176,12
13.	Sukajadi	208,08
	Jumlah	4.708,89

Sumber: Kecamatan Cisayong Dalam Angka thn 2002

Batas wilayah Kecamatan Cisayong adalah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kecamatan Sukahening
- Timur berbatasan dengan Kota Tasikmalaya
- Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukaratu
- Barat berbatasan dengan Kabupaten Garut

Topografi wilayah Kecamatan Cisayong adalah berbukit dengan wilayah tertinggi 2200 dpl di daerah Gunung Galunggung. Kemiringan tanah sebagian besar (2216,72 Ha) mempunyai kemiringan di atas 40%.

Penggunaan tanah di Kecamatan Cisayong sebagian besar digunakan untuk hutan (1.670 ha), persawahan (1.346,68 ha), tambak/kolam (112,24 ha) dan permukiman (306,51 ha). Status lahan di Kecamatan Cisayong selain status hak milik juga terdapat tanah-tanah negara berupa hutan lindung di daerah Gunung Galunggung.

4.2.2. Kondisi Sosial Ekonomi

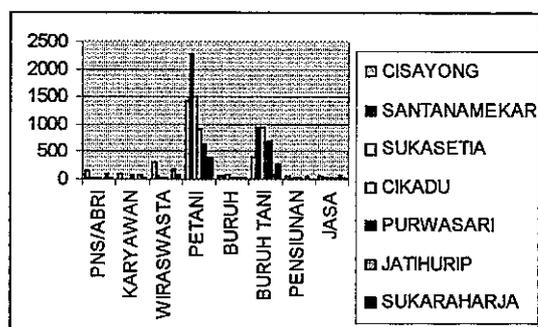
Jumlah penduduk Kecamatan Cisayong pada Agustus 2002 adalah 49.064 jiwa yang terdiri dari 14.352 KK dengan kepadatan penduduk 10,42 jiwa/ha. Jumlah penduduk terbanyak di Desa Cisayong dengan jumlah 5.079 jiwa dan paling sedikit di Desa Cikadu dengan jumlah penduduk 644 jiwa. Seluruh penduduk Kecamatan Cisayong memeluk agama Islam.

TABEL IV.2
JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN CISAYONG

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	JUMLAH KK (KK)
1.	Cisayong	5.079	1.496
2.	Santanamekar	3.206	1.007
3.	Sukamukti	3.293	1.166
4.	Sukasetia	5.135	1.442
5.	Cikadu	2.362	644
6.	Purwasari	3.370	1.077
7.	Nusawangi	4.129	1.141
8.	Cileuleus	3.527	1.046
9.	Mekarwangi	3.800	1.196
10.	Jatihurip	2.372	695
11.	Sukasukur	4.155	1.176
12.	Sukaraharja	4.108	1.117
13.	Sukajadi	4.528	1.149
JUMLAH		49.064	14.352

Sumber: Kecamatan Cisayong Dalam Angka thn 2002

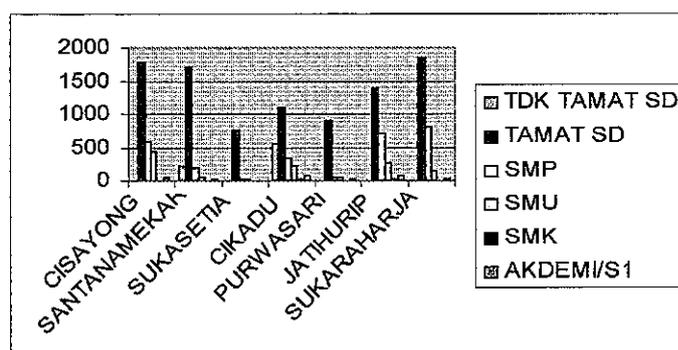
Mata pencaharian penduduk Kecamatan Cisayong sebagian besar adalah bergerak di bidang pertanian dan perikanan darat. Sebagian lainnya berprofesi sebagai pegawai negeri dan wirausaha. Desa Cisayong sebagai ibukota kecamatan penduduknya cenderung lebih heterogen dibanding desa-desa lainnya. Selain Desa Cisayong, desa lain yang penduduknya sudah heterogen adalah Desa Jatihurip.



GAMBAR 4.2.
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

Sumber: Kecamatan Cisayong Dalam Angka thn 2002

Pelayanan pendidikan bagi masyarakat desa di Kecamatan Cisayong dirasakan masih kurang yang bisa dilihat dari ketersediaan fasilitas pendidikan yang ada masih terbatas. Keterbatasan fasilitas pendidikan sedikit banyak berpengaruh pada tingkat penduduk, dimana mayoritas pendidikan masyarakat di Kecamatan Cisayong berpendidikan tamat SD.



GAMBAR 4.3
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN

Sumber: Kecamatan Cisayong Dalam Angka thn 2002

Fasilitas kesehatan masyarakat yang terdapat di Kecamatan Cisayong berupa 1 (satu) Puskesmas, 5 (lima) Puskesmas Pembantu, 58 (lima puluh) posyandu dan 6 (enam) klinik.

4.2.3. Proyek P2MPD di Kecamatan Cisayong

Pada tahun 2002, 7 (tujuh) desa di Kecamatan Cisayong mendapatkan bantuan proyek P2MPD. Setelah melalui lokakarya desa, ketujuh Desa tersebut semuanya mengalokasikan bantuan proyek P2MPD tersebut untuk pembangunan dan perbaikan/peningkatan jalan. Masyarakat menilai bahwa prasarana jalan merupakan hal yang utama untuk meningkatkan perekonomian desa.

TABEL.IV.3.
JENIS DAN VOLUME PEKERJAAN P2MPD TAHUN 2002
DI KECAMATAN CISAYONG

No	Desa	Jenis Pekerjaan	Volume	
			Panjang (m)	Lebar (m)
1.	Santanamekar	Perbaikan jalan desa	476,00	3,00
2.	Cisayong	Perbaikan jalan desa	552,00	2,50
3.	Jatihurip	Perbaikan jalan desa	543,00	2,50
4.	Purwasari	Pembuatan jalan desa	446,00	2,50
5.	Sukaraharja	Perbaikan jalan desa	462,00	2,50
6.	Cikadu	Perbaikan jalan desa	580,00	2,50
7.	Sukasetia	Perbaikan jalan desa	570,00	2,50

Sumber: Laporan Akhir KMD 2002

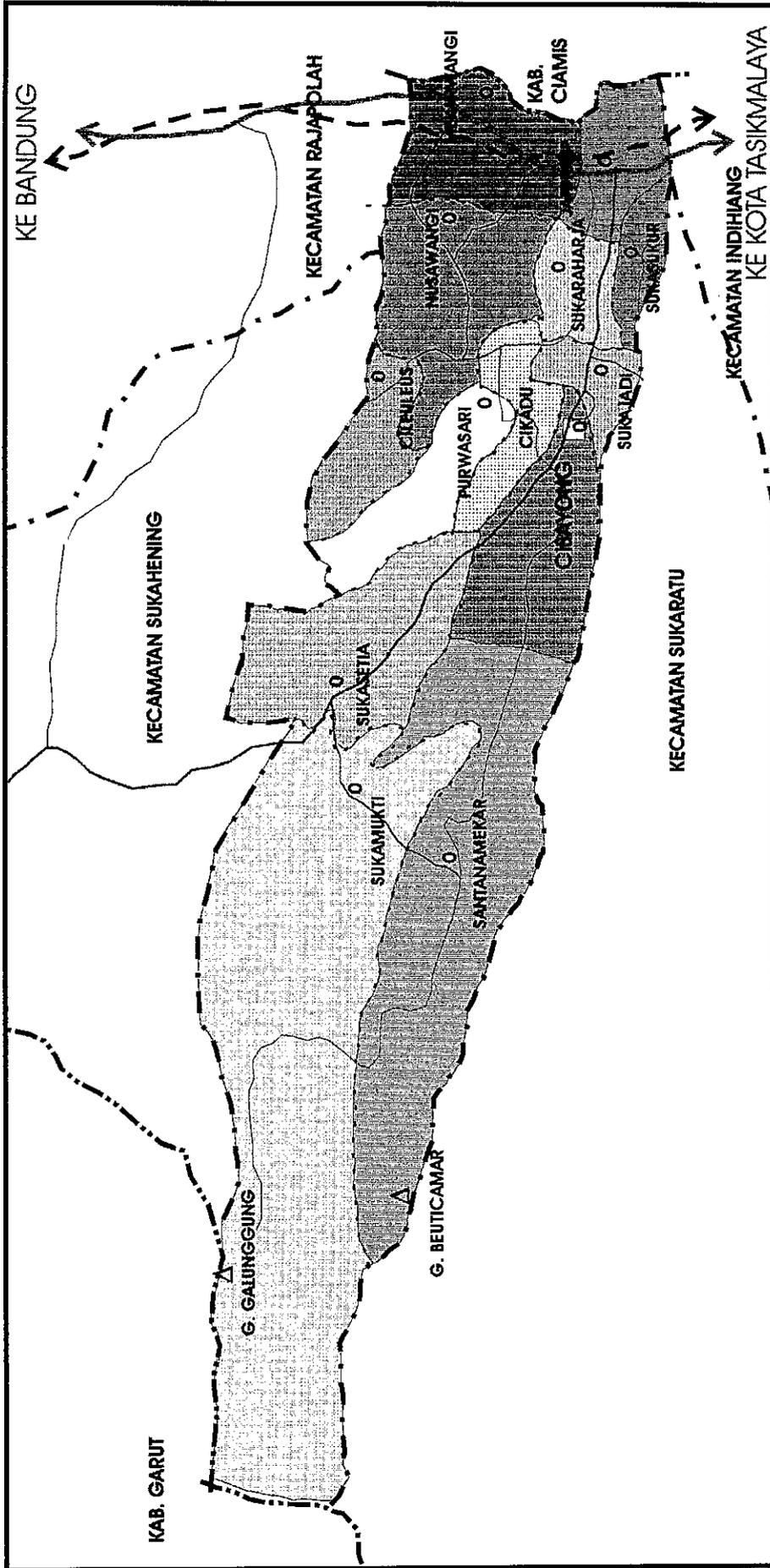
Dalam Proyek P2MPD tahun 2002 ini terdapat perbedaan tingkat swadaya masyarakat di antara 7 (tujuh) Desa yang mendapat bantuan proyek di Kecamatan Cisayong (Tabel IV.4.).

Jumlah bantuan dana yang diberikan (pagu) proyek kepada ketujuh desa hampir sama, yaitu berkisar antara Rp. 60 juta sampai dengan Rp.64 juta. Dana bantuan tersebut masih dirasakan kurang untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan. Untuk itu masyarakat bergotong royong untuk menutupi kekurangan tersebut, baik dengan cara menyumbangkan materi maupun tenaga. Terdapat perbedaan jumlah kontribusi (swadaya) masyarakat untuk menutupi kekurangan tersebut.

TABEL IV.4.
TINGKAT SWADAYA MASYARAKAT KECAMATAN CISAYONG
DALAM PROYEK P2MPD TAHUN 2002

Desa	Bantuan dari P2MPD (Rp)	Kontribusi Masyarakat (Rp)	Prosentase (%)
Cisayong	61.859.600,00	19.258.000,00	31,13
Cikadu	61.859.600,00	11.450.000,00	18,51
Jatihurip	60.759.600,00	15.215.000,00	25,04
Sukasetia	60.759.600,00	7.385.000,00	12,15
Purwasari	61.859.600,00	6.450.000,00	10,43
Sukaraharja	64.059.600,00	1.150.000,00	1,80
Santanamekar	64.059.000,00	32.209.000,00	50,28

Sumber Data: Laporan Akhir KMD




 PROGRAM PASCA SARJANA
 MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH DAN KOTA
 UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS
 HUBUNGAN SENTRALITAS
 DENGAN BENTUK DAN TINGKAT
 PARTISIPASI MASYARAKAT

**PETA KECAMATAN CISAYONG
 KABUPATEN TASIKMALAYA**

LEGENDA
 Jalan Kabupaten
 Jalan Desa
 Batas Kabupaten
 Batas Kecamatan

Sumber:
 BAPEDA KABUPATEN TASIKMALAYA

SKALA
 NUMERIK: 1:60,000
 GARIS: 

Tahun Pembuatan :
 2003

Gbr. 4.4 52
 NO. PETA HALAMAN

4.3. Gambaran Umum Proyek P2MPD

4.3.1. Tujuan Proyek

Tujuan umum proyek P2MPD adalah mengembangkan dan memperkuat proses pelaksanaan desentralisasi pemerintahan serta membantu percepatan pemulihan dampak krisis, dimana keduanya dilakukan melalui pendekatan pelaksanaan pembangunan daerah dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan peran serta masyarakat pada semua tahap pembangunan.

Adapun tujuan khusus Program P2MPD adalah:

- Mendukung upaya desentralisasi pemerintahan
- Memberdayakan masyarakat kelurahan/desa untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah
- Meningkatkan prosedur-prosedur transparansi, tata negara, pengawasan, akuntansi, dan pelaporan pada tingkat kabupaten/ kota
- Mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan umum dasar
- Menciptakan lapangan kerja dan mendorong aktivitas ekonomi pada tingkat lokal
- Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana dasar

4.3.2. Ruang Lingkup

Kegiatan utama program ini adalah pembangunan sarana dan prasarana dasar dalam upaya percepatan pemulihan dampak krisis melalui peningkatan akses dan pembangunan sarana dan prasarana

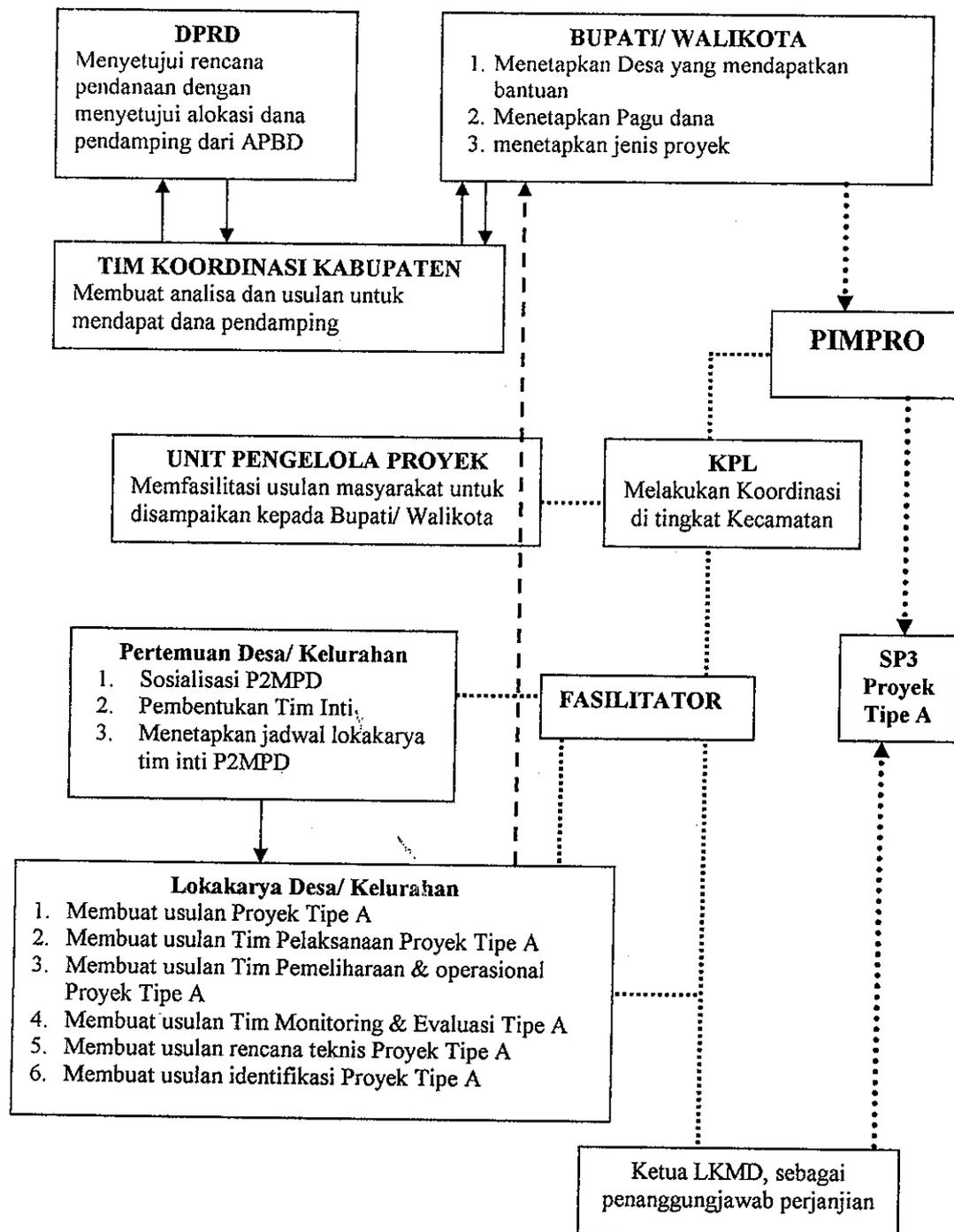
Program P2MPD terdiri dari dua bagian, yaitu:

- Bagian I: Pekerjaan Prasarana dan Sarana

1. Tipe A : Pembangunan, peningkatan dan atau perbaikan sarana dan prasarana umum skala kecil yang diseleksi, direncanakan dan dikerjakan oleh masyarakat, terdiri dari: air bersih, irigasi, jalan dan jembatan lokal, drainase, pasar, bangunan sekolah, sanitasi (contoh MCK) dan fasilitas transportasi air
 2. Tipe B: pembangunan, perbaikan dan atau perluasan prasana dan sarana umum dengan jenis sama dengan Tipe A dengan skala yang lebih besar. Pekerjaan Tipe B dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- Bagian II: Pengembangan Kapasitas
Peningkatan kemampuan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dengan memperbantukan konsultan manajemen dan fasilitator

4.3.3. Mekanisme Pengelolaan Proyek

Dalam melaksanakan proyek P2MPD, terdapat beberapa mekanisme yang secara garis besar dapat dilihat dalam gambar 4.5.



GAMBAR 4.5.
MEKANISME PELAKSANAAN PROYEK TIPE A

Sumber : Petunjuk Pengadaan Proyek Tipe A, 2001

4.3.3.1. Pengusulan dan Penetapan Desa/Kelurahan

Setelah mendapat pemberitahuan dan executing agency (Bappenas) tentang keikutsertaan kabupaten/kota dalam Program P2MPD, Pemerintah Kabupaten/Kota mempersiapkan dokumen yang disyaratkan Sekretariat Pusat P2MPD. Kemudian executing agency (Bappenas) membuat analisa alokasi dana dan memberitahukan kepada masing masing Pemerintah Kabupaten/Kota dan tembusan kepada propinsi masing masing wilayahnya.

Setelah mendapat pemberitahuan besaran alokasi dana, maka dilaksanakan proses pengusulan desa/kelurahan oleh Pemerintah/Kota sebagai berikut:

1. Bupati/Walikota menetapkan desa/kelurahan yang akan mendapat bantuan P2MPD sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada Pedoman Umum P2MPD dan kriteria lain yang sesuai dengan daerah masing masing.
2. Tim Koordinasi Kabupaten/ Kota (TKK) melakukan analisis pengalokasian dana untuk desa/kelurahan yang telah ditetapkan akan mendapat bantuan P2MPD
3. Bupati/Walikota menetapkan pagu dana tertinggi untuk setiap desa/ kelurahan setelah menerima masukan berdasarkan analisis dari TKK
4. TKK menyampaikan informasi pagu dana yang tersedia kepada Pemerintah Desa dengan tembusan Camat setempat.

4.3.3.2. Konsultan Manajemen Daerah (KMD) dan Fasilitator

Konsultan Manajemen Daerah (KMD) yang berasosiasi dengan Lembaga Penyedia Fasilitator adalah Konsultan Manajemen Proyek yang bertugas membantu Unit Pengelola (UPP) di Kabupaten/Kota dalam mengelola Program P2MPD. Ruang lingkup tugas KMD meliputi manajemen umum, rencana dan program, fasilitasi, motivasi, monitoring, pendukung pelaksanaan serta issue gender.

Fasilitator mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberdayaan dalam skala P2MPD tetapi muatan kerjanya lebih besar kepada pemberdayaan masyarakat. Secara umum tugas fasilitator adalah membantu sosialisasi, memfasilitasi pertemuan desa, identifikasi jenis prasarana dan sarana, verifikasi usulan serta penyusunan laporan pelaksanaan di lapangan.

4.3.3.3. Pengusulan, Perencanaan dan Penetapan Proyek Tipe A

A. Pengusulan dan Perencanaan Tipe A

Mekanisme pengusulan dan penetapan proyek tipe A meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Pertemuan Desa/Kelurahan

Pertemuan desa/kelurahan diselenggarakan oleh LKMD atau sebutan lainnya yang difasilitasi oleh fasilitator. Pertemuan dihadiri oleh Kepala Desa/Kelurahan, BPD/LMD atau sebutan lainnya dan masyarakat desa yang bertujuan antara lain untuk memberntuk tim inti P2MPD, menetapkan jadwal lokakarya tim inti P2MPD serta menetapkan hal lain yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan program P2MPD di desa/kelurahan.

b. Lokakarya desa/kelurahan

Lokakarya desa/kelurahan adalah bagian proses pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan proses pembelajaran dan tindakan dengan menggunakan metode partisipatif dalam sebuah pertemuan dengan peserta tim inti P2MPD dibantu oleh fasilitator, bertujuan untuk menyusun usulan Proyek, Tim Pelaksana, Tim Pemeliharaan dan Operasi, Tim Monitoring dan Evaluasi serta Rencana Teknis Proyek.

c. Perencanaan Teknis

Penyusunan perencanaan teknis proyek dilaksanakan dalam lokakarya desa oleh masyarakat yang tergabung dalam tim inti P2MPD dibantu oleh fasilitator dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Menginventarisasi tenaga terampil yang ada di desa, bahan dan peralatan yang tersedia, potensi masyarakat dalam memberikan kontribusi (*in-kind* atau tunai)
- Menghitung secara sederhana volume pekerjaan, kebutuhan tenaga kerja, bahan, peralatan serta biaya yang diperlukan sesuai dengan petunjuk teknis
- Membuat gambar-gambar konstruksi sederhana sesuai petunjuk teknis
- Membuat jadwal kerja pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta rencana operasi dan pemeliharaan
- Memperhatikan pemilihan teknologi tepat guna dan mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap lingkungan sekitar

B. Penetapan Proyek Tipe A

Setelah lokakarya desa yang dilaksanakan oleh Tim Inti P2MPD selesai dilaksanakan, maka dilakukan proses lanjutan untuk menetapkan proyek tipe A yang akan dilaksanakan di desa/kelurahan, sebagai berikut:

1. Masyarakat yang dikoordinir LKMD atau sebutan lainnya melaksanakan rapat Musbangdes/Musabangkel yang dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat guna menetapkan hasil lokakarya desa/kelurahan dengan disyahkan Lurah/ Kepala Desa dan Ketua BPD.
2. Koordinator Pelaksanaan lapangan (KPL) di kecamatan membantu mengumpulkan seluruh usulan proyek yang ada di wilayah administratifnya untuk diajukan kepada UPP.

3. UPP selanjutnya menyerahkan seluruh usulan (dari seluruh Desa di Kabupaten/Kota) kepada Bupati/Walikota.
4. Bupati/Walikota meminta TKK untuk membahas dan memberi masukan usulan proyek Tipe A
5. Setelah menerima masukan dari TKK, Bupati/Walikota menetapkan proyek Tipe A (nama proyek, besaran biaya, nama pelaksana dan jadwal pelaksanaan)

4.3.3.4. Mekanisme Pelaksanaan Proyek Tipe A

Pelaksanaan proyek Tipe A yang dimaksud dalam bagian ini adalah pelaksanaan konstruksi Tipe A. Pelaksanaan ini dilakukan oleh masyarakat desa/kelurahan yang dikoordinir oleh Tim Inti dan difasilitasi oleh fasilitator desa pada setiap tahapan pekerjaan sebagai berikut:

- a. Setelah usulan proyek ditetapkan oleh Bupati/Walikota, Tim Pelaksana Proyek yang diwakili oleh LKMD atau sebutan lainnya mengadakan ikatan untuk melaksanakan pekerjaan dengan Pemimpin Proyek dalam bentuk SP3 (Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan)
- b. Setelah menerima dana, Tim Pelaksana Proyek bersama masyarakat desa dapat langsung melaksanakan kegiatan
- c. Monitoring pelaksanaan proyek Tipe A dilakukan oleh masyarakat yang secara administratif dikoordinir oleh Tim Monitoring dan Evaluasi dari Tim Inti P2MPD.
- d. Pada akhir pelaksanaan dibuat dokumen akhir penyelesaian pekerjaan

4.3.3.5. Mekanisme Operasi dan Pemeliharaan Proyek Tipe A

Operasi dan pemeliharaan hasil pelaksanaan proyek Tipe A dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan yang dikoordinasikan oleh Tim O & P dari Tim Inti P2MPD. Bila memungkinkan diupayakan pengembangan lebih lanjut prasarana/ sarana yang telah

dibangun tersebut oleh masyarakat sendiri. Untuk membiayai kegiatan pengoperasian, pemeliharaan dan pengembangan, atas dasar kesepakatan bersama oleh masyarakat diusahakan untuk memungut dan mengelola iuran pemakai. Iuran ini akan dipakai juga untuk membiayai penggantian sarana.

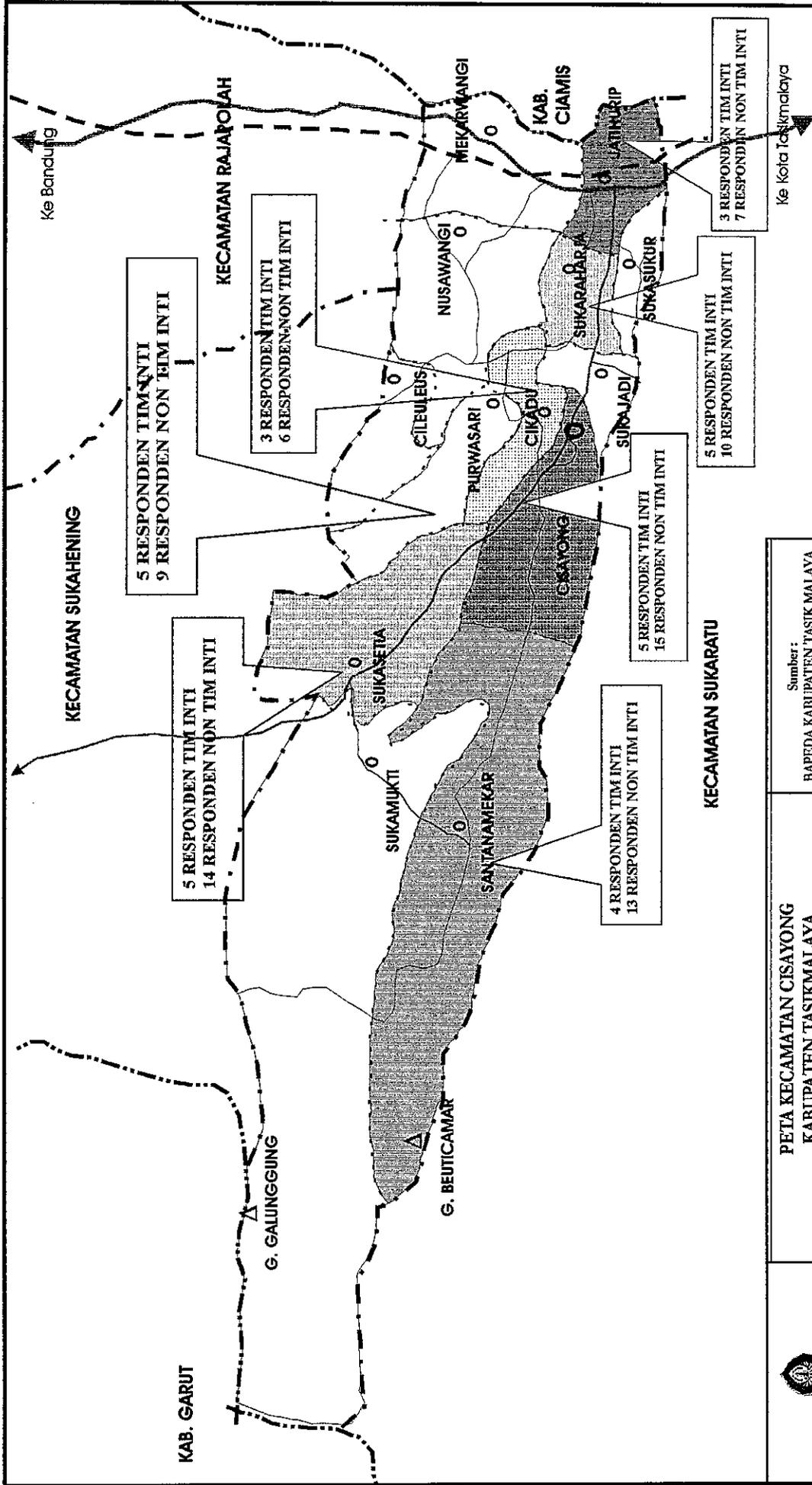
BAB V

ANALISIS HUBUNGAN SENTRALITAS DENGAN BENTUK DAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROYEK PD2MPD DI KECAMATAN CISAYONG

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab metodologi penelitian, metode yg digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang didukung dengan deskriptif kualitatif. Penelitian diawali dengan membuat hirarki sentralitas tujuh desa di Kecamatan Cisayong yang mendapatkan proyek P2MPD dengan data sekunder. Untuk mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat, maka dilakukan survey primer di tujuh desa tersebut sehingga didapat jawaban dari masing-masing responden. Dari data tersebut kemudian dilakukan analisis antara dua variabel dengan tabulasi silang menggunakan bantuan SPSS (*Statistic Program for Social Science*). Tabel-tabel hasil tabulasi tersebut kemudian dijelaskan secara deskripsi kualitatif.

Pengamatan yang telah dilakukan terhadap 100 responden dikelompokkan berdasarkan desa tempat tinggalnya. Selain itu responden juga dikelompokkan dalam tim inti dan non tim inti. Responden tim inti ini merupakan panitia pelaksanaan yang dibentuk oleh masyarakat, sedangkan responden non tim inti adalah masyarakat yang terlibat tetapi tidak ditunjuk atau dipilih menjadi tim inti.

Adapun sebaran lokasi responden tersebut dapat dilihat di Gambar 5.1 berikut ini.



KECAMATAN INDIHANG

 PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO	PETA KECAMATAN CISAYONG KABUPATEN TASIKMALAYA		Sumber: BAPEDA KABUPATEN TASIK MALAYA
	TESIS HUBUNGAN SENTRALITAS DENGAN BENTUK DAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROYEK P2MPD DI KEC. CISAYONG KAB. TASIKMALAYA		SKALA 1:24.000 0 0.8 1.6 2.4 km
LEGENDA Jalan Kabupaten  Jalur Kereta  Jalan Desa  Jalan Propinsi  Batas Desa  Batas Kabupaten  Batas Propinsi 		UTARA NO. PETA 68	HALAMAN 68
		Tahun Pembuatan: 2003	

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan maka pada masing-masing kategori tersebut perlu dikaji mengenai tingkat sentralitas desa, bentuk peran serta yang ada, tingkat peran serta, hubungan antara faktor-faktor yang berpengaruh dengan bentuk dan tingkat peran serta yang ada serta hubungan sentralitas dengan bentuk dan tingkat peran serta.

Bentuk-bentuk peran serta dapat berupa bentuk sumbangan, bentuk kegiatan, intensitas dan frekuensi kegiatan serta derajat kesukarelaan untuk melakukan kegiatan bersama. Sedangkan untuk tingkat peran serta masyarakat dianalisis berdasarkan pada tingkat kehadiran dalam pertemuan, tingkat keaktifan berdiskusi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama. Mengenai faktor-faktor yang berpengaruh yang dimaksudkan disini sesuai dengan tinjauan teori yaitu faktor internal yang terdiri dari jenis kelamin, umur, tingkat pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan status hunian. Sedangkan faktor eksternal, berupa *stakeholders* selain masyarakat sebagai pelaku utama, dalam penelitian ini menjadi variabel terkendali, dimana desa-desa yang menjadi objek penelitian yang sama dianggap mendapat perlakuan yang relatif sama dari faktor-faktor eksternal tersebut.

5.1. Analisa Tingkat Sentralitas

5.1.2. Analisa Tingkat Sentralitas di Kecamatan Cisayong

Suatu daerah akan mempunyai sifat-sifat kota apabila secara fisik memiliki kondisi yang relatif modern dengan sektor pelayanan yang lebih dominan. Semakin dominan fungsi pelayanan daerah tersebut, semakin terlihat sifat kotanya.

Kota disebutkan memiliki kondisi fisik yang relatif lebih modern, seperti kondisi sarana dan prasarana jaringan transportasi yang kompleks, sektor pelayanan dan industri yang lebih dominan. (Bintarto, 1987; 36). Hal ini juga sesuai dengan pendapat Christaller,

(Hadi,2003;51) bahwa *kota tidak dipandang sebagai tempat permukiman, tetapi sebagai tempat pelayanan.*

Bila dilihat dari fasilitas pelayanan yang ada di tujuh desa dalam lingkup penelitian, terdapat perbedaan yang mencolok baik dari segi jumlah maupun jenis pelayanan publik. Desa Cisayong yang merupakan ibukota Kecamatan Cisayong, memiliki hampir semua fasilitas kecuali fasilitas pendidikan (SMA). Semua fasilitas pelayanan publik yang harus terdapat di tingkat kecamatan, seperti Kantor Kecamatan, Mapolsek dan Puskesmas terletak di Desa Cisayong. Selain itu banyaknya fasilitas perekonomian terutama adanya pasar dan pertokoan menunjukkan tingginya pelayanan Desa Cisayong terhadap desa-desa lainnya.

Jumlah dan jenis fasilitas pelayanan publik yang cukup banyak dan beragam juga terdapat di Desa Jatihurip. Hal ini diakibatkan oleh letak Desa Jatihurip yang merupakan akses masuk dari daerah lain ke desa-desa lain di Kecamatan Cisayong. Penduduk Kecamatan Cisayong yang melakukan perjalanan dari atau ke daerah, khususnya Bandung dan Jakarta, biasanya melakukan transit di Simpang Pagendingan Desa Jatihurip untuk berganti moda angkutan. Kondisi ini memacu perekonomian di Desa Jatihurip, ditandai dengan banyaknya jumlah toko dan kios serta adanya Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Cisayong. Pelayanan publik di Desa Jatihurip juga didukung oleh adanya Pondok Pesantren Modern yang memiliki sekolah lengkap (MI, MTs dan MA) dimana muridnya tidak hanya berasal dari daerah sekitar tetapi juga dari luar kota.

Fasilitas pelayanan publik di desa-desa lainnya bisa dikatakan sangat kurang baik dari jumlah maupun jenisnya. Penduduk di desa-desa tersebut mendapatkan fasilitas pelayanan dari Desa Cisayong dan Desa Jatihurip tergantung dari jenis pelayanan dan jarak tempuh dari lokasi tempat tinggal.

Untuk mengetahui tingkat sentralitas atau struktur hirarki pusat pelayanan yang ada di wilayah Kecamatan Cisayong digunakan Analisis Indeks Sentralitas (*Centrality Index Analysis*). Analisis ini juga dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah fungsi yang ada, berapa jenis fungsi dan berapa jumlah penduduk yang dilayani serta berapa besar frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam suatu wilayah pemukiman. Pembuatan analisis ini hampir sama dengan pembuatan analisis pola permukiman dan skalogram, tetapi pada analisis ini dilakukan penilaian berdasarkan bobot dari setiap jenis fungsi yang ada, sehingga disebut juga indeks sentralitas terbobot.

Dari hasil analisis dapat dilihat indeks sentralitas masing-masing desa. Indeks sentralitas tertinggi dimiliki oleh Desa Cisayong (49,05) diikuti oleh Desa Jatihurip (25,27), Desa Santanamekar (17,29), Desa Sukasetia (16,90), Desa Cikadu (14,83), Sukaraharja (14,13) dan terakhir Desa Purwasari (10,67) sebagai desa yang memiliki indeks sentralitas terendah.

Tujuh desa tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tiga yaitu desa yang memiliki indeks sentralitas tinggi, sedang dan rendah. Range setiap kelompok didapat dari selisih indeks tertinggi dibagi tiga.

$$\text{Range Tiap Kelompok: } \frac{49,05 - 10,67}{3} = 12,79$$

Dari tabel V.1 dapat dilihat bahwa Desa Cisayong memiliki tingkat sentralitas tinggi, Desa Jatihurip memiliki tingkat sentralitas sedang. Desa Sukasetia, Desa Santanamekar, Desa Cikadu, Desa Purwasari dan Desa Sukaraharja termasuk ke dalam kelompok desa dengan tingkat sentralitas rendah.

TABEL V.1.
KELOMPOK DESA MENURUT TINGKAT SENTRALITAS

NO	TINGKAT SENTRALITAS	INDEKS FUNGSI	DESA
1	Tinggi	36.27 – 49.05	Cisayong
2	Sedang	23.47 – 36.26	Jatihurip
3	Rendah	10.67 – 23.46	Sukasetia, Santanamekar, Cikadu, Purwasari, Sukaraharja

Sumber: Hasil Analisis, 2004

TABEL V.2
JUMLAH DAN JENIS FASILITAS DI KECAMATAN CISAYONG

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK	FASILITAS																					
			PENDIDIKAN			KESEHATAN				PEREKONOMIAN					PERHUBUNGAN			KTR. INSTANSI		KEAGAMAAN				
			SD	SLTP	SLTA	PUSKESMAS	POSYANDU	DOKTER PRAKTEK	BIDES	BANK	KOPERASI	PASAR	TOKO	KIOS	TERMINAL	ANGKUM RODA 4	ANGKUM RODA 2	KECAMATAN	DESA	MAPOLSEK	KUA	MASJID	LANGGAR	MUSHOLLA
1	CISAYONG	5.079	2	1	0	1	5	1	1	1	1	1	18	107	1	25	50	1	1	1	1	9	7	20
2	SANTANAMEKAR	3.206	4	0	0	0	5	0	1	0	0	2	42	0	0	28	0	0	1	0	0	8	17	0
3	CIKADU	2.362	1	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	13	0	2	25	0	1	0	0	6	3	17
4	SUKASETIA	5.135	3	0	0	0	6	0	1	0	0	1	26	0	7	46	0	0	1	0	0	8	31	6
5	PURWASARI	3.370	2	0	0	0	4	0	0	0	0	1	10	0	3	10	0	0	1	0	0	6	19	0
6	SUKARAHARJA	4.108	3	0	0	0	4	0	1	0	0	4	32	0	4	18	0	0	1	0	0	15	8	0
7	JATIHURIP	2.372	2	1	1	0	3	0	1	0	1	1	15	25	0	21	83	0	1	0	0	4	3	17

TABEL V.2
PERHITUNGAN INDEKS SENTRALITAS TERBOBOT

NO	DESA	J U M L A H P D D K	JENIS FASILITAS																J U M L A H	n d e k s F u n g s i								
			PENDIDIKAN				KESEHATAN				PEREKONOMIAN				PERHUB.						KT. INSTANSI				KEAGAMAAN			
			S D	S L T P A	S L T A	S L T A	P U S K E S M A S	P O S Y A N D	D O K T E R	B I D E S K	B A N K	K O P E R A S I	P A S A R	T O K O	K I O S	T E R M I N A L	A N G K U M R 4	A N G K U M R 2			K E C A M A T A N	D E S A	M A P O L S E K	K U A	M A S J I D	L A N G G A R	M U S H O L L A	
1	CISAYONG	5.079	2	1	0	1	5	1	1	1	1	1	1	18	107	1	25	50	1	1	1	1	9	7	20	255	49,05	
2	SANTANAMEKAR	3.206	4	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	2	42	0	0	28	0	1	0	0	8	17	0	108	17,29	
3	CIKADU	2.362	1	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	13	0	2	25	0	1	0	0	6	3	17	73	14,83	
4	SUKASETA	5.135	3	0	0	0	6	0	1	0	0	0	1	26	0	7	46	0	1	0	0	8	31	6	136	16,9		
5	PURWASARI	3.370	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	10	0	3	10	0	1	0	0	6	19	0	56	10,67		
6	SUKARAHARJA	4.108	3	0	0	0	4	0	1	0	0	0	4	32	0	4	18	0	1	0	0	15	8	0	88	14,13		
7	JATHURIP	2.372	2	1	1	0	3	0	0	1	0	1	15	25	0	21	83	0	1	0	0	4	3	17	179	25,27		
TOTAL FUNGSI			17	2	2	1	30	1	6	1	2	2	17	255	1	62	260	1	7	1	1	56	88	60	895			
TOTAL SENTRALITAS			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
NILAI BOBOT			5,9	50	50	100	3,3	100	17	100	50	50	5,9	0,4	100	1,6	0,4	100	14	100	100	1,8	1,1	1,7				

5.1.2. Aksesibilitas dan Jarak Antar Pusat

Aksesibilitas suatu daerah menentukan tingkat sentralitas daerah tersebut, semakin mudah dicapai suatu daerah akan semakin tinggi tingkat pelayanan daerah tersebut yang berarti daerah semakin bersifat kota. Menurut Bintarto (1987; 61) dengan adanya kemajuan di bidang perhubungan dan lalu lintas, maka sifat isolasi desa berangsur-angsur berkurang yang mengakibatkan terjadinya interaksi antara desa dengan kota. Sehingga bisa dikatakan semakin tinggi aksesibilitas suatu desa, akan semakin mudah desa tersebut dipengaruhi ciri-ciri kota, baik secara fisik maupun non fisik (sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya).

Dari ketujuh desa dalam lingkup penelitian bisa dilihat bahwa Desa Jatihurip mempunyai aksesibilitas paling tinggi. Hal ini dimungkinkan karena letak Desa Jatihurip yang berada di persimpangan antara Jalan Propinsi (Jalur Lintas Selatan) dengan Jalan Kabupaten menuju desa-desa lainnya di Kecamatan Cisayong, sehingga bisa dikatakan Desa Jatihurip merupakan pintu gerbang Kecamatan Cisayong. Desa Jatihurip dicapai dari Kota Tasik dan Bandung dengan banyak moda angkutan seperti bis, minibis dan angkutan pedesaan.

Desa-desa yang dilalui oleh jalan kabupaten dikategorikan sebagai desa yang mempunyai aksesibilitas sedang. Desa Cisayong, Desa Sukaraharja dan Desa Sukasetia yang dilalui jalan kabupaten dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan umum roda empat jenis angkutan pedesaan (rute Tasik – Cisayong dan Tasik – Cisayong – Sukahening).

Desa Cikadu, Desa Purwasari dan Desa Santanamekar termasuk ke dalam katagori sebagai desa dengan aksesibilitas rendah, karena hanya dilalui oleh jalan desa. Desa Cikadu dan Desa Purwasari bisa dicapai dengan menggunakan kendaraan umum roda empat yang

sangat terbatas, Cikadu 2 (dua) mobil angkutan sedangkan Desa Purwasari 3 (tiga) mobil angkutan. Desa Santanamekar hanya dapat dicapai dengan kendaraan umum berupa ojek dari pangkalan di Desa Cisayong dan Sukasetia.

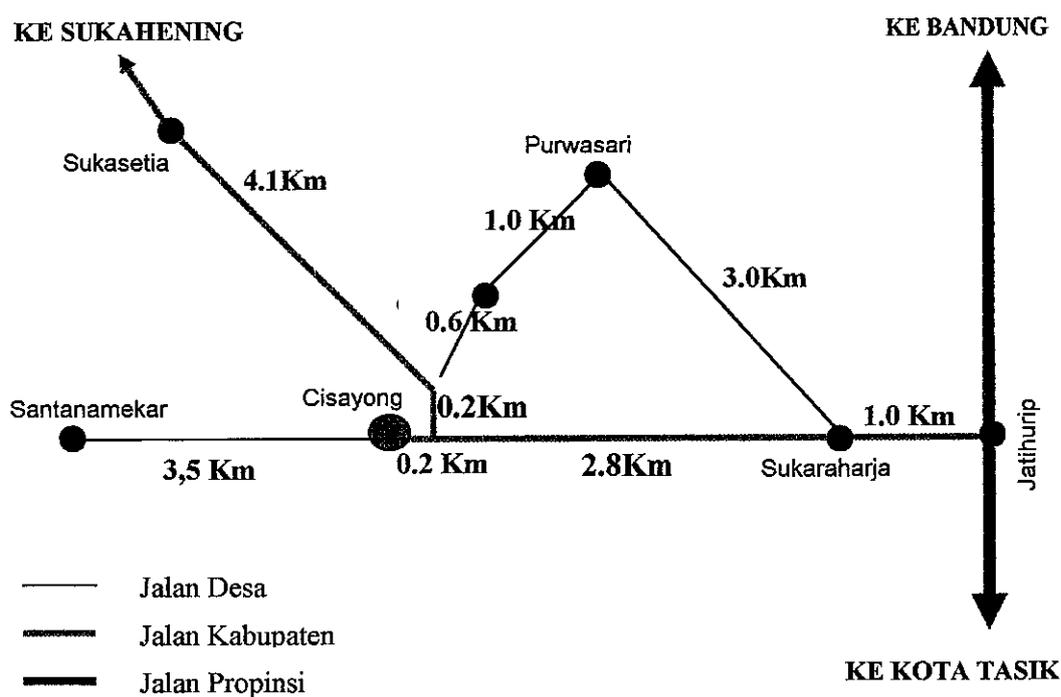
Jarak suatu pusat dari pusat lainnya mempengaruhi interaksi antar pusat dan tingkat pelayanan suatu pusat. Semakin dekat jarak suatu pusat dari pusat yang lebih tinggi hirarkinya, semakin tinggi tingkat pengaruh yang didapat. Sedangkan semakin dekat jarak suatu pusat terhadap pusat yang memiliki tingkat pelayanan yang lebih tinggi, semakin rendah tingkat pelayanan pusat daerah tersebut, karena pelayanan publiknya telah terlayani oleh pusat dengan tingkat pelayanan yang lebih tinggi.

TABEL V.4.
JARAK ANTAR PUSAT

KE DARI	CISAYONG	SANTANAMEKAR	SUKASETIA	CIKADU	PURWASARI	JATIHURIP	SUKARAHARJA
CISAYONG	0	3,50	4,50	1,00	2,00	4,00	3,00
SANTANAMEKAR	3,50	0	8,00	4,50	5,50	7,50	7,00
SUKASETIA	4,50	8,00	0	4,7	5,7	9,1	8,1
CIKADU	1,00	4,50	4,7	0	1,00	4,00	3,50
PURWASARI	2,00	5,00	5,7	1,00	0	3,00	3,00
JATIHURIP	4,00	7,50	9,1	4,00	3,00	0	1,00
SUKARAHARJA	3,50	7,00	8,1	4,00	3,00	1,00	0

Sumber: Hasil Analisis, 2004

Dari Tabel IV.4. dapat dilihat bahwa jarak antar pusat terjauh adalah antara Desa Jatihurip – Desa Sukasetia (9,10 Km), sedangkan jarak terdekat adalah antara Desa Cisayong – Desa Cikadu (1,00 Km) dan antara Desa Cikadu – Desa Purwasari (1,00 Km)



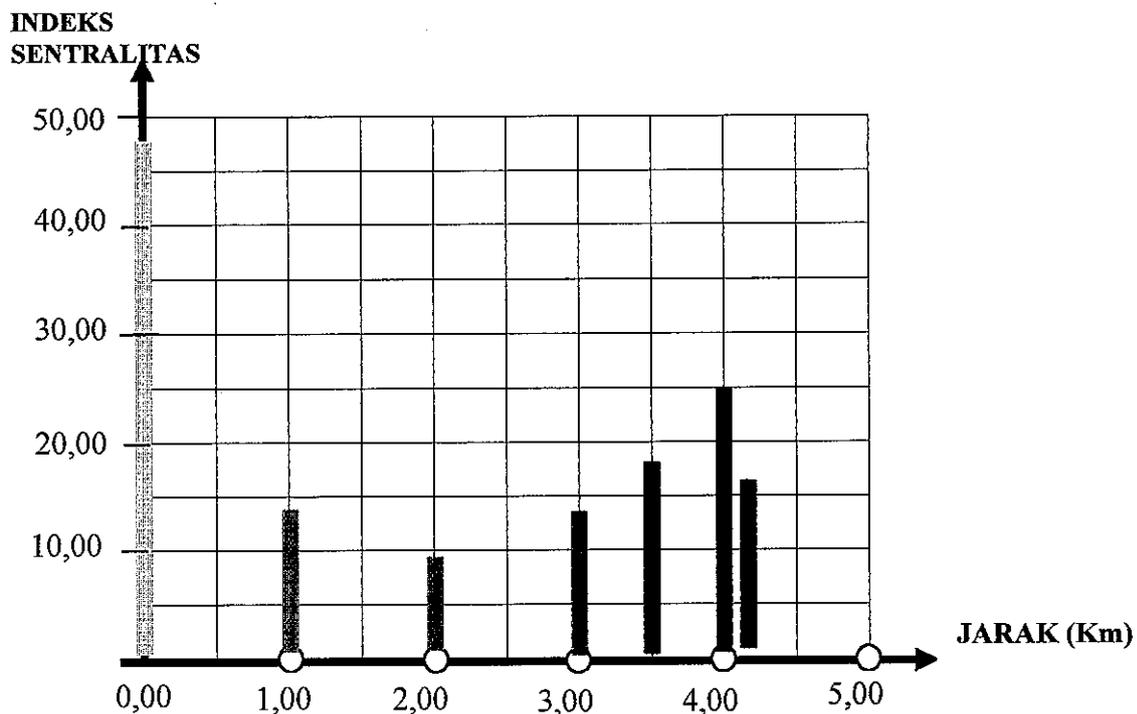
GAMBAR 5.2.
AKSES DAN JARAK ANTAR PUSAT

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2004

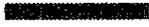
Dari Tabel V.1 dan Gambar 5.2. dapat dilihat kelompok pusat-pusat desa yang berdekatan. Kelompok pertama Cisayong, Cikadu, Purwasari dan Santanamekar. Kelompok kedua Jatihurip dan Sukaraharja, sedangkan Desa Sukasetia menjadi kelompok tersendiri. Desa Santanamekar termasuk kelompok pertama karena tidak ada akses masuk lain selain melalui Desa Cisayong.

5.1.3. Analisis Tingkat Sentralitas diperbandingkan dengan Jarak Dari Pusat Pelayanan

Secara teoritis, jarak mempengaruhi pengaruh suatu pusat terhadap pusat lainnya. Semakin jauh jarak suatu pusat dari pusat yang lebih tinggi tingkat sentralitasnya maka semakin rendah pengaruh pusat yang lebih tinggi tingkat sentralitasnya terhadap pusat tersebut.



KETERANGAN :

	Cisayong		Sukaraharja		Jatihurip
	Cikadu		Santanamekar		Sukasetia
	Purwasari				

GAMBAR 5.3.
GRAFIK TINGKAT SENTRALITAS
BERBANDING JARAK DARI PUSAT PELAYANAN

Sumber: Hasil Analisis, 2004

Berdasarkan hasil analisis tingkat sentralitas di Kecamatan Cisayong diketahui bahwa Desa Cisayong memiliki tingkat sentralitas tertinggi dibandingkan dengan keenam desa lainnya. Sehingga bisa dikatakan Desa Cisayong merupakan pusat pelayanan.

Dari gambar 5.3. dapat dilihat ada kecenderungan semakin menjauh dari pusat semakin rendah tingkat sentralitas, tetapi pada jarak tertentu tingkat sentralitasnya kembali cenderung naik. Hal ini dikarenakan adanya pusat pelayanan lain untuk mengurangi kendala jarak tersebut.

5.1.4. Analisis Kependudukan

Berdasarkan beberapa definisi mengenai kota dan desa, perbedaan desa dan kota dapat dilihat dari segi kependudukan, seperti jumlah, kepadatan serta mata pencaharian penduduk. Kota juga dicirikan memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak dalam wilayah relatif lebih sempit (kepadatan tinggi) serta mata pencaharian penduduknya di bidang non-agraris. Sebaliknya desa dicirikan memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit dalam wilayah relatif lebih luas (kepadatan rendah) serta mata pencaharian penduduknya di bidang agraris.

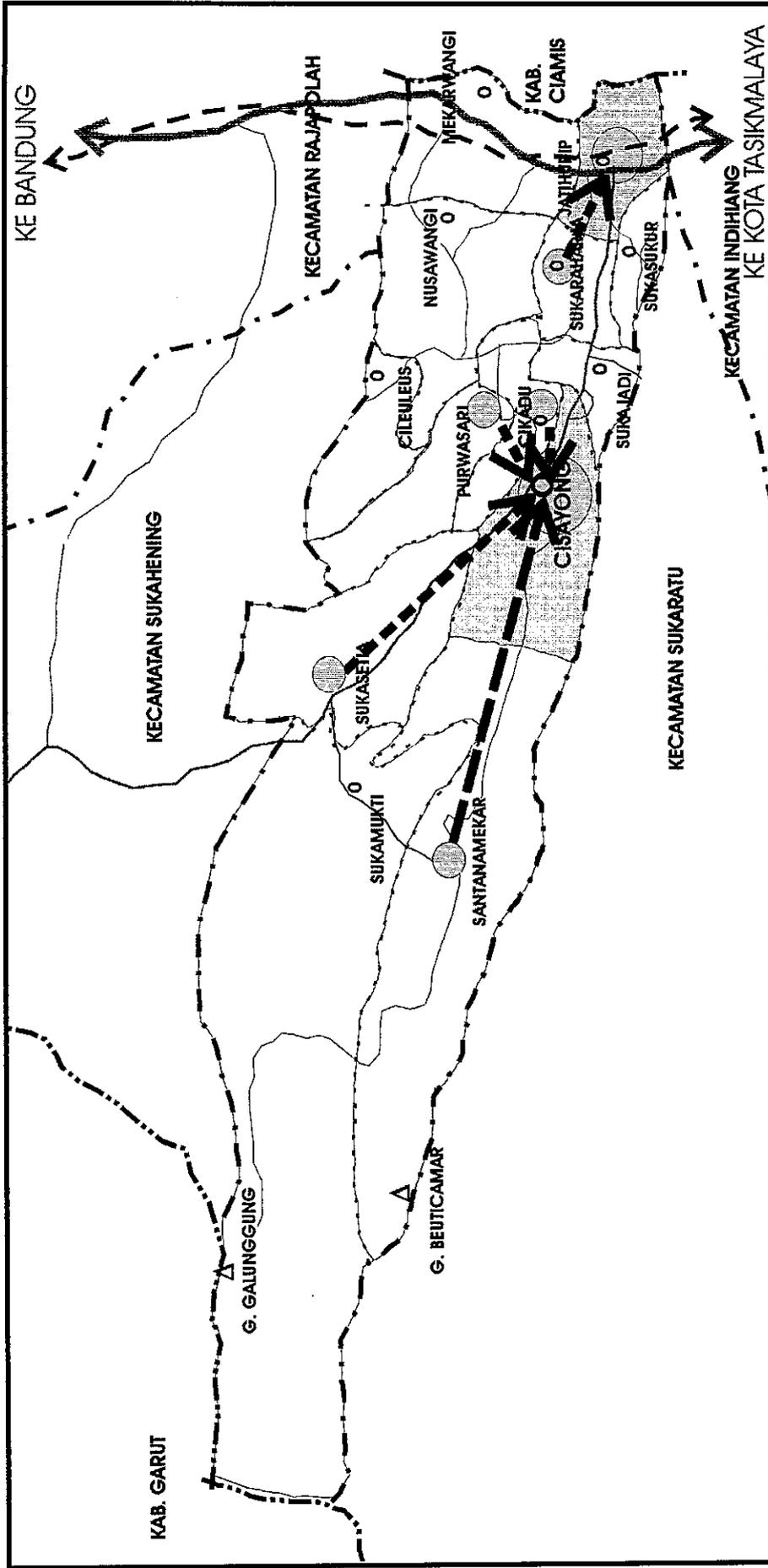
Dari ketujuh desa dalam lingkup penelitian, desa yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Desa Cisayong (23.73%), Desa Jatihurip (23.73%) dan Desa Sukaraharja (23.32%). Desa dengan kepadatan sedang adalah Desa Cikadu (16.75%) dan Desa Purwasari (12.52%). Sedangkan desa dengan kepadatan rendah adalah Desa Sukasetia (8.54%) dan Desa Santanamekar (2.93%).

TABEL V.2.
JUMLAH, KEPADATAN DAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK (Orang)	KEPADATAN PENDUDUK (Orang/ Ha)	MATA PENCAHARIAN			
				AGRARIS		NON-AGRARIS	
				Org	%	Org	%
1.	Cisayong	5.079	23.73	1.827	72,33	599	17,87
2.	Santanamekar	3.206	2.93	3.209	95.79	141	3,21
3.	Sukasetia	5.135	8.54	2.456	93.53	170	6,47
4.	Cikadu	2.362	16.75	935	84.74	196	15,26
5.	Purwasari	3.370	12.52	1.313	94.73	75	5,27
6.	Jatihurip	2.372	23.73	230	32.67	474	67,33
7.	Sukaraharja	4.108	23.32	678	80.05	169	19,95

Sumber: Data Sekunder, diolah 2004

Desa yang memiliki jumlah penduduk yang mata pencaharian penduduknya di bidang non agraris banyak adalah Desa Cisayong (599 orang) dan Desa Jatihurip (474 orang). Jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian di bidang non agraris di desa-desa lainnya relatif sedikit.




 PROGRAM PASCA SARJANA
 MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH DAN KOTA
 UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS
 HUBUNGAN SENTRALITAS DENGAN
 BENTUK DAN TINGKAT PARTISIPASI
 MASYARAKAT PADA PROYEK PZMPD
 DI KEC. CISAYONG KAB. TASIKMALAYA

**PETA TINGKAT SENTRALITAS
 KECAMATAN CISAYONG**

LEGENDA

	Jalan Kabupaten		Jalur Kereta
	Jalan Desa		Jalan Propinsi
	Batas Kabupaten		Tingkat Sentralitas Rendah
	Batas Kecamatan		Tingkat Sentralitas Sedang
			Tingkat Sentralitas Tinggi

Sumber :
BAPEDA KABUPATEN TASIK MALAYA

SKALA	
NUMERIK	
GARIS	

Gbr 5.4 82

UTARA	NO. PETA HALAMAN

Tahun Pembuatan :
2003

5.2 Analisis Peran Serta Masyarakat di Kecamatan Cisayong

5.2.1 Bentuk Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat khususnya dalam pada proyek P2MPD dapat dilihat dari bentuk peran sertanya pada berbagai tingkatan pelaksanaan proyek tersebut. Menurut Duselldorp (dalam Slamet 1994 : 10) bahwa suatu kegiatan peran serta dapat diidentifikasi dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk peran serta yang ada dapat berupa keikutsertaan masyarakat dalam menyumbangkan pikiran, uang, material dan tenaga serta bentuk peran serta lainnya.

5.2.1.1. Bentuk Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong Dilihat Dari Sifat Kehadiran dalam Rembug Desa

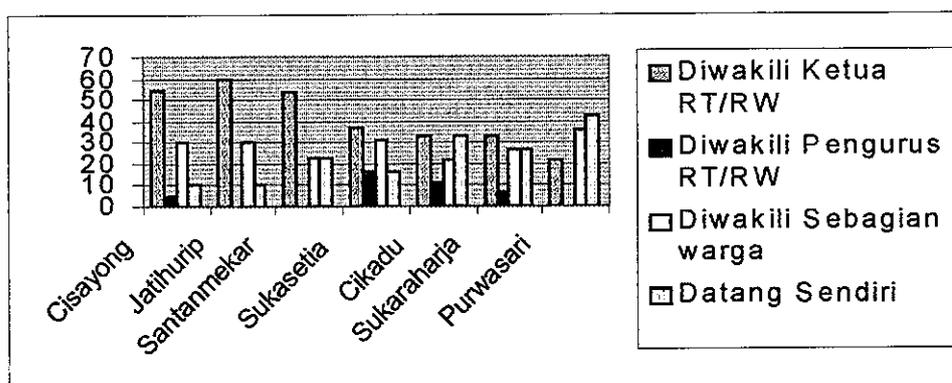
Untuk merencanakan dan mempersiapkan proyek P2MPD di Kecamatan Cisayong, bentuk sumbangan pemikiran dapat dilakukan melalui rembug desa. Peran serta dalam bentuk rembug desa di Kecamatan Cisayong dilakukan secara berbeda-beda. Di desa Cisayong, dari seluruh responden yang lebih senang datang sendiri dalam kegiatan rembug desa ada 10% yang lebih memilih diwakili oleh sebagian warga ada 30%, yang diwakilkan kepada pengurus RT/RW ada 5%, sedangkan yang memilih cukup diwakili oleh ketua RT/RW ada 55%.

Keterlibatan masyarakat Desa Jatihurip pada proyek P2MPD dilakukan dalam bentuk kehadirannya dalam kegiatan rembug desa ada 10% responden yang datang sendiri. Responden yang memilih diwakili oleh sebagian warga ada 30%, sedangkan yang merasa cukup diwakili oleh pengurus RT/RW ada 60%.

Keterlibatan masyarakat Desa Santanamekar pada kehadirannya dalam kegiatan rembug desa ada 53,83% responden yang datang sendiri. Responden yang memilih diwakili oleh sebagian warga ada 23,07%, Sementara, 23,07% responden merasa cukup

diwakili oleh Ketua RT/RW. Tidak ada sedangkan yang merasa cukup diwakili oleh pengurus RT/RW.

Dari seluruh responden Di Desa Sukasetia, yang lebih senang datang sendiri dalam kegiatan rembug desa ada 36,82%, yang lebih memilih diwakili oleh sebagian warga ada 31,56%, yang diwakilkan kepada pengurus RT/RW ada 15,78%. Sedangkan warga yang memilih cukup diwakili oleh ketua RT/RW ada 36,82%.



GAMBAR 5.5.

PERAN SERTA MASYARAKAT KECAMATAN CISA YONG DILIHAT DARI SIFAT KEHADIRAN DALAM REMBUG DESA

Sumber: Hasil Analisis, 2004

Keterlibatan masyarakat Desa Cikadu pada proyek P2MPD dilakukan dalam bentuk kehadirannya dalam kegiatan rembug desa ada 33,33% responden yang datang sendiri. Responden yang memilih diwakili oleh sebagian warga ada 22,22%, sedangkan yang merasa cukup diwakili oleh pengurus RT/RW ada 11,11%. Sisanya, 33,33% responden memilih diwakili oleh Ketua RT/RW.

Keterlibatan masyarakat Desa Sukaraharja pada proyek P2MPD dilakukan dalam bentuk kehadirannya dalam kegiatan rembug desa ada 26,64% responden yang datang sendiri. Responden yang memilih diwakili oleh sebagian warga ada 26,64%, sedangkan yang merasa cukup diwakili oleh pengurus RT/RW ada 6,66%. Responden yang mewakilkan kehadirannya oleh Ketua RT/RW berjumlah 33,30%.

Keterlibatan masyarakat Desa Purwasari pada proyek P2MPD dilakukan dalam bentuk kehadirannya dalam kegiatan rembug desa ada 42,82% responden yang datang sendiri. Responden yang memilih diwakili oleh sebagian warga ada 35,7%. Responden yang memilih diwakili oleh Ketua RT/RW ada 21,42%. Tidak ada yang merasa cukup diwakili oleh pengurus RT/RW.

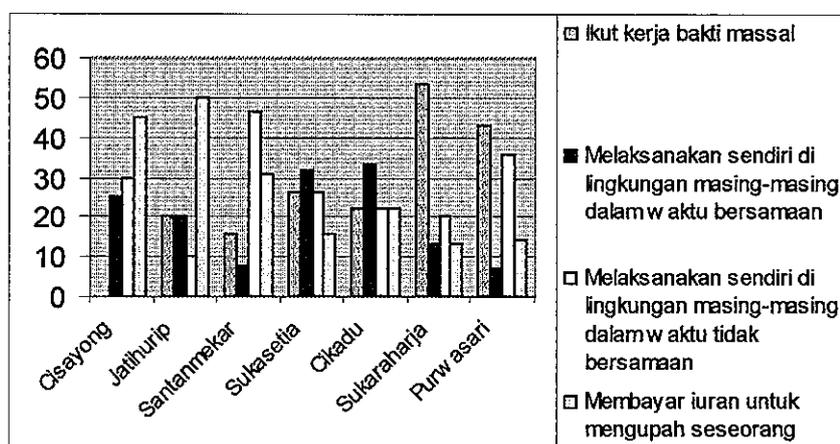
5.2.1.2 Bentuk Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong Dilihat Dari Kegiatan Fisik

Pada tahap pelaksanaan proyek P2MPD, bentuk kegiatan yang dipilih sebagian besar warga Desa Cisayong adalah dalam bentuk membayar iuran yaitu ada 45%. Responden yang lebih senang melakukannya sendiri sendiri di lingkungan masing-masing tetapi tidak pada waktu yang sama ada 30%. Responden yang memilih melakukan kegiatan tersebut secara bersama-sama di lingkungan tempat tinggal masing-masing ada 25%. Sementara, tidak ada yang memilih melakukannya dalam bentuk kerja bakti massal.

Bentuk peran serta Responden di Desa Jatihurip dalam tahap pelaksanaan kegiatan proyek ini, 20% responden memilih melakukannya dengan kerja bakti massal. Ada 20% yang memilih melakukan sendiri-sendiri di lingkungan masing-masing pada waktu bersamaan, dan ada 10% yang memilih melakukan sendiri-sendiri namun tidak dalam waktu yang bersamaan. Hanya ada 50% yang memilih membayar iuran untuk mengupah seseorang.

Bentuk peran serta dalam tahap pelaksanaan kegiatan proyek ini, 15,38% responden di Desa Santanamekar memilih melakukannya dengan kerja bakti massal. Ada 7,69% yang memilih melakukan sendiri-sendiri di lingkungan masing-masing pada waktu bersamaan, dan ada 46,14% yang memilih melakukan sendiri-sendiri namun tidak dalam

waktu yang bersamaan. Ada 30,76% yang memilih membayar iuran untuk mengupah seseorang.



GAMBAR 5.6.
BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT KECAMATAN CISAYONG
DILIHAT DARI KEGIATAN FISIK

Sumber: Hasil Analisis 2004

Pada tahap pelaksanaan proyek P2MPD, di Desa Sukasetia yang memilih dalam bentuk membayar iuran yaitu ada 15,78%. Jumlah responden yang lebih senang melakukannya sendiri-sendiri di lingkungan masing-masing tetapi tidak pada waktu yang sama ada 26,30%. Responden yang memilih melakukan kegiatan tersebut secara bersamaan di lingkungan tempat tinggal masing-masing ada 31,56%. Sementara sisanya ada 26,30% yang memilih melakukannya dalam bentuk kerja bakti massal.

Di Desa Cikadu bentuk peran serta dalam tahap pelaksanaan kegiatan proyek ini, 22,22% responden memilih melakukannya dengan kerja bakti massal. Ada 33,33% yang memilih melakukan sendiri-sendiri di lingkungan masing-masing pada waktu bersamaan, dan ada 22,22% yang memilih melakukan sendiri-sendiri namun tidak dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan yang memilih membayar iuran untuk mengupah seseorang ada 22,22% responden.

Bentuk peran serta responden di Desa Sukaraharja dalam tahap pelaksanaan kegiatan proyek ini, 53,28% responden memilih melakukannya dengan kerja bakti massal. Ada 13,32% yang memilih melakukan sendiri-sendiri di lingkungan masing-masing pada waktu bersamaan, dan ada 19,98% yang memilih melakukan sendiri-sendiri namun tidak dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan yang memilih membayar iuran untuk mengupah seseorang ada 13,32%

Bentuk peran serta responden di Desa Purwasari dalam tahap pelaksanaan kegiatan proyek ini, 42,86% responden memilih melakukannya dengan kerja bakti massal. Ada 7,14% yang memilih melakukan sendiri-sendiri di lingkungan masing-masing pada waktu bersamaan, dan ada 35,70% yang memilih melakukan sendiri-sendiri namun tidak dalam waktu yang bersamaan. Hanya ada 14,28% yang memilih membayar iuran untuk mengupah seseorang.

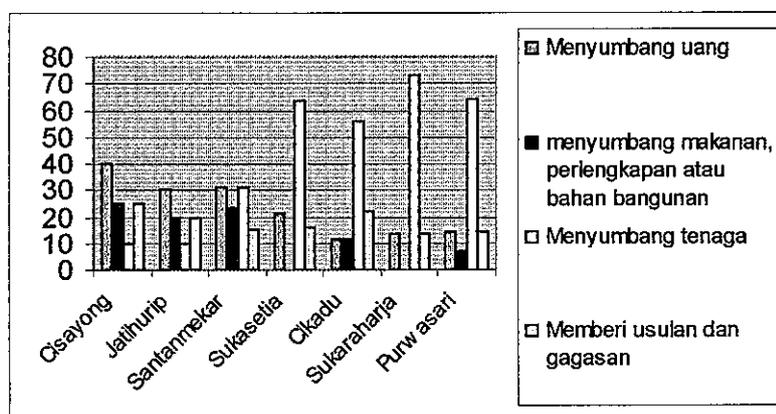
5.2.1.3. Bentuk Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong Dilihat Dari Cara Ikut Serta Dalam Kegiatan

Pada tahap pelaksanaan proyek P2MPD, cara yang dipilih sebagian besar warga Desa Cisayong adalah dalam bentuk membayar iuran yaitu ada 40%. Dalam pelaksanaan proyek P2MPD di Cisayong, 25% responden yang memilih memberikan sumbangan dalam bentuk usulan dan gagasan, sedangkan 10% responden memilih menyumbang tenaga. Ada 40% responden lebih memilih menyumbang dalam bentuk uang. Peran serta dalam bentuk sumbangan ini tidak dimaksudkan untuk mengganti keterlibatannya dalam pelaksanaan kegiatan proyek.

Di desa Santanamekar, 30,76% lebih memilih menyumbang dalam bentuk uang, 23,07% lebih memilih menyumbang makanan bahan bangunan dan perlengkapan, 730,76% lebih memilih menyumbangkan tenaga serta 15,36% responden memilih

memberi usulan. Di desa Cikadu, 11,11% lebih memilih menyumbang uang, 11,11% lebih memilih menyumbang makanan, perlengkapan dan bahan bangunan, 55,55% lebih memilih menyumbang tenaga, dan 22,22% lebih memilih memberikan usulan dan gagasan.

Warga di desa Sukasetia, 21,04% lebih memilih menyumbang uang, tidak ada yang memilih menyumbang makanan, perlengkapan dan bahan bangunan, sedangkan yang menyumbang tenaga ada 63,12%, dan 15,78% responden lebih memilih memberikan usulan dan gagasan. Di desa Purwasari, 14,28% lebih memilih menyumbang uang, 7,14% lebih memilih menyumbang makanan, perlengkapan dan bahan bangunan, 64,26% lebih memilih menyumbang tenaga, dan ada 14,28 % lebih memilih memberikan usulan atau gagasan. Responden di Desa Sukaraharja, 13,32% lebih memilih menyumbang uang, tidak ada responden yang memilih menyumbang makanan, perlengkapan dan bahan bangunan, responden yang memilih menyumbang tenaga ada 63,12, dan ada 13,33% lebih memilih memberikan usulan. Di Desa Jatihurip, 30% lebih memilih menyumbang uang, 20% lebih memilih menyumbang makanan, perlengkapan dan bahan bangunan, 10% lebih memilih menyumbang tenaga, dan 20 responden yang memberikan usulan atau gagasan.



GAMBAR 5.7.
BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT KECAMATAN CISAYONG DILIHAT
DARI CARA IKUT SERTA DALAM KEGIATAN

Sumber: Hasil Analisis, 2004

5.2.1.4. Bentuk Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong Dilihat dari Frekuensi

Berkumpul

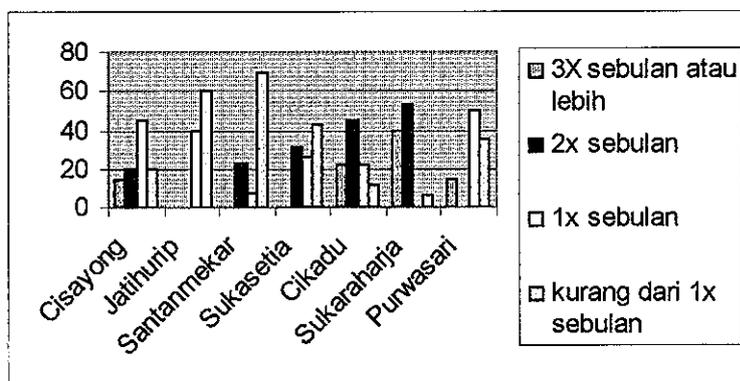
Responden di Desa Cisayong berdasarkan frekuensi kegiatan bersama yang telah dilakukan maka sebagian besar responden yang melakukannya 3 kali dalam sebulan ada 15%, yang melakukannya 2 kali sebulan ada 20%, yang melakukannya 1 kali dalam sebulan ada 45%. Hanya ada 20% responden yang melakukannya kurang dari sebulan sekali.

Di Santanamekar, frekuensi sebagian responden dalam berkumpul bersama warga dalam suatu kegiatan bersama tidak ada responden yang rutin 3 kali sebulan mengikuti pertemuan, 23,07% yang melakukan kegiatan tersebut 2 kali dalam sebulan, 7,69% melakukannya 1 kali dalam sebulan, dan ada 69,21% responden yang melakukannya kurang dari sekali dalam sebulan.

Frekuensi sebagian responden di Cikadu, dalam berkumpul bersama warga dalam suatu kegiatan bersama cukup tinggi yaitu ada 22,22% yang melakukannya 3 kali sebulan, ada 44,44% yang melakukan kegiatan tersebut 2 kali dalam sebulan, 22,22% melakukannya 1 kali dalam sebulan, dan hanya ada 11,11% yang melakukannya kurang dari sekali dalam sebulan.

Di Sukasetia, frekuensi kegiatan bersama yang telah dilakukan responden tidak ada yang melakukannya 3 kali sebulan, yang melakukannya 2 kali sebulan ada 31,56%, yang melakukan 1 kali dalam sebulan ada 26,30%. Sedangkan responden yang melakukannya kurang dari sebulan sekali ada 42,08%. Responden di Purwasari, frekuensi sebagian responden dalam berkumpul bersama warga dalam suatu kegiatan bersama adalah 14,28% responden melakukannya 3 kali sebulan, 49,98% yang melakukan kegiatan tersebut sebulan sekali. Dan ada 35,70% yang melakukannya kurang dari sebulan.

Frekuensi sebagian responden di Desa Sukaraharja dalam berkumpul bersama warga dalam suatu kegiatan bersama yaitu ada 39,96% yang melakukan kegiatan tersebut 3 kali sebulan, 53,28% responden yang melakukannya 2 kali dalam sebulan, tidak ada yang melakukannya 1 kali dalam sebulan, dan hanya ada 6,67% yang melakukannya kurang dari sekali dalam sebulan. Frekuensi sebagian responden di Desa Jatihurip dalam berkumpul bersama warga dalam suatu kegiatan bersama rendah yaitu ada 40% yang melakukannya 1 kali dalam sebulan dan 60% yang melakukannya kurang dari sekali dalam sebulan. Tidak ada responden yang melakukan kegiatan tersebut 3 kali dan 2 kali dalam sebulan,



Gambar 5.8.

BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT KECAMATAN CISAYONG DILIHAT DARI FREKUENSI BERKUMPUL

Sumber: Hasil Analisis 2004

5.2.1.5. Bentuk Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong Dilihat dari Rutinitas

Kegiatan

Kegiatan bersama itu dilakukan secara rutin dengan waktu dan tempat yang tidak sama, ataupun dengan waktu dan tempat yang sama. Di Cisayong kegiatan berkumpul tersebut dilakukan secara terjadwal dan rutin dengan waktu dan tempat yang sama tidak ada. Ada 10% responden yang mengikuti kegiatan rutin namun dengan waktu yang sama

dengan tempat yang berbeda atau tempat sama dan waktu berbeda. Ada yang melakukannya secara rutin, tapi waktu dan tempat tidak tetap 45%, sedangkan yang melakukannya dengan jadwal yang tidak rutin sesuai kebutuhan sebanyak 45%.

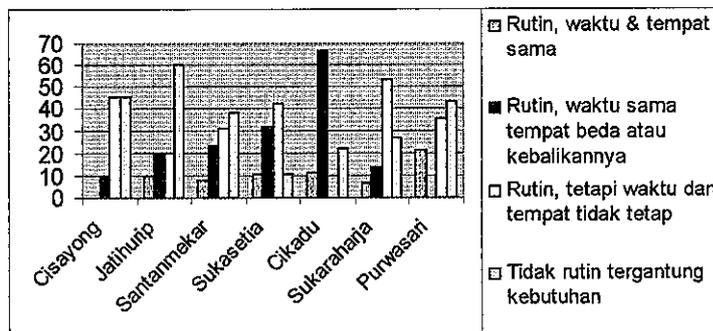
Di Santanamekar, kegiatan berkumpul dilakukan secara terjadwal dan rutin ada 7,69% dengan waktu dan tempat yang sama, rutin namun dengan waktu yang sama dengan tempat yang berbeda atau tempat sama dan waktu berbeda sebanyak 23,07%. Ada yang melakukannya secara rutin, tapi waktu dan tempat tidak tetap 30,76%, sedangkan yang tidak rutin ada 38,45%.

Kegiatan berkumpul di Cikadu dilakukan secara terjadwal dan rutin dengan waktu dan tempat yang sama ada 11,11%, ada yang melakukannya secara rutin, tapi waktu dan tempat tidak tetap sebanyak 66,66%, ada juga yang tidak rutin sebanyak 22,22%. Di Sukasetia, responden yang mengikuti kegiatan bersama secara rutin dengan waktu dan tempat yang sama ada 10,53%, rutin dengan tempat atau waktu tidak sama ada 42,08%, ataupun dengan waktu dan tempat yang sama ada 31,56%. Sedangkan yang tidak rutin ada 10,52%.

Kegiatan berkumpul di Purwasari yang dilakukan secara terjadwal dan rutin dengan waktu dan tempat yang sama ada 21,42%, rutin namun dengan waktu yang sama dengan tempat yang berbeda atau tempat sama dan waktu berbeda ada 35,71%, yang tidak rutin yaitu sebesar 42,84%.

Di Sukaraharja, kegiatan berkumpul dilakukan secara terjadwal dan rutin dengan waktu dan tempat yang sama ada 6,66%, rutin namun dengan waktu yang sama dengan tempat yang berbeda atau tempat sama dan waktu berbeda ada 13,32%. Ada yang melakukannya secara rutin, tapi waktu dan tempat tidak tetap 53,28%, ada juga yang tidak rutin 26,64%.

Kegiatan berkumpul warga desa Jatihurip yang dilakukan secara terjadwal dan rutin dengan waktu dan tempat yang sama sebanyak 10%, rutin namun dengan waktu yang sama dengan tempat yang berbeda atau tempat sama dan waktu berbeda 20%. Ada yang melakukannya secara rutin 20%, tapi waktu dan tempat tidak tetap, ada juga yang tidak rutin 60%.



GAMBAR 5.9.
BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT KECAMATAN CISAYONG DILIHAT
DARI RUTINITAS KEGIATAN

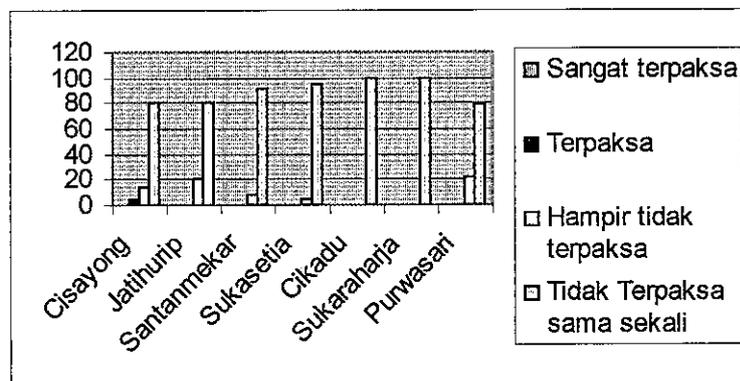
Sumber: Hasil Analisis 2004

5.2.1.6. Bentuk Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong dilihat dari Derajat

Kesukarelaan

Keterlibatan warga dalam kegiatan-kegiatan P2MPD di Cisayong ada yang merasa terpaksa (5%), yang hampir tidak terpaksa 15% dan yang tidak terpaksa 85%. Di Santanmekar, dalam melakukan berbagai bentuk kegiatan tersebut, 92,31% responden melakukannya dengan tidak merasa terpaksa sama sekali, 7,69% mengaku hampir tidak terpaksa. Di Cikadu, dalam melakukan berbagai bentuk kegiatan tersebut, 100% responden melakukannya dengan tidak merasa terpaksa sama sekali. Keterlibatan warga dalam kegiatan-kegiatan P2MPD di Sukasetia hampir tidak ada unsur keterpaksaan. Hanya ada 5,26% dari responden yang mengaku hampir terpaksa, dan 94,74% melakukannya dengan sukarela.

Di Purwasari dalam melakukan berbagai bentuk kegiatan tersebut, 78,54% responden melakukannya dengan tidak merasa terpaksa sama sekali, 21,56% mengaku hampir tidak terpaksa. Di Sukaraharja Dalam melakukan berbagai bentuk kegiatan tersebut, 100% responden melakukannya dengan tidak merasa terpaksa sama sekali. Di Jatihurip, dalam melakukan berbagai bentuk kegiatan tersebut, ada 80% yang merasa melakukannya dengan sukarela dan 20% sisanya hampir merasa tidak terpaksa.



GAMBAR 5.10.
BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT KECAMATAN CISAYONG DILIHAT
DARI DERAJAT KESUKARELAAN

Sumber: Hasil Analisis 2004

Secara keseluruhan, bentuk peran serta masyarakat Kecamatan Cisayong dapat dilihat pada Tabel V.6 berikut ini:

TABEL V.6
BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT KECAMATAN CISAYONG
DALAM PROYEK P2MPD TAHUN 2002

No	Bentuk Peran Serta	Skala Penilaian	DESA													
			Cisayong		Santanmeka		Cikadu		Sukaseta		Purwasari		Sukaraharja		Jatihurip	
			Fre	%	Fre	%	Fre	%	Fre	%	Fre	%	Fre	%	Fre	%
1	Kehadiran dalam Rembug desa	<input type="checkbox"/> Diwakili ketua RT/RW <input type="checkbox"/> Diwakili Pengurus RT/RW <input type="checkbox"/> Diwakili sebagian warga <input type="checkbox"/> Datang sendiri	11	55	7	53,84	3	33,33	7	36,84	2	10,53	5	33,33	1	10
		<input type="checkbox"/> Diwakili RT/RW <input type="checkbox"/> Diwakili sebagian warga <input type="checkbox"/> Datang sendiri	1	5	-	-	1	11,11	3	15,79	8	42,11	2	13,33	-	-
		<input type="checkbox"/> Diwakili sebagian warga <input type="checkbox"/> Datang sendiri	2	10	3	23,08	2	22,22	6	31,58	7	36,84	4	26,67	5	50
		<input type="checkbox"/> Datang sendiri	6	30	3	23,08	3	33,33	3	15,79	2	10,53	4	26,67	4	40
2	Keterlibatan dalam pelaksanaan	<input type="checkbox"/> Ikut kerja bakti masal <input type="checkbox"/> Melaksanakan sendiri di lingkungan masing-masing dalam waktu bersamaan <input type="checkbox"/> Melaksanakan sendiri-sendiri di lingkungan masing-masing tapi tidak dalam waktu yang sama <input type="checkbox"/> Membayar iuran untuk mengupah seseorang	-	-	1	7,69	-	-	-	-	-	-	2	13,33	1	10
		<input type="checkbox"/> Melaksanakan sendiri di lingkungan masing-masing dalam waktu bersamaan <input type="checkbox"/> Melaksanakan sendiri-sendiri di lingkungan masing-masing tapi tidak dalam waktu yang sama <input type="checkbox"/> Membayar iuran untuk mengupah seseorang	11	55	9	69,24	4	44,44	6	31,58	-	-	8	53,33	5	50
		<input type="checkbox"/> Melaksanakan sendiri-sendiri di lingkungan masing-masing tapi tidak dalam waktu yang sama <input type="checkbox"/> Membayar iuran untuk mengupah seseorang	-	-	1	7,69	3	33,33	8	42,11	1	5,26	2	13,33	2	20
		<input type="checkbox"/> Membayar iuran untuk mengupah seseorang	9	45	2	15,38	2	22,22	5	26,32	18	94,74	3	20	2	20
3	Cara ikut serta	<input type="checkbox"/> Menyumbang uang <input type="checkbox"/> Menyumbang makanan, pertengkapan atau bahan bangunan <input type="checkbox"/> Menyumbang tenaga <input type="checkbox"/> Memberikan usulan dan gagasan	4	20	1	7,69	2	22,22	1	5,26	2	10,53	2	13,33	3	30
		<input type="checkbox"/> Menyumbang makanan, pertengkapan atau bahan bangunan <input type="checkbox"/> Menyumbang tenaga <input type="checkbox"/> Memberikan usulan dan gagasan	16	80	11	84,62	4	44,44	17	89,47	8	42,11	11	73,33	5	50
		<input type="checkbox"/> Menyumbang tenaga <input type="checkbox"/> Memberikan usulan dan gagasan	-	-	1	7,69	1	11,11	-	-	7	36,84	-	-	2	20
		<input type="checkbox"/> Memberikan usulan dan gagasan	-	-	-	-	2	22,22	1	5,26	2	10,53	2	13,33	-	-

No	Bentuk Peran Serta	Skala Penilaian	DESA													
			Cisayong		Santana mekar		Cikadu		Sukaseta		Purwasari		Sukaraharja		Jatihurip	
			Fre	%	Fre	%	Fre	%	Fre	%	Fre	%	Fre	%	Fre	%
4	Berkumpul dengan warga melakukan kegiatan bersama	<input type="checkbox"/> 3 x sebulan atau lebih . <input type="checkbox"/> 2 x sebulan <input type="checkbox"/> 1 x sebulan <input type="checkbox"/> Kurang dari satu kali sebulan	3	15	9	69,23	1	11,11	8	42,11	-	-	1	6,67	6	60
		<input type="checkbox"/> 2 x sebulan <input type="checkbox"/> 1 x sebulan <input type="checkbox"/> Kurang dari satu kali sebulan	4	20	1	7,69	2	22,22	5	26,32	-	-	-	-	4	40
		<input type="checkbox"/> 3 x sebulan atau lebih . <input type="checkbox"/> 2 x sebulan <input type="checkbox"/> 1 x sebulan <input type="checkbox"/> Kurang dari satu kali sebulan	9	45	3	23,08	4	44,44	6	31,58	1	5,26	8	53,33	-	-
		<input type="checkbox"/> Kurang dari satu kali sebulan	4	20	-	-	2	22,22	-	-	18	94,74	6	40	-	-
5	Rutinitas kegiatan	<input type="checkbox"/> Rutin, dimana waktu dan tempat sama. <input type="checkbox"/> Rutin, dimana waktu sama dan tempat berbeda atau tempat sama dan waktu berbeda <input type="checkbox"/> Rutin, tetapi waktu dan tempat tidak tetap <input type="checkbox"/> Tidak rutin, tergantung kebutuhan.	9	45	5	38,46	2	22,22	2	10,53	6	42,86	4	26,67	5	50
		<input type="checkbox"/> Rutin, dimana waktu dan tempat sama. <input type="checkbox"/> Rutin, dimana waktu sama dan tempat berbeda atau tempat sama dan waktu berbeda <input type="checkbox"/> Rutin, tetapi waktu dan tempat tidak tetap <input type="checkbox"/> Tidak rutin, tergantung kebutuhan.	9	45	4	30,77	-	-	8	42,11	5	35,71	8	53,33	2	20
		<input type="checkbox"/> Rutin, tetapi waktu dan tempat tidak tetap <input type="checkbox"/> Tidak rutin, tergantung kebutuhan.	2	10	3	23,08	6	66,66	7	36,84	-	-	2	13,33	2	20
		<input type="checkbox"/> Rutin, tetapi waktu dan tempat tidak tetap <input type="checkbox"/> Tidak rutin, tergantung kebutuhan.	-	-	1	7,69	1	11,11	2	10,53	3	21,43	1	6,67	1	10
6	Derajat kesukarelaan	<input type="checkbox"/> sangat terpaksa <input type="checkbox"/> terpaksa <input type="checkbox"/> hampir tidak terpaksa <input type="checkbox"/> tidak terpaksa sama sekali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<input type="checkbox"/> sangat terpaksa <input type="checkbox"/> terpaksa <input type="checkbox"/> hampir tidak terpaksa <input type="checkbox"/> tidak terpaksa sama sekali	3	15	1	7,69	-	-	1	5,26	3	21,43	-	-	2	20
		<input type="checkbox"/> hampir tidak terpaksa <input type="checkbox"/> tidak terpaksa sama sekali	17	85	12	92,31	9	100	18	94,74	10	71,43	15	100	8	80

Sumber : Data primer diolah, 2004

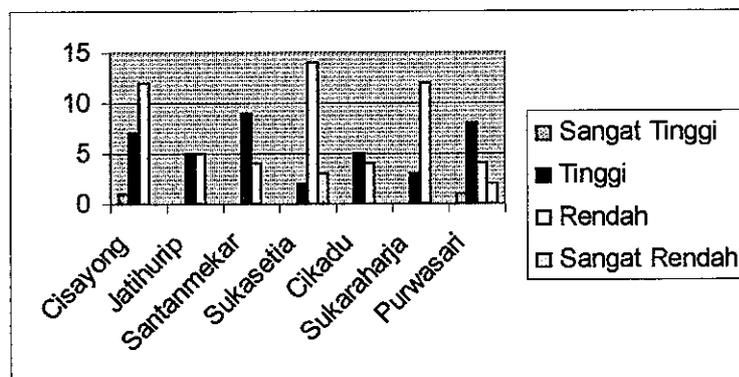
5.2.2. Tingkat Peran Serta Masyarakat Dalam Proyek P2MPD

Tingkat peran serta dari masing-masing desa di Kecamatan Cisayong dan perbedaan tingkat peran serta dari masing-masing desa dapat dilihat pada Tabel V.7 dengan membandingkan bobot dari masing-masing indikator. Derajat keterlibatan warga tersebut diukur dengan pemikiran bahwa semakin banyak anggota masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersama ataupun semakin besar kesediaannya menyumbangkan pikiran, tenaga atau bentuk sumbangan lain maka semakin tinggi tingkat peran sertanya. Dengan mengetahui tingkat peran serta masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan peran serta yang dilakukan masyarakat, seperti yang dikatakan oleh Arstein (Panudju dalam Sihono, 2003: 29-31) akan dapat diketahui sejauhmana kemampuan masyarakat dalam menjalin kemitraan (*partnership*) dengan pemerintah, menerima pelimpahan kekuasaan (*delegated power*), dan mengontrol atau mengatur program yang berkaitan dengan kepentingan mereka (*citizen control*).

5.2.2.1. Tingkat Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong Dilihat Dari tingkat Kehadiran Dalam Pertemuan

Tingkat peran serta masyarakat di Kecamatan Cisayong dapat diketahui dari frekuensi kehadiran warga dalam pertemuan, keaktifan warga dalam berdiskusi, keterlibatan dalam kegiatan fisik, dan kesediaan warga dalam memberikan sumbangan dana atau iuran secara sederhana, gambaran tingkat peran serta tersebut seperti terlihat pada Tabel V.9. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari 20 responden di Desa Cisayong, 12 responden tingkat kehadirannya rendah dalam pertemuan, 7 responden tingkat kehadirannya tinggi, 1 responden tingkat kehadirannya sangat tinggi. Dari responden di Santanamekar, 9 orang tingkat kehadirannya tinggi, dan 4 orang tingkat kehadirannya rendah.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari 9 responden di Cikadu, 5 responden mengaku tingkat kehadirannya tinggi dalam pertemuan dan 4 responden tingkat kehadirannya rendah. Masyarakat di Desa Sukasetia pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari 19 responden, 14 responden mengaku tingkat kehadirannya rendah dalam pertemuan dan 2 responden tingkat kehadirannya tinggi, dan 3 sisanya sangat rendah.



GAMBAR 5.11.
TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT KECAMATAN CISAYONG
DILIHAT DARI TINGKAT KEHADIRAN DALAM PERTEMUAN

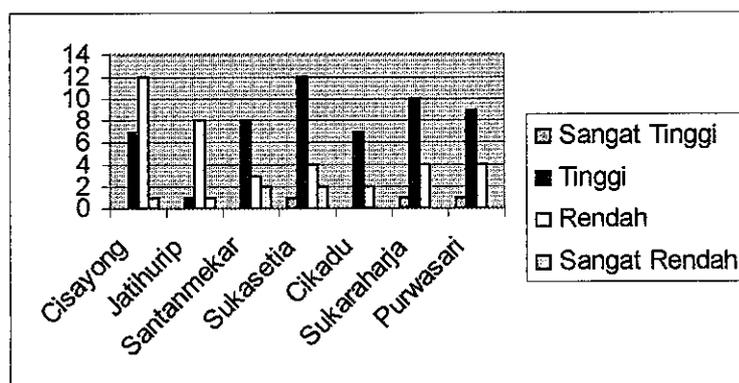
Sumber : Hasil Analisis, 2004

Masyarakat di Desa Purwasari Pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari 14 responden, 1 orang sangat rendah, 4 responden mengaku tingkat kehadirannya rendah dalam pertemuan dan 8 responden tingkat kehadirannya tinggi. Masyarakat di Desa Sukaraharja Pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari 15 responden, 12 responden mengaku tingkat kehadirannya rendah dalam pertemuan dan 3 responden tingkat kehadirannya tinggi. Masyarakat di Desa Jatihurip pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari 10 responden, 5 responden mengaku tingkat kehadirannya rendah dalam pertemuan dan 5 responden tingkat kehadirannya tinggi.

5.2.2.2 Tingkat Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong Dilihat Dari Keaktifan

Berdiskusi

Berdasarkan tingkat keaktifan berdiskusi, sebagian besar responden di Cisayong memiliki tingkat keaktifan berdiskusi yang tinggi 7 orang, dan sisanya memiliki tingkat berdiskusi yang rendah 12 orang. Responden di Santanamekar, 8 orang tinggi dalam aktifitas berdiskusi, 3 orang rendah, dan 2 orang sangat rendah. Di Cikadu Berdasarkan tingkat keaktifan berdiskusi, sebagian besar responden memiliki tingkat keaktifan berdiskusi yang tinggi 7 orang dan sisanya memiliki tingkat berdiskusi yang rendah.



GAMBAR 5.12.
TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT KECAMATAN CISAYONG DILIHAT
DARI KEAKTIFAN BERDISKUSI

Sumber : Hasil Analisis, 2004

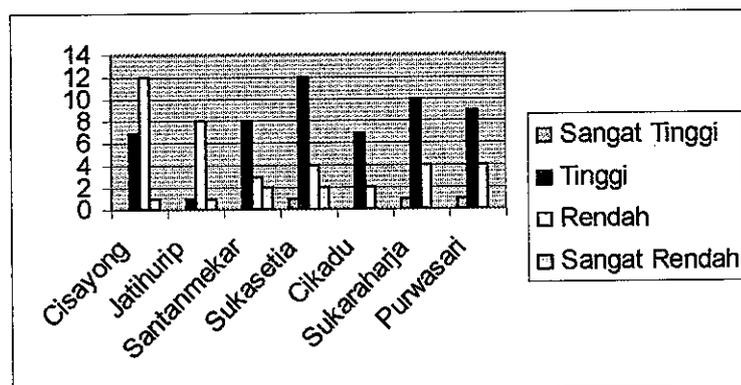
Di Sukasetia berdasarkan tingkat keaktifan berdiskusi, ada 1 orang yang sangat tinggi aktifitasnya, sebagian besar responden memiliki tingkat keaktifan berdiskusi yang tinggi 12 orang, dan 4 orang memiliki tingkat berdiskusi yang rendah, dan 2 orang sangat rendah. Di Purwasari sebagian besar responden memiliki tingkat keaktifan berdiskusi yang tinggi 9 orang dan 4 orang memiliki tingkat berdiskusi yang rendah, sedangkan 1 orang sangat tinggi. Di Sukaraharja, berdasarkan tingkat keaktifan berdiskusi, sebagian besar responden memiliki tingkat keaktifan berdiskusi yang tinggi 10 orang dan 4 responden

memiliki tingkat berdiskusi yang rendah, dan ada 1 responden yang aktivitasnya sangat tinggi. Di Jatihurip responden yang memiliki tingkat keaktifan berdiskusi yang sangat tinggi ada 1 orang, tinggi 2 orang, dan yang memiliki tingkat berdiskusi yang rendah 7 orang, dan sangat tinggi 1

5.2.2.3. Tingkat Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong Dilihat Dari Kehadiran Dalam Kegiatan Fisik

Berdasarkan tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik maka sebagian besar responden memiliki tingkat kehadiran yang rendah dengan tingkat kehadiran yang tinggi 1 orang, dan 14 orang dengan tingkat yang rendah. Berdasarkan tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik maka sebagian besar responden Santanamekar ada 7 orang yang tingkat kehadirannya tinggi, 4 orang rendah, dan 2 orang sangat rendah. Di Cikadu yang tingkat kehadirannya rendah ada 4 orang, dan responden yang memiliki tingkat kehadiran yang tinggi ada 3 orang, sedangkan sisanya memiliki tingkat kehadiran yang sangat tinggi 1 dan sangat rendah 3.

Responden dari Desa Sukasetia, berdasarkan tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik, responden yang memiliki tingkat kehadiran yang rendah 5 orang dan 13 responden yang memiliki tingkat kehadiran yang tinggi sedangkan 1 responden memiliki tingkat kehadiran yang tinggi. Responden di Purwasari, memiliki tingkat kehadiran yang rendah 8 dan tidak ada responden yang memiliki tingkat kehadiran yang sangat tinggi sedangkan sisanya memiliki tingkat kehadiran yang tinggi 5 orang dan sangat rendah 1 orang.



GAMBAR 5.13.
TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT KECAMATAN CISAYONG DILIHAT
DARI KEHADIRAN DALAM KEGIATAN FISIK

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Responden dari Desa Sukaraharja memiliki tingkat kehadiran yang rendah 8 orang, dan tidak ada responden yang memiliki tingkat kehadiran yang sangat tinggi, sedangkan sisanya memiliki tingkat kehadiran yang tinggi 5 orang dan sangat rendah 1 orang. Di Jatihurip, responden yang memiliki tingkat kehadiran yang tinggi 1 orang, ada 8 responden yang memiliki tingkat kehadiran yang rendah, dan sangat rendah 1 orang.

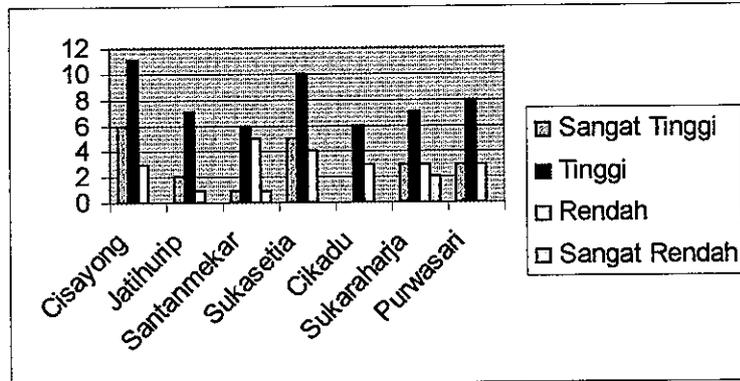
5.2.2.4. Tingkat Peran Serta Masyarakat Kecamatan Cisayong Dilihat Dari

Keaktifan Membayar Iuran

Mengenai tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama di Desa Cisayong yaitu 6 orang sangat tinggi, yang tinggi ada 11 orang, dan rendah ada 3 orang. Dari responden di Santanamekar, 1 orang memiliki tingkat keaktifan sangat tinggi, 6 orang tinggi, 5 orang rendah, dan sangat rendah 1 orang. Di Cikadu Mengenai tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama maka semua responden memiliki tingkat keaktifan yang tinggi sebanyak 6 orang dan 3 orang yang rendah.

Tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan di Desa Sukasetia ada 5 orang yang sangat tinggi, 10 orang dengan aktivitas tinggi, dan 4 orang rendah.. Dari responden

di Purwasari, 3 orang memiliki tingkat keaktifan sangat tinggi, 8 orang tinggi, dan 3 orang rendah. Di Sukaraharja, tingkat keaktifan membayar iuran para responden yaitu 3 orang sangat tinggi, memiliki tingkat keaktifan yang tinggi sebanyak 7 orang dan 3 orang yang rendah, dan 2 orang sangat rendah. Di Jatihurip, 2 orang sangat tinggi aktivitasnya, 7 orang tinggi, dan 1 orang dengan aktivitas yang rendah.



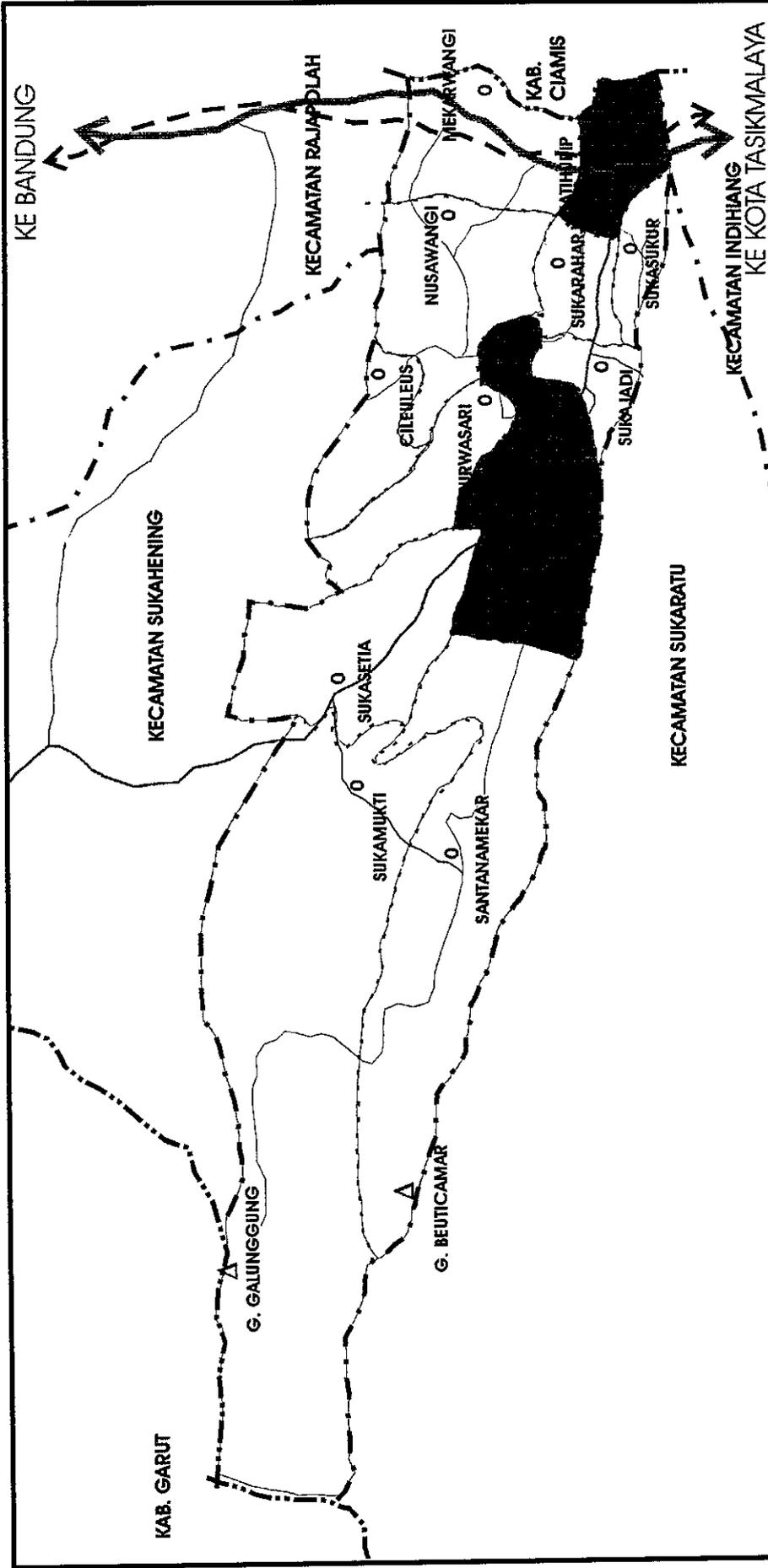
GAMBAR 5.14.
TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT KECAMATAN CISAYONG
DILIHAT DARI KEAKTIFAN MEMBAYAR IURAN

Sumber: Hasil Analisis, 2004

Tingkat peran serta masyarakat Kecamatan Cisayong dilihat dari tingkat kehadiran dalam pertemuan, tingkat aktivitas berdiskusi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik dan tingkat keaktifan membayar iuran jika dilihat pada total bobot dari tiap-tiap desa diketahui tingkat peran serta responden dari masing-masing desa ternyata berbeda-beda. Dari keempat variabel tingkat peran serta masyarakat di atas, secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel V.7 berikut:

Tabel V.7.
PERAN SERTA MASYARAKAT KECAMATAN CISA YONG
DALAM PROYEK P2MPD

No	VARIABEL	Skala Penilaian	Bobot	DESA													
				Cisayong		Santana mekar		Cikadu		Sukaseta		Purwasari		Sukara harja		Jathurip	
				N	N x Bo bot	N	N x Bo bot	N	N x Bo bot	N	N x Bo bot	N	N x Bo bot	N	N x Bo bot	N	N x Bo bot
1	Tingkat kehadiran dalam pertemuan	Sangat tinggi	5	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-
		Tinggi	4	28	9	36	20	8	2	8	32	3	12	5	20	-	-
		Rendah	2	12	4	8	8	14	4	28	8	12	24	5	10	-	-
		Sangat rendah	1	-	-	-	-	3	1	3	2	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			20	57	13	44	9	28	19	39	14	45	42	36	10	30	
2	Tingkat keaktifan berdiskusi	Sangat tinggi	5	-	-	-	-	-	1	5	1	5	1	5	1	5	5
		Tinggi	4	28	8	32	28	12	48	9	36	10	40	2	8	8	14
		Rendah	2	12	3	6	4	4	8	4	8	4	8	4	8	7	14
		Sangat rendah	1	1	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			20	68	13	40	9	32	19	66	14	49	14	53	10	27	
3	Tingkat kehadiran kegiatan fisik	Sangat tinggi	5	-	-	-	1	5	1	5	-	-	-	-	-	-	-
		Tinggi	4	1	7	28	3	12	13	5	20	13	52	1	4	4	16
		Rendah	2	14	4	8	4	8	5	10	8	16	1	2	8	16	1
		Sangat rendah	1	5	2	2	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1
JUMLAH			20	33	13	38	9	26	19	67	14	37	33	54	10	21	
4	Tingkat keaktifan membayar iuran	Sangat tinggi	5	30	1	5	-	-	5	25	3	15	3	15	2	10	10
		Tinggi	4	11	44	24	6	24	10	40	8	32	7	28	7	28	28
		Rendah	2	3	6	10	3	6	4	8	3	6	3	6	1	2	2
		Sangat rendah	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
JUMLAH			20	80	13	40	9	30	19	73	14	53	15	51	10	40	
JUMLAH TOTAL N X BOBOT				238		162		106		275		184		193		118	





 PROGRAM PASCA SARJANA
 MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH DAN KOTA
 UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS
 HUBUNGAN SENTRALITAS DENGAN
 BENTUK DAN TINGKAT PARTISIPASI
 MASYARAKAT PADA PROYEK PZMPD
 DI KEC. CISAYONG KAB. TASYIKMALAYA

**PETA TINGKAT PERAN SERTA
 KECAMATAN CISAYONG**

LEGENDA

	Jalan Kabupaten		Jalur Kereta
	Jalan Desa		Jalan Propinsi
	Batas Desa		Tingkat Peran Serta Tinggi
	Batas Kabupaten		Tingkat Peran Serta Rendah
	Batas Kecamatan		

Sumber:
 BAPEDA KABUPATEN TASIKMALAYA

SKALA
 NUMERIK: 1:100.000
 GARIS: 0 0.5 1.5 2.5 km

Cbt 5.15 103

UTARA NO. PETA HALAMAN
 Tahun Pembuatan :
 2003

Sebagaimana diuraikan pada Bab III Metode Penelitian, pengukuran tingkat peran serta masyarakat diukur dengan metode kuantitatif melalui penjumlahan skor bobot variabel dikali jumlah responden. Besarnya interval diketahui dengan selisih skor maksimum dikurangi skor minimum dibagi 4. Besarnya interval setiap desa berbeda dikarenakan jumlah responden setiap desa berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.8. sebagai berikut:

TABEL V.8.
SKALA PERAN SERTA MASYARAKAT KECAMATAN CISAYONG
PADA P2MPD TAHUN 2002

N O	DESA	Jml Responden	Skor Minimum	Skor Maksimum	Selisih	Interval	Skor Peran Serta	TINGKAT PERAN SERTA			
								Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah
1	Cisayong	20	80	400	320	80	238	321 - 400	241 - 320	161 - 240	80 - 160
2	Santanamekar	13	52	260	208	52	162	209 - 260	157 - 208	105 - 156	52 - 104
3	Cikadu	9	36	180	144	36	106	145 - 180	109 - 144	73 - 108	36 - 72
4	Sukasetia	19	76	380	286	76	275	305 - 380	229 - 304	153 - 228	76 - 152
5	Purwasari	14	56	280	224	56	184	225 - 280	169 - 224	113 - 168	56 - 112
6	Sukarharja	15	60	300	240	60	193	241 - 300	181 - 240	121 - 180	60 - 120
7	Jatihurip	10	40	200	160	40	118	161 - 200	121 - 160	81 - 120	40 - 80

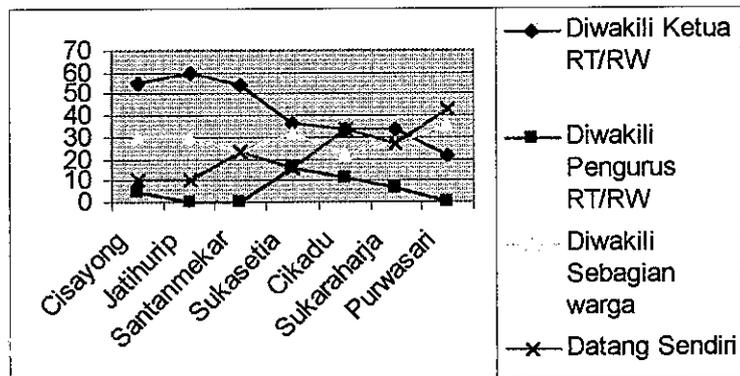
Sumber: Hasil Analisis, 2004

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Desa Cisayong dengan skor 238 memiliki masyarakat dengan tingkat peran serta rendah. Sedangkan Desa Santanamekar memiliki masyarakat dengan tingkat peran serta tinggi (skor 162), Desa Cikadu termasuk rendah (106), Desa Sukasetia termasuk tinggi (275), Desa Purwasari termasuk tinggi (184), Desa Sukarharja termasuk tinggi (193) dan Jatihurip termasuk rendah (118).

5.3. Analisis Hubungan Sentralitas dengan Peran Serta

5.3.1. Analisis Hubungan Sentralitas dengan Bentuk Peran Serta

Secara teoritis, semakin dekat dengan pusat, maka akan terdapat perbedaan bentuk peran serta masyarakat. Desa-desanya yang tingkat sentralitasnya relatif lebih tinggi akan lebih mempunyai sifat-sifat kota, seperti individualistis, jarak sosial dan relasi yang bersifat *Gesselschaft* atau berdasarkan manfaat. Sebaliknya desa-desa yang memiliki tingkat sentralitas relatif rendah akan lebih mempunyai sifat-sifat desa seperti kegiatan bekerja, gotong royong, musyawarah dan sistem tolong menolong dan relasi yang bersifat *Geimenschaft* atau kekeluargaan.

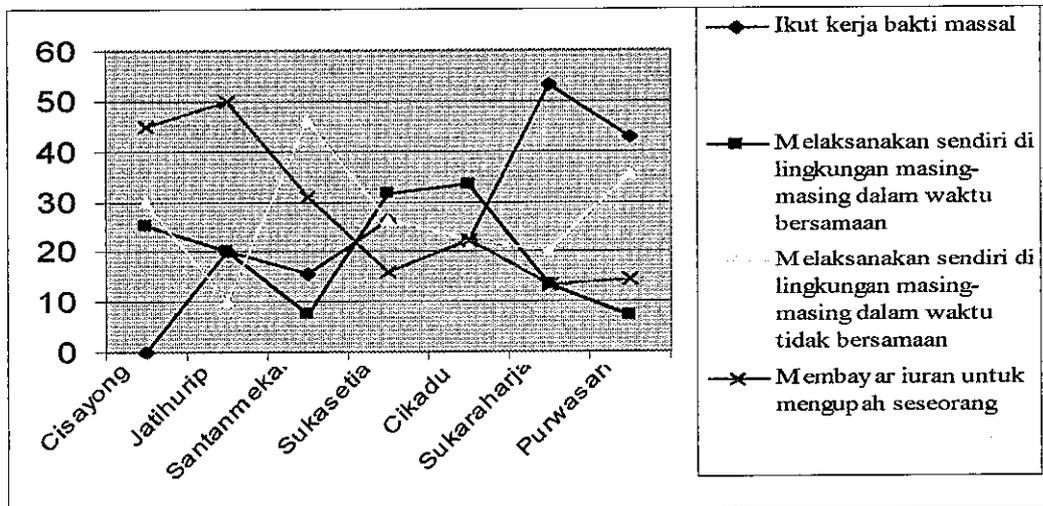


GAMBAR 5.16.
HUBUNGAN SENTRALITAS DENGAN SIFAT KEHADIRAN DALAM REMBUG DESA

Sumber: Hasil Analisis, 2004

Pada gambar 5.16 dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan sifat kehadiran masyarakat di desa yang memiliki sentralitas tinggi dengan sentralitas rendah. Di desa dengan sentralitas tinggi dan sedang masyarakat merasa kehadirannya dalam rembug desa cukup diwakili baik oleh ketua atau pengurus RT/RW atau sebagian warga dibandingkan harus datang sendiri. Sedangkan di desa-desa dengan sentralitas rendah sebagian masyarakat memilih untuk datang sendiri menghadiri rembug desa.

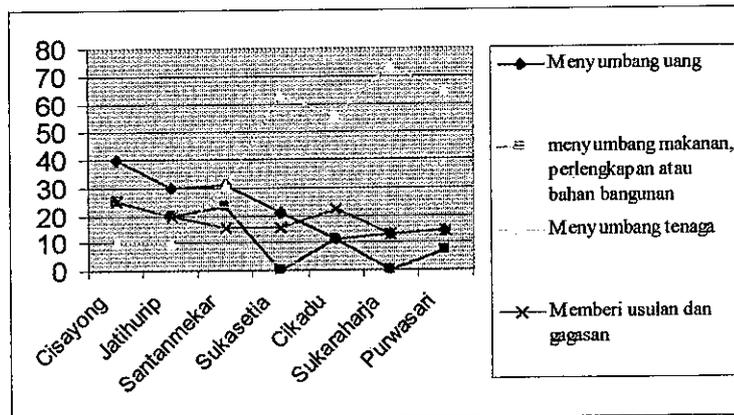
Dalam keterlibatannya pada saat pelaksanaan, ada kecenderungan masyarakat di desa dengan sentralitas rendah lebih memilih untuk ikut melakukan kerja bakti massal dibandingkan dengan bentuk lainnya. Hal ini sesuai dengan sifat gotong royong yang masih kuat di desa-desa tersebut. Sebaliknya, di desa dengan sentralitas tinggi dan sedang jumlah responden yang memilih untuk membayar orang daripada mengikuti bentuk lainnya. Kecenderungan tersebut di atas dapat dilihat dalam gambar 5.17 berikut:



GAMBAR 5.17.
HUBUNGAN SENTRALITAS DENGAN KETERLIBATAN DALAM PELAKSANAAN

Sumber: Hasil Analisis 2004

Dari cara peran serta masyarakat dapat dilihat dalam gambar 5.18 bahwa di desa dengan sentralitas tinggi dan sedang, lebih banyak masyarakat yang memilih cara ikut serta dengan menyumbang baik berupa uang maupun makanan, perlengkapan atau bahan bangunan dibandingkan menyumbang dalam bentuk tenaga. Sebaliknya di desa dengan sentralitas rendah lebih banyak masyarakat yang memilih cara ikut sertanya dalam bentuk sumbangan tenaga dibandingkan dengan bentuk lainnya.

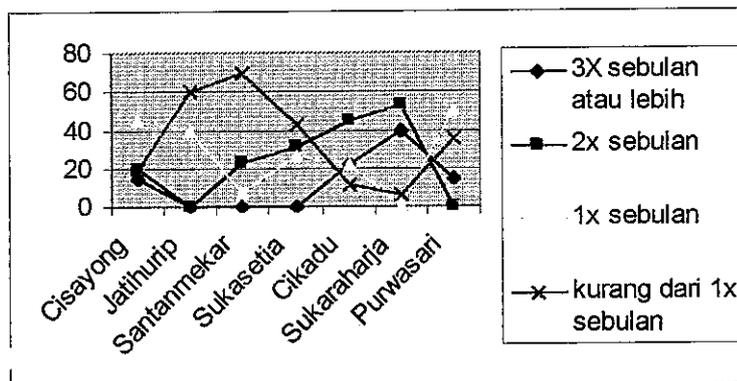


GAMBAR 5.18.

HUBUNGAN SENTRALITAS DENGAN CARA IKUT SERTA

Sumber: Data Primer, diolah 2004

Frekuensi berkumpul masyarakat di tujuh desa di Kecamatan Cisayong tidak menunjukkan hubungannya dengan tingkat sentralitas desa-desa tersebut. Dalam gambar 5.19 menunjukkan bahwa di desa-desa dengan sentralitas rendah beberapa desa memiliki masyarakat dengan frekuensi berkumpul tinggi, beberapa desa lagi frekuensi berkumpul masyarakatnya rendah.

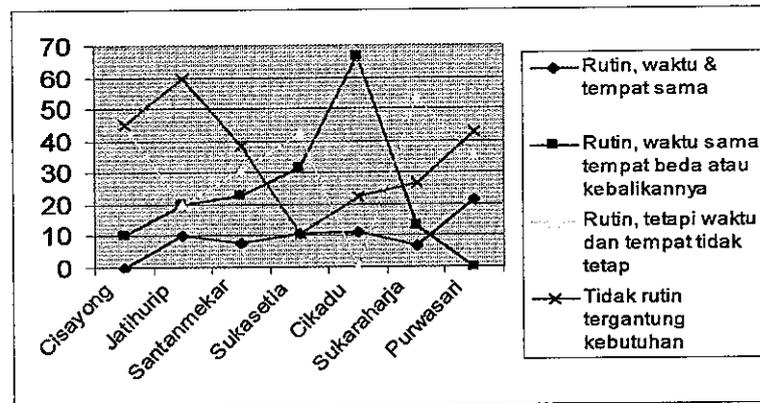


GAMBAR 5.19.

HUBUNGAN SENTRALITAS DENGAN FREKUENSI BERKUMPUL

Sumber: Hasil Analisis, 2004

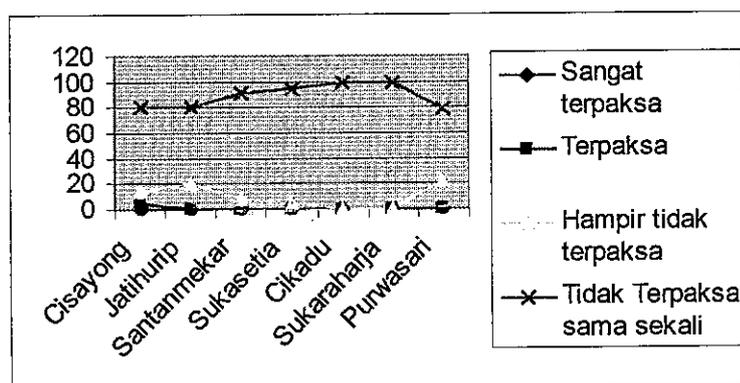
Pada gambar 5.20 dapat dilihat tidak ada kecenderungan semakin rendah tingkat sentralitas akan semakin rutin atau tidak rutin kegiatan berkumpul masyarakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat sentralitas desa tidak berhubungan dengan rutinitas kegiatan berkumpul masyarakat.



GAMBAR 5.20.
HUBUNGAN SENTRALITAS DENGAN RUTINITAS KEGIATAN BERKUMPUL

Sumber: Hasil Analisis, 2004

Dalam melaksanakan kegiatannya hampir seluruh responden (89%) responden menyatakan tidak terpaksa sama sekali terlibat pada proyek P2MPD. Tetapi ada kecenderungan sebagian responden merasa hampir tidak terpaksa dan bahkan 1 responden di Desa Cisayong menyatakan terpaksa terlibat. Gambar 5.21 menunjukkan ada kecenderungan semakin tinggi tingkat sentralitas semakin menurun derajat kesukarelaan masyarakat untuk terlibat dalam proyek ini. Tetapi terdapat pengecualian di Desa Purwasari yang memiliki tingkat sentralitas paling rendah justru mempunyai derajat kesukarelaan lebih rendah dibandingkan dengan desa-desa lainnya.



GAMBAR 5.21.
HUBUNGAN SENTRALITAS DENGAN DERAJAT KESUKARELAAN

Sumber: Hasil Analisis, 2004

5.3.2. Analisis Hubungan sentralitas dengan Tingkat Peran Serta

Berdasarkan hasil analisis tingkat sentralitas diketahui bahwa yang mempunyai tingkat sentralitas tinggi adalah desa Cisayong, tingkat sentralitas sedang adalah Desa Jatihurip, sedangkan lima desa lainnya termasuk ke dalam desa dengan sentralitas rendah. Dari 100 responden yang disebar di tujuh desa, terdapat 20 orang responden di desa sentralitas tinggi, 10 responden di desa sentralitas sedang dan sisanya 70 responden di desa dengan tingkat sentralitas rendah.

Masyarakat di desa yang memiliki sentralitas tinggi ternyata hanya ada 30% yang memiliki tingkat peran serta tinggi, 50% masyarakat menunjukkan tingkat peran serta yang rendah. Sisanya terdapat 10% masyarakat yang menunjukkan tingkat peran serta yang sangat rendah.

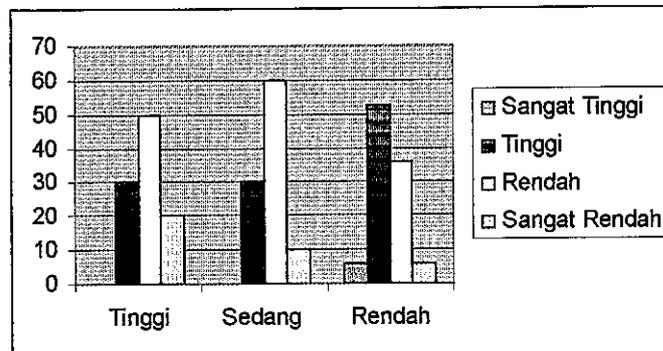
Masyarakat di desa yang memiliki sentralitas sedang 20 %nya memiliki tingkat peran serta sangat tinggi, 20% warganya menunjukkan tingkat peran serta yang tinggi, dan ada 50% yang menunjukkan tingkat yang rendah. Hanya ada 10% yang tingkat peran sertanya sangat rendah

Masyarakat di desa yang memiliki sentralitas rendah ada 5,69% yang memiliki tingkat peran serta sangat tinggi, 52.76% masyarakat menunjukkan tingkat peran serta yang tinggi, dan ada 35.86% lagi menunjukkan tingkat yang rendah. Dari 70 responden, 5.69% menunjukkan tingkat peran serta yang tinggi. Terbanyak terdapat di desa yang sentralitasnya rendah. Sedangkan pada warga yang tergabung dalam tim inti, hubungan sentralitas terhadap tingkat peran serta dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL V.14
TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT BERDASARKAN
TINGKAT SENTRALITAS DESA

Sentralitas	Tingkat peran serta								Total	
	Sangat tinggi		Tinggi		Rendah		Sangat rendah			
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Tinggi	0	0	6	30	10	50	4	20	20	100
Sedang	2	20	2	20	5	50	1	10	10	100
Rendah	4	5.69	27	52.76	25	35.86	4	5.69	70	100
Total	4		36		41		8		100	

Sumber : Hasil Analisis, 2004



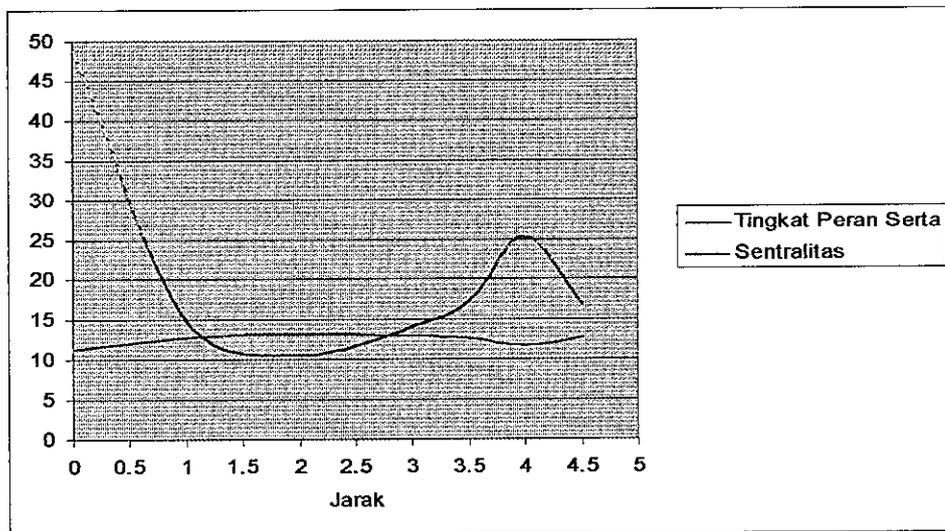
GAMBAR 5.22.
HUBUNGAN SENTRALITAS DENGAN TINGKAT
PERAN SERTA MASYARAKAT

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Hubungan sentralitas dengan tingkat peran serta dapat dilihat pada gambar 5.21. Pada gambar menunjukkan bahwa pada tingkat sentralitas yang tinggi akan terjadi penurunan tingkat peran serta. Pada saat garis sentralitas mulai naik, garis yang menunjukkan tingkat peran serta semakin rendah.

Skala tingkat peran serta yang digunakan untuk melihat hubungan tingkat sentralitas dengan tingkat peran serta dihitung dengan cara total skor tingkat peran serta dibagi dengan jumlah responden. Sebagai contoh jumlah skor tingkat peran serta Desa Cisayong adalah 238 dengan jumlah responden 20, maka skala tingkat peran serta masyarakat Desa Cisayong adalah 11,90. Hal ini dimaksudkan untuk menyamakan besarnya interval skor semua desa, yaitu skor minimum 4 dan skor maksimum 20.

Sehingga skor desa lainnya adalah: Desa Santanamekar 12,46, Desa Cikadu 11,8, Desa Sukasetia 14,47, Desa Purwasari 13,14, Desa Sukaraharja 12,87 dan Jatihurip 11,80.



GAMBAR 5.23.
HUBUNGAN TINGKAT SENTRALITAS DENGAN TINGKAT PERAN SERTA

Sumber : Hasil Analisis, 2004

5.4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peran Serta Masyarakat

5.4.1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Bentuk Peran Serta

Aktivitas antara orang tua, remaja, dan anak-anak tentu berbeda-beda. Usia tidak hanya menggambarkan perbedaan fisik dan biologis seseorang tapi juga dapat menggambarkan kondisi psikologisnya. Tentu ada pengecualiannya, namun secara umum semakin bertambah usia akan semakin tinggi pula tingkat kedewasaannya sehingga dalam penelitian ini, usia dipandang sebagai faktor internal yang dapat mempengaruhi bentuk partisipasinya dalam proyek P2MPD.

Sistem pelapisan sosial yang memberikan kesempatan lebih banyak bagi laki-laki untuk tampil dalam urusan di luar rumah pada akhirnya menjadikan perempuan tidak banyak kesempatan untuk berperan serta dalam P2MPD sehingga dimungkinkan bentuk peran sertanya dipengaruhi oleh jenis kelamin.

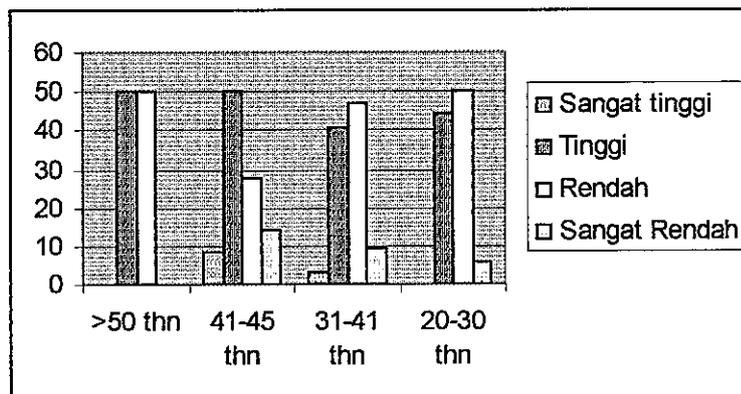
Jenis pekerjaan seseorang menentukan jumlah waktu luang yang dimiliki seseorang dalam bersosialisasi. Selain itu jenis pekerjaan juga menunjukkan status dan kedudukan seseorang dalam bersosialisasi. Kondisi ini tentunya berpengaruh terhadap bentuk peran serta seseorang dalam proyek P2MPD

Warga yang mengambil peran dalam proyek P2MPD memiliki tingkat pendapatan yang bervariasi. Warga yang memiliki tingkat pendapatan tinggi memiliki sumber daya yang lebih banyak daripada warga yang berpendapatan rendah. Perbedaan ini sudah barang tentu akan mempengaruhi bentuk peran serta seseorang untuk berperan aktif.

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi bentuk peran serta masyarakat dalam proyek P2MPD. Diketahui bahwa di Kecamatan Cisayong bentuk peran serta paling baik dilakukan oleh warga yang tingkat pendidikan relatif rendah. Ini disebabkan karena jumlah warga yang berpendidikan tinggi relatif sangat sedikit, berbeda dengan responden tamatan SD yang mencapai 52,9%, SLTP 12,9%, dan SLTA ada 17%. Menariknya, walaupun tidak termasuk sebagai tim inti mereka tetap memiliki bentuk peran serta partisipasi yang baik.

5.4.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Peran Serta

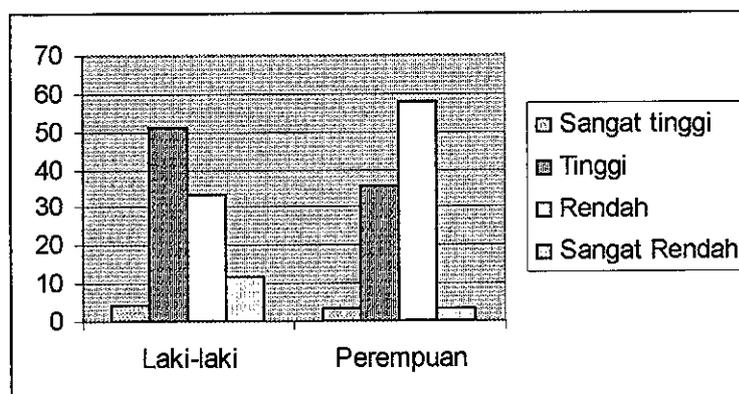
Usia dipandang sebagai faktor internal yang dapat mempengaruhi tingkat peran serta warga dalam proyek P2MPD. Adanya perbedaan tingkat peran serta dilihat dari faktor usia dapat dilihat pada Gambar 5.24.



GAMBAR 5.24.
HUBUNGAN USIA RESPONDEN DENGAN TINGKAT PERAN SERTA

Sumber : data primer diolah, 2004

Sistem pelapisan sosial yang memberikan kesempatan lebih banyak bagi laki-laki untuk tampil dalam urusan di luar rumah pada akhirnya menjadikan perempuan tidak banyak kesempatan untuk berperan serta dalam P2MPD sehingga dimungkinkan tingkat peran sertanya dipengaruhi oleh jenis kelamin. Gambar 5.25. berikut ini menunjukkan perbedaan tersebut:

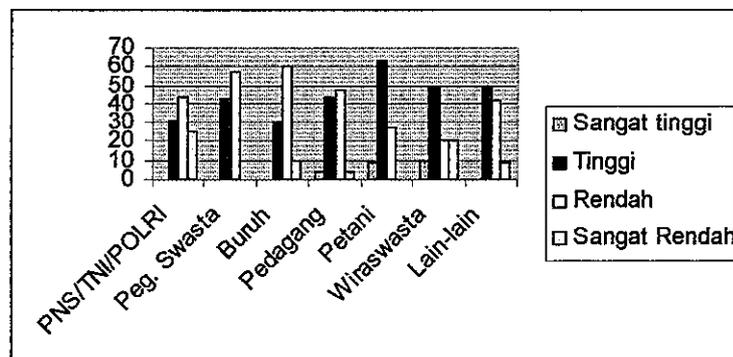


GAMBAR 5.25.
HUBUNGAN JENIS KELAMIN DENGAN TINGKAT PERAN SERTA

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Jenis pekerjaan seseorang menentukan jumlah waktu luang yang dimiliki seseorang dalam bersosialisasi. Selain itu jenis pekerjaan juga menunjukkan status dan kedudukan

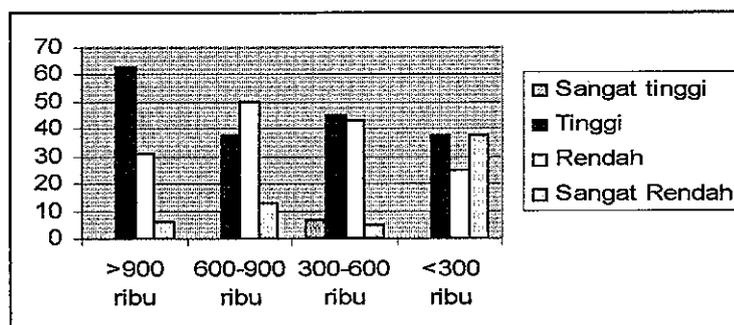
seseorang dalam bersosialisasi. Kondisi ini tentunya berpengaruh terhadap tingkat peran serta seseorang dalam proyek P2MPD. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 5.26 berikut:



GAMBAR 5.26.
HUBUNGAN JENIS PEKERJAAN DENGAN TINGKAT PERAN SERTA

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Warga yang mengambil peran dalam proyek P2MPD memiliki tingkat pendapatan yang bervariasi. Warga yang memiliki tingkat pendapatan tinggi memiliki sumber daya yang lebih banyak daripada warga yang berpendapatan rendah. Hubungan kedua variabel ini dapat dilihat pada Gambar 5.27. berikut ini:

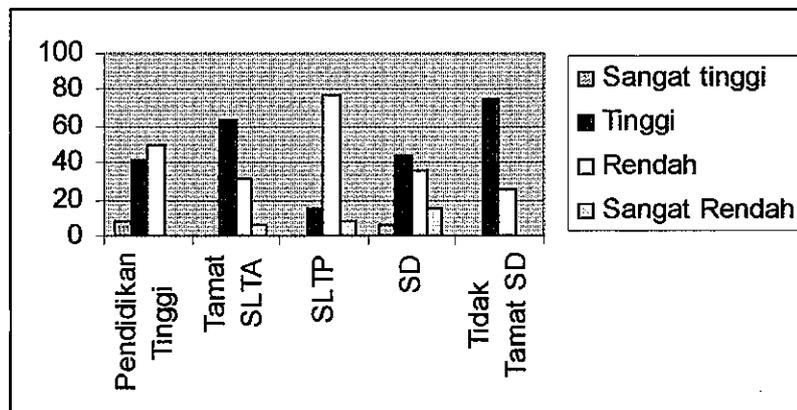


GAMBAR 5.27.
HUBUNGAN TINGKAT PENDAPATAN DENGAN TINGKAT PERAN SERTA

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi warga adalah tingkat pendidikan. Seharusnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi tingkat peran sertanya, tetapi pada proyek P2MPD di Kecamatan Cisayong hal ini tidak

terjadi. Hubungan faktor ini terhadap tingkat peran serta masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



GAMBAR 5.28.

HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DENGAN TINGKAT PERAN SERTA

Sumber : Hasil Analisis, 2004

5.5. Pembahasan

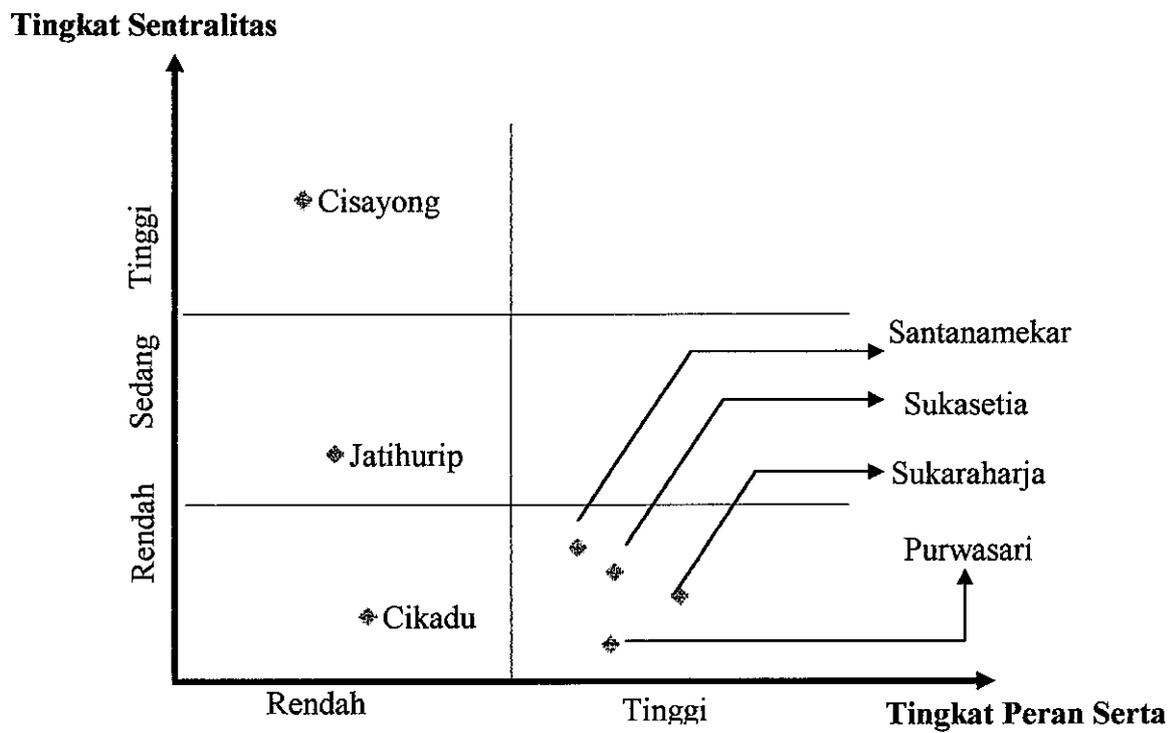
Ciri-ciri kehidupan masyarakat pedesaan seperti kegiatan bersama, gotong royong, dan musyawarah seperti menurut Koentjaraningrat (dalam Sajogyo, 1995; 24-32), masih nampak kuat di tujuh desa di Kecamatan Cisayong. Dilihat dari jenis pekerjaannya, ketujuh desa di atas merupakan suatu masyarakat yang heterogen, namun adanya kesamaan bahasa, adat istiadat menunjukkan homogenitas suatu desa. Walaupun demikian telah menunjukkan adanya gejala kota yaitu adanya keinginan sebagian warga untuk mengganti kegiatan kerjabakti masal dengan membayar iuran pengganti, dan keinginan untuk mewakilkan kehadirannya dalam suatu pertemuan.

Tujuh desa yang ada memiliki perbedaan dalam kemampuannya menjangkau pusat kota guna mencukupi kebutuhan hidup. Sentralitas suatu daerah diukur melalui sejauh mana daerah bersangkutan merupakan pusat-pusat dari suatu pertumbuhan (*growth centre*) dari daerah lain atau sejauh mana daerah bersangkutan memiliki daya jangkau terhadap pusat-pusat pertumbuhan yang ada. (Slamet, 1993; 115).

Dari hasil analisis diketahui bahwa dari tujuh desa di Kecamatan Cisayong berdasarkan tingkat sentralitasnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: desa dengan tingkat sentralitas tinggi (Desa Cisayong), tingkat sentralitas sedang (Desa Jatihurip) serta tingkat sentralitas rendah (Desa Santanamekar, Sukasetia, Cikadu, Purwasari dan Sukaraharja). Sehingga bila dikaitkan dengan semakin tinggi tingkat sentralitas suatu tempat maka karakteristik kota-nya semakin kuat, bisa dikatakan bahwa masyarakat di Desa Cisayong dan Desa Jatihurip sudah mempunyai karakteristik masyarakat kota. Sebaliknya di desa dengan tingkat sentralitas rendah, karakteristik masyarakat pedesaannya masih kuat.

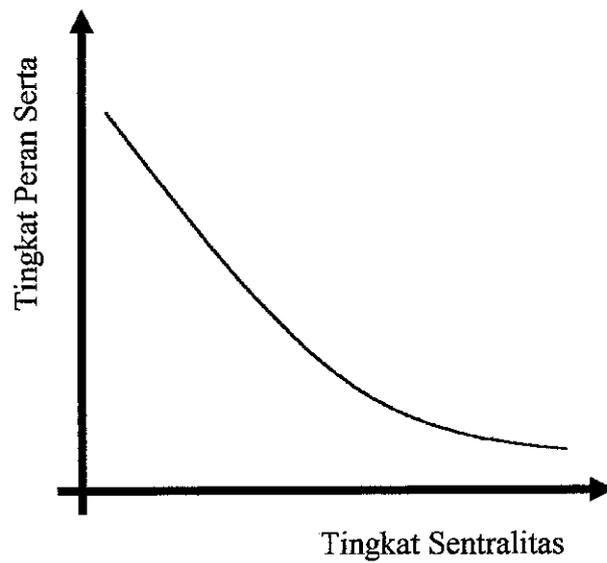
Dengan keterbatasan-keterbatasan desa-desa yang ada, peran serta masyarakat dalam menjaga keberlangsungan fasilitas publik menjadi bertambah penting. Perhitungan *chi square* untuk melihat hubungan sentralitas dan tingkat peran serta warga di 7 desa di Kecamatan Cisayong 0,009 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sentralitas berhubungan dengan tingkat peran serta masyarakat, dimana diketahui semakin tinggi sentralitas desa akan semakin rendah tingkat peran serta masyarakatnya.

Tingkat peran masyarakat di desa dengan sentralitas rendah termasuk tinggi dibandingkan dengan desa sentralitas rendah. Kondisi sosial masyarakat desa yang lebih *gemeinschaft* atau bersifat guyub mendorong masyarakatnya untuk secara bersama-sama berperan sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing individu. Selain itu masih adanya semacam sanksi sosial bagi yang tidak berperan serta dalam suatu kegiatan di desa membuat masyarakat merasa segan dan malu bila tidak ikut berperan serta.



Gambar 5.29.
 DIAGRAM SEBARAN TINGKAT SENTRALITAS DAN TINGKAT PERAN SERTA

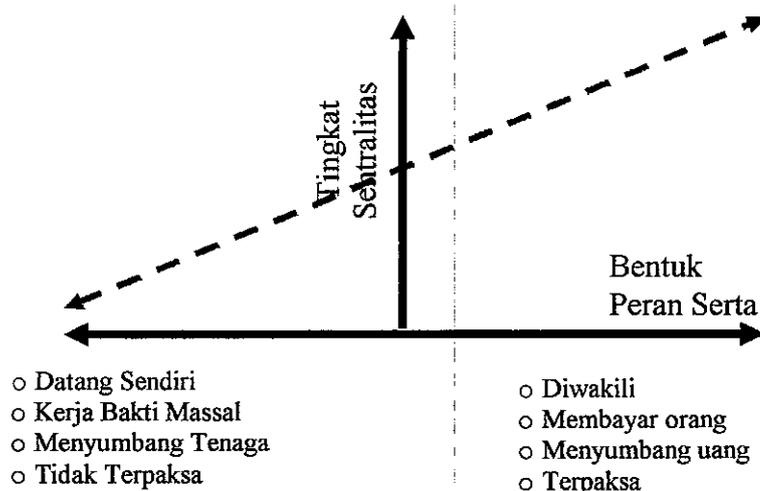
Sumber: Hasil Analisis, 2004



GAMBAR 5.30.
 HUBUNGAN TINGKAT SENTRALITAS DENGAN TINGKAT PERAN SERTA

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Sebaliknya di desa dengan sentralitas tinggi yang kondisi sosial masyarakatnya lebih berciri kondisi sosial masyarakat kota, dimana hubungan masyarakatnya lebih bersifat longgar, acuh tak acuh mengakibatkan masyarakatnya tidak merasa segan bila tidak ikut berperan serta.



GAMBAR 5.31.
HUBUNGAN TINGKAT SENTRALITAS DENGAN BENTUK PERAN SERTA

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Dari hasil analisa dapat dilihat bahwa tingkat sentralitas berhubungan dengan bentuk peran serta masyarakat. Semakin tinggi sentralitas bentuk partisipasi masyarakatnya cenderung berbentuk mewakilkan kehadirannya dalam kegiatan pertemuan, membayar orang dalam keterlibatannya pada saat pelaksanaan proyek, memberikan sembilang berupa materi baik dalam bentuk uang maupun bahan bangunan serta derajat keterlibatannya agak terpaksa. Sebaliknya semakin rendah tingkat sentralitas bentuk partisipasi masyarakatnya cenderung berbentuk datang sendiri dalam pertemuan, ikut kerja bakti massal, menyumbang dalam bentuk tenaga pada saat pelaksanaan serta menjalani

proses proyek secara sukarela. Hal tersebut di atas dapat diilustrasikan seperti pada gambar 5.31. diatas.

Dalam mengukur keberhasilan proyek P2MPD , tingkat swadaya masyarakat dijadikan salah satu indikatornya. Tetapi dari wawancara dengan ketujuh ketua tim inti, diketahui bahwa nilai nominal swadaya masyarakat hanya merupakan kekurangan biaya proyek yang direncanakan masyarakat. Berapapun nilai kekurangan biaya tersebut, selama masih terjangkau, pasti kekurangan biaya tersebut akan ditutupi dengan cara meminta sumbangan masyarakat baik itu berupa materi maupun tenaga.

Jadi sebenarnya tingkat swadaya tidak bisa digunakan sebagai indikator keberhasilan proyek, tetapi lebih tepat sebagai indikator efektivitas dan efisiensi proyek. Sebagaimana dikatakan Schubeler (dalam Sihono;2003:206) bahwa untuk menilai peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana seharusnya didasarkan pada bagaimana proses peran serta masyarakat tersebut berjalan. Tingkat swadaya tidak bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan suatu proyek yang melibatkan peran serta masyarakat, karena lebih merupakan produk dari suatu proyek.

Bentuk-bentuk dan tingkat peran serta tersebut diatas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan perhitungan *chi square*, dari 5 ciri-ciri individu sebagai faktor internal yang secara signifikan mempengaruhi bentuk peran serta adalah faktor umur dan tingkat pendapatan. Selain itu faktor sentralitas desa juga berpengaruh terhadap bentuk peran serta.

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi bentuk peran serta diketahui melalui hasil perhitungan *chi square* sebesar 0,007 lebih kecil dari angka alfa 0,05 menunjukkan bahwa faktor umur ternyata sangat signifikan mempengaruhi bentuk peran serta masyarakat. Hal ini tentunya berkaitan dengan masalah tenaga. Semakin tua umur seseorang tentunya semakin berkurang tenaganya tetapi semakin matang pemikirannya,

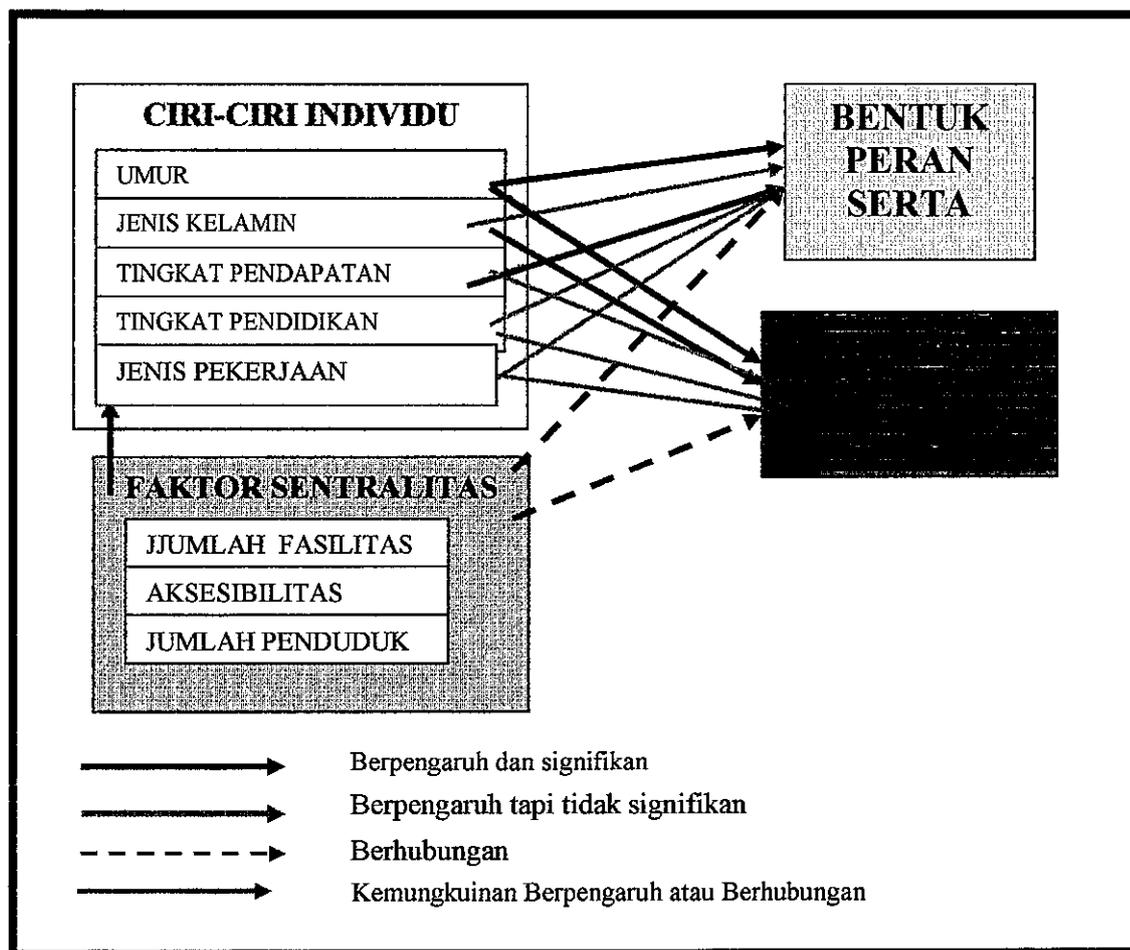
sehingga semakin tua umur seseorang maka dia akan cenderung untuk tidak memberikan sumbangan dalam bentuk tenaga, tetapi dalam bentuk materi atau pemikiran (saran).

Sedangkan dari perhitungan *chi square* faktor jenis kelamin berada pada angka 0,433, hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak mempengaruhi bentuk peran serta. Artinya bentuk peran serta tidak dipengaruhi sifat laki-laki atau perempuan dari warganya.

Hasil perhitungan *chi square* sebesar 0,003 ($<0,05$) pada faktor tingkat pendapatan menunjukkan bahwa pendapatan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi bentuk peran serta warga. Hal ini dikarenakan tingkat pendapatan seseorang menunjukkan jenis potensi atau sumber daya yang dimiliki seseorang yang akan disumbangkan sebagai bentuk peran sertanya. Sedangkan faktor tingkat pendidikan, berdasarkan perhitungan *chi square* sebesar 0,149 menunjukkan bahwa pendidikan menjadi faktor yang menentukan bentuk peran serta warga.

Sedangkan tingkat peran serta masyarakat dipengaruhi faktor jenis kelamin, umur dan sentralitas. Pelapisan sosial di masyarakat yang lebih memberi kesempatan kepada laki-laki dengan usia yang telah dianggap dewasa dan mapan. Pelapisan sosial dimana individu pada usia dewasa lebih dihargai dibandingkan dengan usia remaja, menjadikan individu pada usia dewasa lebih leluasa dalam berperan serta. Sebagai contoh, dalam rembug desa biasanya orang yang berusia dewasa setiap masukan atau usulannya akan lebih mudah diterima masyarakat karena lebih dianggap berpengalaman. Hal ini sesuai dengan pendapat Poerwanto (2000,227) bahwa dalam perspektif masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, ada anggapan bahwa semua hubungan di dalam masyarakat itu tersusun atas dasar aturan-aturan yang bersifat hierarkis. Demikian juga di dalam praktek-praktek kehidupan, anak-anak muda selalu diarahkan agar bersikap hormat kepada yang lebih tua.

Selain itu faktor keruangan yang tercermin pada tingkat sentralitas sangat signifikan. Pada perhitungan *chi square* sebesar 0,009, menunjukkan bahwa semakin tinggi sentralitas suatu desa maka akan semakin rendah tingkat peran sertanya.



GAMBAR 5.32.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERAN SERTA MASYARAKAT

Sumber: Hasil Analisis, 2004

Dilihat dari jarak desa dengan pusat, diketahui bahwa semakin dekat dengan pusat maka akan semakin rendah tingkat peran sertanya. Desa Cisayong sebagai pusat dan Desa Cikadu yang paling dekat jaraknya dengan pusat daripada desa yang lain memiliki tingkat sentralitas yang tinggi, namun dengan tingkat peran serta yang rendah. Desa Santanamekar, Sukasetia, Purwasari dan Desa Sukaraharja yang jaraknya lebih jauh dari

pusat kota memiliki tingkat peran serta yang tinggi. Desa Jatihurip walaupun jaraknya dengan Desa Cisayong sebagai pusat agak jauh, tapi karena memiliki akses lebih mudah ke Kota Tasikmalaya ataupun ke Kota Bandung memiliki tingkat sentralitas sedang tetapi tingkat peran serta masyarakatnya rendah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah (P2M/PPD) merupakan suatu proyek yang diharapkan memberikan dampak langsung terhadap pembangunan masyarakat dan dapat membantu pemerintah daerah dalam membiayai penyediaan serta pemeliharaan prasarana dan sarana umum. Dengan proyek ini diharapkan masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.

Tahun 2002 Kabupaten Tasikmalaya mendapat bantuan proyek P2M/PPD yang lokasinya tersebar di 100 desa di 29 kecamatan. Lokasi desa tersebut yang tersebar di wilayah desa-kota dan pedesaan memungkinkan adanya perbedaan sosial ekonomi dan tingkat sentralitas di antara desa-desa tersebut. Kondisi ini memungkinkan bentuk dan tingkat peran serta masyarakat di desa-desa tersebut juga berbeda.

Peran serta masyarakat tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal masyarakat serta faktor keruangan. Faktor internal terdiri dari ciri-ciri individu sedangkan faktor eksternal terdiri dari *stakeholders* lain selain masyarakat.

Setelah dilaksanakannya proyek P2M/PPD tahun 2002 di Kabupaten Tasikmalaya terdapat hal yang menjadi permasalahan adalah adanya penurunan tingkat swadaya masyarakat yang mungkin didorong oleh sulitnya menentukan kriteria desa yang masyarakat bersedia untuk berpartisipasi secara aktif dalam tiap tahapan pembangunan. Sehingga perlu upaya mencari kriteria desa yang dapat dilihat secara fisik antara lain dengan melihat faktor keruangan yaitu melihat sejauh mana faktor sentralitas suatu desa berhubungan dengan bentuk dan tingkat peran serta masyarakatnya.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk-bentuk peran serta masyarakat pada proyek P2MPD tahun 2002 di Kabupaten Tasikmalaya khususnya di 7 desa di Kecamatan Cisayong memiliki bentuk yang berbeda. Dalam rembug desa masyarakat di desa dengan sentralitas lebih rendah lebih senang datang sendiri daripada diwakilkan sebaliknya di desa dengan sentralitas tinggi dan sedang yang lebih memilih diwakili. Cara ikut serta masyarakat dalam berperan serta juga berbeda, di daerah yang sentralitas tinggi dan sedang, bentuk sumbangan masyarakat paling banyak berupa sumbangan uang. Sebaliknya di desa dengan sentralitas rendah masyarakat lebih memilih sumbangan berupa tenaga. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan ada kecenderungan semakin rendah tingkat sentralitas desa, masyarakat lebih memilih bentuk ikut kerja bakti massal daripada bentuk lain. Sedangkan mengenai derajat kesukarelaan maka pada umumnya masyarakat melakukan kegiatan peran serta tanpa merasa sama sekali atau dapat dikatakan berbentuk peran serta bebas, tetapi ada kecenderungan semakin tinggi tingkat sentralitas semakin menurun derajat kesukarelaannya. Sedangkan bila dilihat dari tingkat peran serta masyarakat di 7 desa di Kecamatan Cisayong pada proyek P2MPD ada dua kelompok yaitu desa dengan tingkat peran serta masyarakat tinggi (Santanamekar, Sukasetia, Purwasari dan Sukaraharja) dan desa dengan tingkat peran serta rendah (Cisayong, Jatihurip dan Cikadu).
2. Bentuk-bentuk dan tingkat peran serta tersebut diatas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari 5 ciri-ciri individu sebagai faktor internal yang secara signifikan mempengaruhi bentuk peran serta adalah faktor umur dan tingkat pendapatan. Selain itu faktor sentralitas desa juga berpengaruh terhadap bentuk peran serta. Sedangkan

tingkat peran serta masyarakat dipengaruhi faktor jenis kelamin, umur dan sentralitas. Pelapisan sosial di masyarakat yang lebih memberi kesempatan kepada laki-laki dengan usia yang telah dianggap dewasa dan mapan.

3. Tingkat sentralitas berhubungan dengan bentuk dan tingkat peran serta masyarakat. Semakin tinggi sentralitas bentuk partisipasi masyarakatnya cenderung berbentuk mewakilkan kehadirannya dalam kegiatan pertemuan, membayar orang dalam keterlibatannya pada saat pelaksanaan proyek, memberikan semangan berupa materi baik dalam bentuk uang maupun bahan bangunan serta derajat keterlibatannya agak terpaksa. Sebaliknya semakin rendah tingkat sentralitas bentuk partisipasi masyarakatnya cenderung berbentuk datang sendiri dalam pertemuan, ikut kerja bakti massal, menyumbang dalam bentuk tenaga pada saat pelaksanaan serta menjalani proses proyek secara sukarela. Sedangkan hubungan tingkat sentralitas dengan tingkat partisipasi diketahui bahwa semakin tinggi sentralitas desa akan semakin rendah tingkat peran serta masyarakatnya. Tingkat swadaya masyarakat pada proyek P2MPD tahun 2002 di 7 desa di Kecamatan Cisayong, tidak ada kaitannya dengan hubungan sentralitas dengan bentuk dan tingkat peran serta masyarakat, karena ternyata tingkat swadaya masyarakat hanya merupakan nilai kekurangan biaya untuk menyelesaikan pekerjaan proyek. Sehingga tingkat swadaya tidak bisa dijadikan indikator untuk mengukur keberhasilan proyek dilihat dari tingkat peran serta masyarakat, tetapi bisa digunakan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi proyek.

Pada proyek P2MPD tahun 2002 di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, terdapat perbedaan bentuk dan tingkat peran serta masyarakat di tujuh desa yang mendapatkan bantuan proyek. Perbedaan bentuk dan tingkat peran serta masyarakat tersebut berhubungan dengan perbedaan tingkat sentralitas ketujuh desa tersebut.

6.2. Rekomendasi

Dari kesimpulan seperti tersebut diatas, maka dapat disampaikan rekomendasi yang berupa usulan bagi upaya peningkatan peran serta masyarakat pada proyek P2MPD selanjutnya maupun proyek-proyek sejenis di masa yang akan datang dan usulan bagi pengembangan studi lanjutan.

Usulan bagi upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam proyek P2MPD maupun proyek-proyek sejenis:

1. Dilihat dari bentuk peran sertanya, desa sentralitas rendah sebaiknya mendapatkan proyek-proyek yang melibatkan banyak pekerja atau padat karya seperti pembuatan jalan atau saluran. Masyarakat di desa dengan sentralitas rendah yang lebih memilih sumbangan dalam bentuk tenaga akan lebih tergerak untuk ikut berpartisipasi. Keterbatasan dana pembangunan dapat diatasi dengan menutupi biaya upah pekerja atau bahkan bahan dengan memanfaatkan bahan bangunan yang tersedia.
2. Di desa dengan sentralitas tinggi sebaiknya mendapatkan proyek-proyek yang bersifat stimulan dan mempunyai perbandingan biaya bahan lebih tinggi dibandingkan upah misalnya pembangunan gedung atau bangunan. Masyarakat di desa dengan sentralitas tinggi lebih memilih bentuk sumbangan dalam bentuk uang serta makanan dan bahan atau perlengkapan bangunan. Sehingga diharapkan kendala keterbatasan dana pembangunan dapat diatasi. Pemberian jenis proyek yang berbeda kepada masyarakat daerah sentralitas tinggi dan masyarakat daerah sentralitas rendah akan menjadikan proyek lebih efisien bila dilihat dari hasil atau produk serta optimal dalam pencapaian tujuan.
3. Dalam proses perencanaan berupa pertemuan, minimnya waktu luang masyarakat desa sentralitas tinggi perlu disiasati dengan mengatur jadwal pertemuan yang tidak

terpaku pada hari dan jam kerja. Pertemuan juga dapat menggunakan jadwal-jadwal pertemuan informal masyarakat.

4. Melihat rendahnya tingkat peran serta perempuan dibandingkan laki-laki, perlu ditentukan mengenai jumlah minimal perempuan yang terlibat (kuota minimal) dalam tim inti proyek P2MPD maupun proyek sejenis lainnya, sehingga akan memaksa masyarakat untuk melibatkan perempuan dalam pembangunan. Sehingga diharapkan potensi perempuan di desa dapat lebih dioptimalkan perannya dalam pembangunan pembangunan.
5. Dengan memperhatikan kelemahan dari studi ini antara lain mengenai desa dalam lingkup penelitian yang perbedaan tingkat sentralitasnya kurang terlihat mencolok, sehingga perbedaan sifat kota dan desa kurang begitu terlihat secara signifikan. Selain itu karena keterbatasan waktu penelitian, teori-teori yang dikaji baik mengenai peran serta maupun sentralitas kurang begitu mendalam.

Demikian hasil studi ini, meskipun masih jauh dari kesempurnaan, tetapi semoga dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sehingga proyek ataupun program yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih optimal dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Bintarto, 1983, *Interaksi Desa Kota*, Jakarta, Penerbit Ghalia.
- Budihardjo, Eko, 1997, *Tata Ruang Perkotaan*, Bandung, Penerbit Alumni ITB
- Conyers, Diana, 1994, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Daldjoeni, N, 1985, *Seluk Beluk Masyarakat Kota*, Bandung, Penerbit Alumni
- Daldjoeni, N, 1998, *Geografi Kota dan Desa*, Bandung, Penerbit Alumni
- Direktorat Permukiman dan Perkotaan Deputi Bidang Regional dan Sumber Daya Alam, 2001, *Pedoman Umum Program P2MPD*, Jakarta, BAPPENAS
- Dirjend Cipta Karya DPU bekerjasama dengan IAP, 1997, *Kamus Tata Ruang*, Jakarta, Dirjend Cipta Karya DPU.
- Evers, Hans-Dieter, 1979, *Sosiologi Perkotaan*, Jakarta, LP3ES
- Hadi, Sutrisno, 2000, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Penerbit ANDI.
- Jayadinata, Johara T, 1992, *Tata Guna Lahan Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*, Bandung, Penerbit ITB.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan)*, Jakarta, CIDES
- Kartasasmita, Ginanjar, 1997, *Adminstrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta, LP3ES
- Koestoer, Raldi Hendro, 1997, *Perspektif Lingkungan Desa-Kota Teori dan Kasus*, Jakarta, UI Press

- Litwin, Howard, 1986, *Correlates of Community Collaboration*, dalam Yair Levi dan Howard Litwin, *Community and Cooperatives in Participatory Development*, England, Gower Publishing Company
- Mikkelsen, Brittha, 2003, *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Jakarta, Yayasan Obor.
- Nasir, Moh., 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nasution, 2002, *Metodologi Research*, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara.
- Osborne, David dan Ted Gaebler, 1996, *Reinventing Government, Mentranformasikan Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik*, Jakarta, PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Poerwanto, 2000, *Kebudayaan dan Lingkungan, Dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Riyadi, dan Deddy Supriadi Bratakusumah, 2003, *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rukmana, Nana, Steinberg, Florian, Van der Hoff, Robert, 1993, *Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan*, Jakarta, PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sajogyo, 1995, *Sosiologi Pedesaan, Kumpulan Bacaan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Sastropoetro, Santoso, 1988, *Peran serta, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Schubeler, Peter, 1996, *Participation and Partnership in Urban Infrastructure Management*, Washington DC, The World bank.
- Sevilla, Consuelo, et al alih bahasa Tuwu, Alimuddin, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Singarimbun, Masri, Effendi, Sofyan, 1995, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Slamet, 1994, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Peran Serta*, Surakarta, Sebelas Maret University Press.
- Soetrisno, Loekman, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius

Soelaeman, M. Munandar, 1989, *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung, PT Eresco.

Sugiarto, et al, 2001, *Teknik Sampling*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

Yuliati, Yayuk, 2002, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta, Lappera Pustaka Utama

Susanto, Astrid, 1999, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Jakarta, CV Putra Bardin.

MAKALAH SEMINAR/LOKAKARYA

Ma'rif, Samsul dkk, 2001, *Model-Model Pengembangan Wilayah Perdesaan*, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik UNDIP

LAPORAN PROYEK

PT. DIAGONAL PRATAMA, 2003, Final Report Konsultan Manajemen Daerah, KMD, Tasikmalaya

TESIS

Hadi, Samsul, 2003, *Kajian Pertumbuhan Kawasan Suburbia sebagai dasar Manajemen Pembangunan Kota di Perkotaan Temanggung*, Magister Teknik Perencanaan Kota UNDIP.

Nurchayanto, Herbasuki, 2001, *Potensi Peran Serta Masyarakat di dalam Pengelolaan Sistem Pengendalian Banjir di Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang*, Semarang, Magister Teknik Perencanaan Kota UNDIP.

Sihono, 2003, *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Prasarana Pasca Peremajaan Lingkungan Permukiman di Mojosongo Surakarta*, Semarang, Magister Teknik Perencanaan Kota UNDIP.

Sunarti, 2001, *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok*, Bandung, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana ITB.

TUGAS AKHIR

Dwi Rahardjo, Leksono, 1998, *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan*, Semarang, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota FT UNDIP

Yulianti, Christina, 1999, *Studi Partisipasi Masyarakat Terhadap Upaya Perbaikan Permukiman di Tambak Lorok*, Semarang, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota FT UNDIP